

**KOHESI WACANA POLITIK PADA “RUBRIK OPINI”
SURAT KABAR HARIAN *KEDAULATAN RAKYAT***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra



Oleh :

Kristin Siswi Astuti

NIM 06210144022

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2012

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul *Kohesi Wacana Politik pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat* ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan



Yogyakarta, 20 Januari 2012

Yogyakarta, 25 Januari 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Tadkiroatun Musfiroh

NIP 19690829 199403 2 001






Yayuk Eny Rahayu, M. Hum.

NIP 19760311 200312 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Kohesi Wacana Politik pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat* ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2 Februari 2012 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Prof. Dr. Suhardi, M.Pd.	Ketua Penguji		16 Februari 2012
Yayuk Eni Rahayu, M.Hum	Sekretaris Penguji		16 Februari 2012
Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.	Penguji I		17 Februari 2012
Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum	Penguji II		17 Februari 2012

Yogyakarta, 17 Februari 2012
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.
NIP. 19550505 198011 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Kristin Siswi Astuti

NIM : 06210144022

Program Studi : Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 28 Januari 2012

Penulis,



Kristin Siswi Astuti

MOTTO

**Hidup adalah belajar
Belajar bersyukur meski tak cukup
Belajar taat meski berat
Belajar memahami meski tak sehati
Belajar setia meski tergoda
Belajar tangguh meski rapuh
Belajar tegar meski gentar
Belajar tuk lebih baik dari yang lalu
(Anonim)**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
kupersembahkan skripsi sederhana ini untuk

Ibuku Nemu Astuti dan ayahku Siswoyo (Alm.) orang tua
terbaikku, terima kasih atas segalanya, kepercayaan, cinta
kasih, motivasi, dan doa yang selalu mengiringi setiap
langkahku.

Aku mencintai kalian.

Kekasihku yang setiap saat memacu agar cepat selesai dan
memberi semangat kepadaku.

Teman-teman seperjuangan sastra Indonesia angkatan 2006
Nonreguler.

Almamaterku
Universitas Negeri Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya sampaikan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat pada pihak-pihak berikut.

1. Bapak Prof. Dr. Zamzani, M.Pd. selaku Dekan FBS UNY, Bapak Dr. Maman Suryaman, M.Pd. selaku ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Prof. Dr. Suhardi, M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan berbagai kesempatan dan berbagai kemudahan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum dan Ibu Yayuk Eny Rahayu, M. Hum., selaku pembimbing yang penuh kesabaran, kearifan, dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tiada henti di sela-sela kesibukannya.
3. Bapak /Ibu dosen jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah mengajarkan berbagai wawasan linguistik yang sangat berharga kepada penulis. Kepada Bapak Dwi Budiyanto, S. Pd., selaku Pembimbing Akademik yang tiada henti memberikan motivasi dan dorongannya untuk terus berprestasi dan menuntut ilmu.
4. Orang tua penulis, ayah (Alm) dan ibu tercinta, atas limpahan kasih sayang dan doa yang tiada pernah putus, mendukung keberhasilan studi putrinya untuk bekal meniti hari esok yang penuh tantangan.
5. Terima kasih penulis sampaikan pada Serda Khandra Kurniawan, penerang hatiku. Terima kasih untuk segenap cinta, kasih sayang, kesabaran dan juga motivasi yang tiada henti tercurah untukku.
6. Teruntuk teman-temanku yang telah banyak memberi motivasi untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak kepada Restu Aji, Dek

Tasliati, Sri Yuniarti alias Puput, Yettik Wulandari, Istifatun Zaka dan Erlina Puti Wahyuningtyas atas segala dukungan dan semangat dari kalian.

7. Teman-teman kelas Bahasa dan Sastra Indonesia Nonreguler angkatan 2006 UNY baik linguistik maupun sastra yang telah memberikan keramahan, dan menemani penulis selama menjalani studi.
8. Pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan yang telah banyak membantu studi dan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, teriring ungkapan terima kasih nan tulus, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan menyemangati penulis. Kepada saudara dan teman-teman yang selalu bertanya kapan lulus, semoga skripsi ini bisa menjadi jawabannya. Saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi mereka para pencari ilmu.

Yogyakarta, 28 Januari 2012

Penulis,



Kristin Siswi Astuti

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR MATRIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Batasan Istilah	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Pengertian Wacana	10
B. Jenis-Jenis Wacana	12

C. Kohesi Gramatikal dalam Analisis Wacana	17
D. Kohesi Leksikal dalam Analisis Wacana	24
E. Koherensi dalam Analisis Wacana	31
F. Perbedaan Kohesi dan Koherensi	34
G. Opini	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian	37
B. Subjek dan Objek Penelitian	39
C. Instrumen Penelitian	39
D. Metode dan Teknik Penyediaan Data	41
E. Metode dan Teknik Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	50
1. Penanda Kohesi Gramatikal.....	50
a. Referensi (Pengacuan)	50
1. Pengacuan Persona	50
2. Pengacuan Demonstratif	51
3. Pengacuan Komparatif	52
b. Penyulihan (Substitusi)	53

c. Pelesapan (Elipsis)	53
d. Perangkaian (Konjungsi)	54
1) Sebab Akibat	55
2) Pertentangan	56
3) Konesif	56
4) Tujuan	57
5) Penambahan (Aditif)	58
6) Harapan (Optatif)	58
7) Perlawanan	59
8) Syarat	60
9) Parafrase	60
10) Ketidakserasian	61
11) Tegasan	62
2. Penanda Kohesi Leksikal	63
a. Sinonimi	63
b. Antonimi	64
c. Hiponimi	65
d. Repetisi	65
e. Kolokasi	66
f. Ekuivalensi	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68

B. Keterbatasan Penelitian	68
C. Implikasi	69
D. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	72

DAFTAR MATRIK

	Halaman
Matrik 1 : Perbedaan Kohesi dan koherensi	34
Matrik 2 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian	40
Matrik 3 : Contoh Analisis Teknik Ganti	43
Matrik 4 : Contoh Analisis Teknik Lesap	44
Matrik 5 : Triangulasi Teori	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Rangkuman Penggunaan Teknik Analisis Data	45
Tabel 2 : Kohesi Gramatikal dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	48
Tabel 3 : Kohesi Leksikal dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	49

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

A. Lambang

- ∅ unsur lesap (zero)
√ menandai kata yang berkoehesi gramatikal dan leksikal

B. Singkatan

- SKH surat kabar harian
RUU rancangan undang-undang
PP1T pengacuan persona pertama tunggal
PP1J pengacuan persona pertama jamak
PP2T pengacuan persona kedua tunggal
PP2J pengacuan persona kedua jamak
PP3T pengacuan persona ketiga tunggal
PP3J pengacuan persona ketiga jamak
PDW pengacuan demonstratif waktu
PDT pengacuan demonstratif tempat
SN substitusi nomina
SF substitusi frasal
SK substitusi klausal
SD substitusi dengan penyebutan secara definit
KSA konjungsi sebab-akibat
KPT konjungsi pertentangan
KK konjungsi kelebihan
KPK konjungsi perkecualian
KKO konjungsi konsesif
KT konjungsi tujuan
KPN konjungsi penambahan
KPI konjungsi pilihan
KH konjungsi harapan
KU konjungsi urutan

KPL	konjungsi perlawanan
KW	konjungsi waktu
KS	konjungsi syarat
KC	konjungsi cara
SMM	sinonimi antara morfem (bebas) dengan morfem (terikat)
SKK	sinonimi kata dengan kata
SKF	sinonimi kata dengan frasa atau sebaliknya
SFF	sinonimi frasa dengan frasa
SKLKL	sinonimi klausa/kalimat dengan klausa/kalimat
OK	oposisi kembar
OM	oposisi majemuk
OG	oposisi gradual
OR	oposisi relasional
OH	oposisi hirarkis
OI	oposisi inversi
REPZ	repetisi epizeuksis
RT	repetisi tautotes
RA	repetisi anafora
REPS	repetisi epistrofa
RS	repetisi simploke
RM	repetisi mesodiplosis
REPNI	repetisi epanalepsis
RAD	repetisi anadiplosis

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pengacuan Persona dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	72
Lampiran 2 : Pengacuan Demonstratif dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	79
Lampiran 3 : Pengacuan Komparatif dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	97
Lampiran 4 : Substitusi dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i> ...	101
Lampiran 5 : Elipsis dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i> ...	107
Lampiran 6 : Konjungsi dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	110
Lampiran 7 : Sinonimi dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	187
Lampiran 8 : Antonimi dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	193
Lampiran 9 : Hiponimi dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	200
Lampiran 10 : Repetisi dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	202
Lampiran 11 : Kolokasi dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	211
Lampiran 12 : Ekuivalensi dalam Wacana Politik pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>	217

KOHESI WACANA POLITIK PADA “RUBRIK OPINI” SURAT KABAR HARIAN *KEDAULATAN RAKYAT*

Oleh Kristin Siswi Astuti
NIM 06210144022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kohesi (gramatikal dan leksikal) yang membangun wacana opini politik yang dilihat dari penanda kohesi gramatikal dan leksikal. Penanda kohesi gramatikal dilihat dari referensi, substitusi, elipsis dan konjungsi. Adapun penanda kohesi leksikal dilihat dari sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.

Subjek penelitian ini adalah artikel-artikel opini politik dalam rubrik opini yang terdapat pada surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* yang berjumlah 12 rubrik opini. Penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek (gramatikal dan leksikal) yang menjadi sarana kohesi wacana opini politik pada rubrik opini surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* bulan Januari tahun 2011 dan peranan aspek-aspek tersebut dalam proses menuju teks yang utuh dan padu. Data diperoleh dengan metode simak yang disertai dengan teknik baca dan pencatatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih yang diikuti oleh teknik bagi unsur langsung. Teknik bagi unsur langsung dilanjutkan dengan teknik lanjutan, yang berupa teknik ganti dan teknik lesap. Keabsahan data diperoleh melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohesi wacana opini politik pada rubrik opini surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* terdiri dari dua aspek, yakni aspek penanda kohesi gramatikal dan penanda kohesi leksikal. Penanda kohesi gramatikal berupa pengacuan persona, pengacuan demonstratif, pengacuan komparatif, substitusi, elipsis dan konjungsi. Pengacuan persona terdiri atas PP1T, PP1J, dan PP3T. Pengacuan demonstratif terdiri atas PDW dan PDT. Substitusi terdiri atas SF, SK, dan SD. Konjungsi terdiri atas KSA, KPT, KPK, KKO, KT, KPN, KPI, KH, KU, KW, KS, dan KC. Adapun penanda kohesi leksikal terdiri dari sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Sinonimi terdiri atas SKK dan SFF. Antonimi terdiri atas OK, OM, dan OR. Repetisi terdiri atas REPZ dan RA. Kata yang diperoleh terdiri dari penanda kohesi gramatikal, berupa pengacuan persona sejumlah 52 kata, pengacuan demonstratif sejumlah 113 kata, pengacuan komparatif 26 kata, substitusi sejumlah 29 kata, elipsis sejumlah 15 kata, dan konjungsi sejumlah 201 kata. Adapun penanda kohesi leksikal berupa sinonimi sejumlah 22 kata, antonimi sejumlah 14 kata, hiponimi sejumlah 8 kata, repetisi sejumlah 22 kata, kolokasi sejumlah 31 kata, dan ekuivalensi sejumlah 9 kata. Jumlah seluruh kata yang ditemukan yaitu, 542 kata.

Kata Kunci: Kohesi (gramatikal dan leksikal), Wacana Opini Politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa secara umum digunakan sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubungan antaranggota. Untuk keperluan itu, dipergunakan suatu wahana yang dinamakan bahasa. Dengan demikian, setiap masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi tersebut di berbagai bidang (Soeparno, 2002: 5). Salah satu bidang yang menggunakan bahasa adalah politik khususnya dalam hal komunikasi politik. Komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis komunikasi ini, dapat mengikat warganya. Kegunaan komunikasi politik adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat antara sektor sosial masyarakat dengan sektor pemerintahan (Muhtadi, 2008: 30).

Hubungan antara sektor pemerintah dengan masyarakat dapat ditempuh dengan efektif melalui media. Media yang dapat digunakan dalam komunikasi politik adalah rubrik opini dalam media cetak. Dalam rubrik opini, bentuk komunikasi politik yang menarik untuk diteliti adalah pembuatan wacana politik. Hal ini dikarenakan rubrik opini yang berisikan tema politik termasuk dalam klasifikasi wacana politik. Hal itu berdasarkan pendapat Mulyana (2005: 57), yang mengklasifikasikan wacana berdasarkan isi yang

dipilah menjadi, wacana politik, wacana sosial, wacana ekonomi, wacana budaya, wacana militer, wacana hukum, dan wacana kriminalitas. Lebih lanjut lagi, Mulyana (2005: 56) menjelaskan bahwa isi wacana sebenarnya lebih bermakna sebagai ‘nuansa’ atau ‘muatan’ tentang hal yang ditulis, disebutkan, diberitakan, atau diperbincangkan oleh pemakai bahasa (wacana).

Dalam rubrik opini proses komunikasi politik bisa berbentuk melalui wacana politik. Politikus mencoba memberikan tanggapan-tanggapan atas kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Mereka memberikan pandangan tentang bagaimana fenomena politik yang berkembang di tengah masyarakat untuk ditanggapi dan disikapi.

Terkait hal ini, penulis artikel opini perlu membentuk suatu wacana yang baik dan padu agar dapat dipahami oleh publik yang membacanya. Untuk memperoleh kohesi wacana yang baik dan utuh, diperlukan suatu sarana kohesi. Anton M. Moeliono (via Mulyana, 2005: 26) menyatakan bahwa wacana yang baik dan utuh mensyaratkan kalimat-kalimat yang kohesif. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara structural membentuk ikatan sintaktikal. Mulyana (2005:26) menyatakan bahwa konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana (kata atau kalimat) yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh.

Wacana sebagai dasar pemahaman teks sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memahami informasi yang dimuat dalam rubrik opini. Wacana utuh adalah wacana yang lengkap, yaitu yang mengandung beberapa

aspek terpadu dan menyatu. Salah satu aspek yang dimaksud, antara lain adalah aspek kohesi dan koherensi.

Kalimat-kalimat yang membangun wacana politik pada opini Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu membawa konsekuensi terjadinya hubungan bentuk dan makna antarkalimat dan atau antarparagraf. Hal itu antara lain karena ada kalimat atau satu paragraf yang dikembangkan dan dijelaskan oleh kalimat atau paragraf lainnya secara kohesif dan koheren. Pola dan sifat kohesif berkaitan dengan bentuk struktural, sedangkan pola koheren berkaitan dengan hubungan isi atau makna secara semantis (Mulyana, 2005:128).

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka deskripsi mengenai kohesi wacana politik yang terdapat dalam rubrik opini ini menarik untuk diteliti. Pada kesempatan ini penulis bermaksud mendeskripsikan kohesi wacana politik yang terdapat pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* berdasarkan kajian analisis wacana. Mengingat bahwa kohesi pada wacana politik dalam rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* perlu dilakukan karena sangat besar manfaatnya, bukan hanya bagi pembaca, melainkan juga bagi para penulis artikel opini, khususnya surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.

Pembentukan opini publik adalah melalui pandangan yang dinyatakan secara terbuka. Terdapat banyak cara yang bisa digunakan untuk menyatakan opini. Tetapi, bahasa baik yang dinyatakan secara lisan ataupun tertulis merupakan bentuk yang paling umum digunakan untuk menyatakan suatu

opini. Pernyataan opini juga mensyaratkan keterbukaan sehingga mengundang sebanyak-banyaknya respon. Tahap menyatakan opini secara terbuka dalam media massa merupakan alat yang relatif paling efektif dan efisien (Muhtadi 2008: 40).

Penulis memilih surat kabar harian (SKH) *Kedaulatan Rakyat* karena harian ini merupakan media massa yang sudah sangat lama berdiri, yakni pada 27 September 1945. *Kedaulatan Rakyat* merupakan koran tertua nomor dua di Indonesia yang masih beredar sampai sekarang setelah koran *Warta Berita*. Dengan demikian, surat kabar ini dapat dikatakan sudah cukup berakar dalam kehidupan rakyat. Selain itu, surat kabar ini cukup diminati oleh masyarakat terutama di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penjualan surat kabar ini mencapai lebih dari 125.000 kopi (www.kr.co.id).

Penulis tertarik untuk meneliti rubrik opini di SKH *Kedaulatan Rakyat* didasarkan atas pertimbangan bahwa rubrik ini dipakai sebagai ajang komunikasi antaranggota masyarakat, khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu, permasalahan yang diangkat dalam artikel merupakan permasalahan yang sedang menjadi sorotan publik pada saat itu. Masalah-masalah yang berkaitan dengan wacana politik yang menarik untuk dikaji di rubrik opini di antaranya adalah isu tentang keistimewaan Yogyakarta.

Masalah tersebut menarik untuk dikaji dikarenakan adanya pertentangan-pertentangan dari berbagai kelompok dalam memandang keistimewaan Yogyakarta di tengah proses pembahasan Rancangan Undang-

Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta. Pihak-pihak yang menulis di rubrik opini adalah pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap keistimewaan Yogyakarta. Secara umum, pihak yang berkepentingan ini terbagi kedalam dua kubu. Pertama, kubu propenetapan Sultan sebagai Gubernur dan Pakualam sebagai Wakil Gubernur tanpa melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Kedua, kubu propemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus melalui pilkada karena ini dianggap lebih demokratis.

Masing-masing pihak menulis di rubrik opini agar wacana politik tentang keistimewaan Yogyakarta yang diusungnya dapat dipahami dan diikuti oleh publik secara luas. Rubrik opini menjadi menarik karena merupakan sarana yang sangat baik dalam rangka mengunggah wacana politik tersebut ke dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengingat rubrik opini, khususnya di SKH *Kedaulatan Rakyat* dapat begitu banyak dibaca oleh masyarakat. Tujuan dari proses ini adalah agar sang penulis di rubrik opini dapat mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk memahami wacana ataupun pendapat politiknya secara padu dan utuh sehingga masyarakat dapat mempercayai, bahkan dapat menjadi pengikut dari pandangan politik dari penulis rubrik opini.

Dalam rangka inilah, koehsi wacana sangat penting untuk diteliti. koehsi wacana menentukan seberapa besar kepahaman yang diterima oleh masyarakat. Agar masyarakat dapat memahami wacana dari sang penulis dengan baik, sang penulis memerlukan pengetahuan dan penguasaan koehsi yang baik. Tarigan (2009: 93) mengemukakan penguasaan koehsi tidak hanya

bergantung pada pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah bahasa, tetapi juga pengetahuan mengenai realitas, pengetahuan kita dalam proses penalaran yang disebut penyimpulan sintaktik. Suatu teks atau wacana benar-benar bersifat kohesif apabila terdapat kesesuaian secara bentuk bahasa (*language form*) terhadap ko-teks (situasi dalam bahasa; sebagai lawan dari konteks atau situasi-luar bahasa). Dengan kata lain, ketidaksesuaian bentuk bahasa dengan konteks dan juga dengan konteks, akan menghasilkan teks yang tidak kohesif.

Singkatnya, kohesi wacana merupakan serangkaian pengetahuan yang penting untuk dipunyai agar dapat menghasilkan wacana politik yang mudah dipahami masyarakat. Tanpa pengetahuan akan kohesi wacana, sebuah wacana politik tidak akan mampu bertahan lama sehingga tidak akan ditindaklanjuti dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini menganalisis kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan berupa analisis deskripsi kualitatif terhadap kaidah Bahasa Indonesia, terutama dalam hal analisis kohesi wacana.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Penanda-penanda yang dimanfaatkan dalam membangun kohesi wacana politik dalam rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*:
 - a) penanda kohesi gramatikal
 - b) penanda kohesi leksikal

2. Aspek kohesi dalam analisis wacana yang disampaikan dalam rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.
3. Fungsi kohesi wacana di surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.
4. Tujuan kohesi wacana di surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dibatasi ruang lingkup penelitian yaitu, penanda-penanda yang dimanfaatkan dalam membangun kohesi wacana politik dalam rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*. Penanda-penanda ini yaitu sebagai berikut.

1. Penanda kohesi gramatikal dilihat dari referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi.
2. Penanda kohesi leksikal dilihat dari sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Penanda kohesi gramatikal apa sajakah yang dimanfaatkan untuk membangun kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*?
2. Penanda kohesi leksikal apa sajakah yang dimanfaatkan untuk membangun kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan penanda kohesi gramatikal yang membangun kohesi wacana opini politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.
2. Mendeskripsikan penanda kohesi leksikal yang membangun kohesi wacana opini politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah penelitian bahasa yang ada, khususnya yang berkaitan dengan wacana politik. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai konsep pembuatan wacana politik yang kohesif dan koheren sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh khalayak luas, terutama dalam rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian sejenisnya.

G. Batasan Istilah

Pembatasan istilah diberikan agar antara peneliti dan pembaca terjalin kesamaan persepsi terhadap judul penelitian. Berikut ini diberikan penjelasan beberapa istilah operasional terkait penelitian.

1. Wacana adalah satuan gramatikal tertinggi yang dalam penelitian ini disampaikan secara tertulis dan direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh serta mengandung amanat yang lengkap.
2. Kohesi gramatikal adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana yang membentuk hubungan struktural dan dipandang sebagai seperangkat kaidah untuk membangkitkan susunan wacana secara gramatik.
3. Kohesi leksikal adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana yang membangun komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa.
4. Opini politik adalah pendapat masyarakat terhadap masalah politik, yang disampaikan secara tertulis pada kolom opini yang terdapat pada surat kabar.

BAB II

KAJIAN TEORI

Penelitian mengenai kohesi wacana politik dalam rubrik opini memerlukan landasan teori yang cukup memadai. Selain itu, landasan teori yang memadai juga akan memudahkan penulis dalam proses menjawab dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu penanda kohesi gramatikal dan leksikal yang dimanfaatkan untuk membangun kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*. Bab ini akan memberikan pembahasan yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengertian wacana, jenis-jenis wacana, kohesi gramatikal dalam analisis wacana, kohesi leksikal dalam analisis wacana, koherensi dalam analisis wacana dan perbedaan kohesi dan koherensi, serta pengertian opini.

A. Pengertian Wacana

Para linguist Indonesia dan di negara-negara berbahasa Melayu lainnya memperkenalkan istilah wacana sebagai bentuk terjemahan dari istilah bahasa Inggris ‘*discourse*’ (Oetomo, 1993:3). Tiap kajian wacana akan selalu mengadakan unsur-unsur satuan kebahasaan yang ada di bawahnya, seperti fonem, morfem, frasa, klausa, atau kalimat. Di samping itu, kajian wacana juga menganalisis makna dan konteks pemakaiannya (Mulyana, 2005: 6).

Di dalam buku *Dasar-Dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa*, Praptomo Baryadi (2002: 1-2) memberikan definisi sebagai berikut, kata wacana

berasal dari kata *wacana* ‘bacaan’ dalam bahasa Sanskerta. Kata *wacana* itu kemudian masuk ke dalam bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Baru *wacana* atau *wacana* atau ‘bicara, kata, ucapan’. Kata *wacana* dalam bahasa Jawa Baru itu kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *wacana* ‘ucapan, percakapan, kuliah’ (Poerwadarminta 1976: 1144). Kata *wacana* dalam bahasa Indonesia dipakai sebagai padanan (atau terjemahan) kata *discourse* dalam bahasa Inggris. Secara etimologis kata *discourse* itu berasal dari bahasa Latin *discursus* ‘lari kian ke mari’. Kata *discursus* itu diturunkan dari bentuk *discurrere*. Bentuk *discurrere* itu merupakan gabungan dari *dis* dan *currere* ‘lari, berjalan kencang’ (Webster 1983:522). Menurut Stubs dan Mc Houl (via Baryadi, 2002: 1-2) *wacana* dimengerti sebagai satuan lingual yang berada di atas tataran kalimat. Dalam konteks tata bahasa, *wacana* merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Hal ini berarti bahwa apa yang disebut *wacana* mencakup kalimat, gugus kalimat, alinea atau paragraf, penggalan *wacana* (pasal, subbab, bab, atau episode), dan *wacana* utuh. Hal ini berarti juga bahwa kalimat merupakan satuan gramatikal terkecil dalam *wacana* dan dengan demikian kalimat juga merupakan basis pokok pembentukan *wacana*.

Istilah *wacana* mempunyai acuan yang lebih luas dari sekadar bacaan. *Wacana* merupakan satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frase, kata, dan bunyi. Secara berurutan, rangkaian bunyi membentuk kata. Rangkaian kata membentuk frase dan rangkaian frase membentuk kalimat. Akhirnya, rangkaian kalimat membentuk *wacana*. Semuanya itu bisa lisan atau

tulis (Rani dkk., 2006: 3). Di sisi lain, Tarigan (2009: 24) memberikan definisi wacana sebagai satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan atau tertulis.

Analisis wacana adalah analisis atas bahasa yang digunakan. Maka, analisis wacana tidak dapat dibatasi pada deskripsi bentuk bahasa yang tidak terikat pada tujuan atau fungsi yang dirancang untuk menggunakan bentuk tersebut dalam urusan-urusan manusia (Brown dan Yule, 1996: 1). Seorang penganalisis wacana memperlakukan datanya sebagai rekaman suatu proses dinamis bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, dalam sebuah konteks, oleh pembicara/penulis untuk mengekspresikan berbagai makna dan mencapai maksud/inti wacana tersebut (Brown dan Yule, 1996: 26).

Berdasarkan pengertian wacana menurut para ahli bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana merupakan satuan bahasa tertinggi yang digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa ini terdiri dari fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Satuan bahasa ini saling berkesinambungan dan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

B. Jenis-Jenis Wacana

Rani, dkk. (2006: 25) berpendapat bahwa ada bermacam-macam cara untuk membuat klasifikasi wacana. Pengklasifikasian wacana bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dilihat dari bentuk saluran yang digunakan, dikenal wacana lisan dan tulis.

Dilihat dari jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi dikenal ada wacana monolog, dialog, dan polilog sedangkan dilihat dari tujuan berkomunikasi ada wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi. Berikut paparan ringkas mengenai wacana tulis dan wacana lisan.

1. Wacana Tulis

Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis, melalui media tulis. Wacana tulis dapat kita temukan dalam bentuk buku, berita koran, artikel, makalah, dan sebagainya (Tarigan, 2009: 49 ; Rani dkk., 2006: 26).

2. Wacana Lisan

Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan, melalui media lisan. Wacana lisan misalnya percakapan, khotbah (spontan), dan siaran langsung di radio atau TV (Tarigan, 2009: 52 ; Rani dkk., 2006: 26).

Jenis wacana dapat dilihat berdasarkan jumlah peserta yang terlibat pembicaraan dalam komunikasi. Ada tiga jenis wacana berdasarkan jumlah peserta yang ikut ambil bagian sebagai pembicara, yaitu monolog, dialog, dan polilog (Baryadi, 2002: 11-12). Berikut paparan ringkas mengenai ketiga wacana tersebut.

1. Wacana Monolog

Wacana monolog adalah wacana yang pemproduksiannya hanya melibatkan pihak pembicara. Wacana monolog dapat dibedakan menjadi wacana monolog lisan seperti ceramah, khotbah, kampanye, petuah dan wacana monolog tertulis seperti wacana eksposisi, wacana deskripsi, wacana jurnalistik, wacana prosedural, wacana narasi tertulis (Baryadi, 2002: 11).

2. Wacana Dialog

Wacana dialog adalah wacana yang pemproduksiannya melibatkan dua pihak yang bergantian peran sebagai pembicara dan pendengar. Contoh wacana dialog adalah sapa menyapa, tanya jawab, peristiwa tawar menawar dalam jual beli (Baryadi, 2002: 12).

3. Wacana Polilog

Wacana polilog adalah wacana yang diproduksi melalui pertukaran tiga jalur atau lebih. Contoh wacana polilog adalah percakapan, diskusi, rapat, musyawarah (Baryadi, 2002: 12).

Berdasarkan tujuan komunikasi, wacana dapat dibedakan menjadi wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi. Setiap jenis wacana tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Namun, kenyataannya kelima jenis wacana itu tidak mungkin dipisahkan secara murni (Rani dkk., 2006: 37). Berikut paparan ringkas mengenai kelima wacana tersebut.

1. Wacana Deskripsi

Wacana deskripsi merupakan jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra (imajinasi) tentang sesuatu hal. Aspek kejiwaan yang dapat mencerna wacana tersebut adalah emosi. Hanya melalui emosi, seseorang dapat membentuk citra atau imajinasi tentang sesuatu (Rani dkk., 2006: 37-38 ; Baryadi, 2002: 12).

2. Wacana Eksposisi

Wacana ekaposisi bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima (pembaca) agar yang bersangkutan memahaminya. Wacana eksposisi dapat

berisi konsep-konsep dan logika yang harus diikuti oleh penerima. Oleh sebab itu, untuk memahami wacana eksposisi diperlukan proses berfikir (Rani dkk., 2006: 38 ; Baryadi, 2002: 12).

3. Wacana Argumentasi

Wacana argumentasi menurut Rottenberg (via Rani dkk., 2006: 39) merupakan salah satu bentuk wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Senada dengan itu, menurut Salmon (via Rani dkk., 2006: 39) memberikan definisi argumentasi sebagai seperangkat kalimat yang disusun sedemikian rupa sehingga beberapa kalimat berfungsi sebagai bukti-bukti yang mendukung kalimat lain yang terdapat dalam perangkat itu. Sebuah wacana dikategorikan argumentasi apabila bertolak dari adanya isu yang sifatnya kontroversi antara penutur dan mitra tutur. Dalam kaitannya dengan isu tersebut penutur berusaha menjelaskan alasan-alasan yang logis untuk meyakinkan mitra tuturnya (pembaca atau pendengar).

4. Wacana Persuasi

Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Untuk mempengaruhi tersebut, biasanya digunakan segala upaya yang memungkinkan mitra tutur terpengaruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, wacana persuasi kadang menggunakan alasan yang tidak rasional (Rani dkk., 2006: 42-43 ; Baryadi, 2002: 12).

5. Wacana Narasi

Wacana narasi merupakan satu jenis wacana yang berisi cerita. Dalam narasi terdapat unsur-unsur cerita yang penting misalnya unsur waktu, pelaku, dan peristiwa. Dalam wacana narasi harus ada unsur waktu, bahkan unsur pergeseran waktu itu sangat penting. Unsur pelaku atau tokoh merupakan pokok yang dibicarakan, sedang unsur peristiwa adalah hal-hal yang dialami oleh sang pelaku. Wacana narasi pada umumnya ditujukan untuk menggerakkan aspek emosi. Dengan narasi, penerima dapat membentuk citra atau imajinasi. Aspek intelektual tidak banyak digunakan dalam memahami wacana narasi (Rani dkk., 2006: 45 ; Baryadi, 2002: 12).

Berdasarkan bentuknya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Wacana Prosa

Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Wacana ini dapat tertulis atau lisan, dapat berupa wacana langsung atau tidak langsung, dapat pula pembeberan atau penuturan. Contoh wacana prosa tulis misalnya cerita pendek (cerpen), cerita bersambung (cerbung), novel, artikel, dan undang-undang; sedangkan contoh wacana prosa lisan misalnya pidato, khotbah, dan kuliah (Tarigan, 2009: 49 ; Baryadi, 2002: 13).

2. Wacana Puisi

Wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi, baik secara tertulis ataupun lisan. Puisi dan syair adalah contoh jenis wacana puisi

tulis, sedangkan puisi yang dideklamasikan dan laga-lagu merupakan contoh jenis wacana puisi lisan (Tarigan, 2009: 53 ; Baryadi, 2002: 13).

3. Wacana Drama

Wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik secara tertulis maupun secara lisan. Bentuk wacana drama tulis terdapat pada naskah atau sandiwara, sedangkan bentuk wacana drama lisan terdapat pada pemakaian bahasa dalam pementasan drama, yakni percakapan antar pelaku dalam drama tersebut (Tarigan, 2009: 55 ; Baryadi, 2002: 13).

Klasifikasi wacana berdasarkan isi, relatif mudah dikenali. Hal ini disebabkan antara lain, oleh tersedianya ruang (space) dalam berbagai media yang secara khusus langsung mengelompokkan jenis-jenis wacana atas dasar isinya. Isi wacana sebenarnya lebih bermakna sebagai ‘nuansa’ atau ‘muatan’ tentang hal yang ditulis, disebutkan, diberitakan, atau diperbincangkan oleh pemakai bahasa (Mulyana, 2005: 56).

Dalam kajian wacana, nuansa persoalan akan dicoba dipisahkan dan dideskripsikan secara relatif. Berdasarkan isinya, wacana dapat dipilah menjadi: wacana politik, wacana sosial, wacana ekonomi, wacana budaya, wacana militer, wacana hukum, dan wacana kriminalitas (Mulyana, 2005: 57).

C. Kohesi Gramatikal dalam Analisis Wacana

Sebuah teks memerlukan unsur pembentuk teks. Kohesi merupakan salah satu unsur pembentuk teks yang penting. Brown dan Yule (via Rani dkk., 2006:

87-88) menyatakan bahwa unsur pembentuk teks itulah yang membedakan sebuah rangkaian kalimat itu sebagai sebuah teks atau bukan teks. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai oleh penggunaan unsur bahasa.

Kohesi adalah hubungan antarkalimat dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Untuk dapat memahami wacana dengan baik, diperlukan pengetahuan dan penguasaan kohesi yang baik pula, yang tidak saja bergantung pada pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah bahasa, tetapi juga kepada pengetahuan kita mengenai realitas, pengetahuan kita dalam proses penalaran, yang disebut penyimpulan sintaktik (Tarigan, 2009: 93).

Halliday dan Hasan (via Tarigan, 2009: 93-98) dalam karyanya yang berjudul *Cohesion in English* mengemukakan sarana-sarana kohesif yang terperinci. Haliday dan Hasan mengelompokkan sarana-sarana kohesif itu ke dalam lima kategori sebagai berikut.

1. Pronomina (kata ganti)

Pronomina atau kata ganti terdiri dari kata ganti diri, kata ganti penunjuk, dan lain-lain. Kata diri dalam bahasa Indonesia adalah:

- a. *Saya, aku, kita, kami*
- b. *Engkau, kamu, kau, kalian, anda*
- c. *Dia, mereka.* Kata penunjuk dalam bahasa Indonesia adalah *ini, itu, sini, situ, sana, di sini, di sana, ke sana, ke situ, ke sini*. Kata ganti empunya dalam bahasa Indonesia adalah *-ku, -mu, -nya, kami, kamu, kalian, mereka*. Bentuk-bentuk *-ku, -mu, -nya* disebut juga bentuk *enklitis*. Kata ganti penanya dalam bahasa Indonesia adalah *apa, siapa, mana*.

2. Substitusi (penggantian)

Substitusi adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau untuk menjelaskan suatu struktur tertentu (Kridalaksana, 1992: 185). Substitusi merupakan hubungan gramatikal, lebih bersifat hubungan kata dan makna. Substitusi dalam bahasa Indonesia dapat nominal, verbal, klausal, atau campuran; misalnya *satu, sama, seperti itu, sedemikian rupa, demikian, begitu, melakukan hal yang sama*.

3. Elipsis

Elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain yang ujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa (Kridalaksana, 1992: 45). Elipsis dapat pula dikatakan penggantian nol (*zero*); sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau tidak dituliskan.

4. Konjungsi

Konjungsi yang dipergunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf (Kridalaksana, 1992: 105). Konjungsi dalam bahasa Indonesia dikelompokkan atas:

- a. Konjungsi adversatif : *tetapi, namun*
- b. Konjungsi kausal : *sebab, karena*
- c. Konjungsi koordinatif : *dan, atau, tetapi*
- d. Konjungsi korelatif : *entah/entah, baik/manapun*
- e. Konjungsi subordinatif : *meskipun, kalau, bahwa*
- f. Konjungsi temporal : *sebelum, sesudah*

5. Leksikal

Kohesi leksikal diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi. Ada pun cara untuk mencapai aspek kohesi leksikal sebagai berikut.

- a. Pengulangan : pahlawan-pahlawan
- b. Sinonim : pahlawan-pejuang
- c. Antonim : putra-putri
- d. Hiponim : angkutan darat-kereta api, bis
- e. Kolokasi : buku, koran, majalah-madia massa
- f. Ekuivalensi : belajar, mengajar, pelajar, pengajar, pengajaran.

Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana (kata atau kalimat) yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Dengan kata lain, kohesi termasuk dalam aspek internal struktural wacana (Mulyana, 2005: 26).

Secara lebih rinci, penanda kohesi gramatikal menurut Mulyana (2005 :27) dibagi menjadi empat yaitu *reference* (referensi), *substitution* (substitusi), *ellipsis* (elipsis), dan *conjunction* (konjungsi). Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Referensi (pengacuan)

Referensi atau pengacuan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mendahului atau mengikutinya (Sumarlam dkk., 2004: 156). Halliday dan Hassan (via Rani dkk., 2006: 97-98) membedakan referensi menjadi dua macam, yaitu eksoforis dan endofoforis. Referensi eksoforis adalah pengacuan terhadap

anteseden yang terdapat di luar bahasa (ekstratekstual) seperti manusia, hewan, alam sekitar pada umumnya, atau acuan kegiatan. Sebaliknya, referensi endoforis adalah pengacuan terhadap anteseden yang terdapat di dalam teks (intratekstual), dengan menggunakan pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstratif, maupun pronomina komparatif.

Berdasarkan arah acuannya, referensi endoforis dibedakan menjadi dua macam, yaitu referensi anafora dan referensi katafora. Referensi anafora adalah pengacuan oleh pronomina terhadap anteseden yang terletak di kiri. Sebaliknya, referensi katafora adalah pengacuan pronomina terhadap anteseden yang terletak di kanan. Dengan demikian, jenis kohesi gramatikal pengacuan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif (Sumarlam dkk., 2004: 156). Berikut paparan ringkas mengenai ketiga pengacuan tersebut.

a. Pengacuan Persona

Pengacuan persona dapat direalisasikan melalui pronomina persona (kata ganti orang), yang meliputi persona pertama, kedua, dan ketiga baik tunggal maupun jamak (Sumarlam dkk., 2004: 157).

b. Pengacuan Demonstratif

Pengacuan demonstratif merupakan pengacuan kata ganti penunjuk. Pengacuan ini meliputi pronomina demonstratif waktu dan tempat (lokasional). Pronomina demonstratif waktu terdiri atas waktu sekarang, waktu lampau, waktu yang akan datang, dan waktu netral. Sementara itu,

pronomina demonstratif tempat terdiri dari tempat yang dekat, jauh, agak jauh, dan eksplisit (Sumarlam dkk., 2004: 264).

c. Pengacuan Komparatif

Pengacuan komparatif adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam bentuk sikap, sifat, watak, perilaku, dan sebagainya. Kata-kata yang digunakan untuk membandingkan, yaitu *seperti, bagai, bagaikan, laksana, sama dengan, tidak berbeda dengan, persis seperti, dan persis sama dengan* (Sumarlam dkk., 2004: 158).

2. Penyulihan (substitusi)

Penyulihan atau substitusi adalah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian satuan lingual tertentu (yang telah disebutkan) dengan satuan lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda. Dilihat dari segi satuan lingualnya, substitusi dibedakan menjadi substitusi nomina, substitusi verbal, substitusi frasa/klausa, dan substitusi kalimat (Sumarlam dkk., 2004: 265-266).

3. Pelesapan (elipsis)

Pelesapan (elipsis) merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satuan lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Pelesapan dapat berbentuk kata, frasa, atau klausa (Sumarlam dkk., 2004: 267).

4. Perangkaian (konjungsi)

Perangkaian (konjungsi) adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain

dalam wacana. Perangkaian unsur dalam wacana mempunyai bermacam macam makna. Adapun unsur yang dirangkaikan dapat berupa satuan lingual kata, frasa, klausa, kalimat bahkan paragraf (Sumarlam dkk., 2004: 160). Dilihat dari segi maknanya, perangkaian unsur dalam wacana mempunyai bermacam-macam makna. Makna perangkaian beserta konjungsi yang dapat dikemukakan di sini antara lain sebagai berikut.

- a. Sebab-akibat : sebab, karena, maka, makanya
- b. Pertentangan : tetapi, namun
- c. Kelebihan (eksesif) : malah
- d. Perkecualian (ekseptif) : kecuali
- e. Konsesif : walaupun, meskipun
- f. Tujuan : agar, supaya
- g. Penambahan (aditif) : dan, juga, serta
- h. Pilihan (alternatif) : atau, apa
- i. Harapan (optatif) : moga-moga, semoga
- j. Urutan : lalu, terus, kemudian
- k. Perlawanan : sebaliknya
- l. Waktu : setelah, sesudah, usai, selesai
- m. Syarat : apabila, jika (demikian)
- n. Cara : dengan (cara) begitu
- o. Makna lainnya : (yang ditemukan dalam tuturan)

D. Kohesi Leksikal dalam Analisis Wacana

Kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif (Mulyana, 2005: 29). Secara umum, piranti kohesi leksikal berupa kata atau frase bebas yang mampu mempertahankan hubungan kohesif dengan kalimat mendahului atau yang mengikuti. Menurut Rentel (via Rani dkk., 2006: 129), piranti kohesi leksikal terdiri atas dua macam. Pertama, reiterasi (pengulangan) yaitu piranti kohesi yang digunakan dengan mengulang sesuatu proposisi atau bagian dari proposisi. Reiterasi itu meliputi repetisi (ulangan) dan ulangan hiponim. Kedua, kolokasi kata yang menunjukkan adanya hubungan kedekatan tempat (lokasi). Berikut ini dibahas secara garis besar piranti kohesi leksikal

1. Reiterasi (Pengulangan)

Reiterasi (pengulangan) adalah kohesi leksikal yang berupa pengulangan konstituen yang telah disebut (Baryadi, 2002: 25). Reiterasi itu pada umumnya lebih mudah digunakan, tetapi harus dalam jumlah yang terbatas. Penggunaan reiterasi yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan keapikan bentuk wacana. Jenis-jenis reiterasi itu meliputi berikut ini.

a. Repetisi (ulangan)

Repetisi atau ulangan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hubungan kohesif antarkalimat (Rani dkk., 2006: 130). Hubungan itu dibentuk dengan mengulang sebagian kalimat. Pengulangan yang berlebihan dapat membosankan. Pengulangan itu berarti mempertahankan ide atau topik yang sedang dibicarakan. Dengan mengulang,

berarti terkait antara topik kalimat yang satu dengan kalimat sebelumnya yang diulang. Macam-macam ulangan atau repetisi berdasarkan data pemakaian bahasa Indonesia ditemukan sebagai berikut (Rani dkk., 2006: 130-133).

1. Ulangan penuh

Ulangan penuh berarti mengulang satu fungsi dalam kalimat secara penuh, tanpa pengurangan dan perubahan bentuk. Pengulangan tersebut dapat berfungsi untuk memberi tekanan pada bagian yang diulang. Pada umumnya, bagian yang diulang merupakan kata kunci yang diberi penekanan.

2. Ulangan dengan bentuk lain

Ulangan dengan bentuk lain terjadi apabila sebuah kata diulang dengan konstruksi atau bentuk kata lain yang masih mempunyai bentuk dasar yang sama.

3. Ulangan dengan penggantian

Ulangan dengan penggantian sama dengan penggunaan kata ganti (substitusi). Untuk menghubungkan kalimat dapat dilakukan dengan mengulang bagian kalimat. Namun, pengulangan itu dapat dilakukan dengan mengganti bentuk lain seperti dengan kata ganti.

- b. Ulangan dengan Hiponim

Dalam kehidupan sehari-hari, telah dikenal kata superordinat yang mempunyai beberapa subordinat. Pengulangan yang terjadi pada kata subordinat disebut ulangan dengan hiponim (Rani dkk., 2006: 132).

2. Kolokasi

Kohesi kolokasi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna yang berdekatan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Seperti kata mati berkolokasi dengan kata almarhum karena kedua kata itu memiliki makna yang saling berdekatan, yaitu almarhum mengandaikan sudah mati (Baryadi, 2002: 28-29).

Secara lebih rinci, penanda kohesi leksikal dalam wacana dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Tujuan digunakannya aspek-aspek leksikal itu diantaranya ialah untuk mendapatkan efek intensitas makna bahasa, kejelasan informasi, dan keindahan bahasa lainnya (Mulyana, 2005: 29).

a. Sinonimi (persamaan)

Sinonimi adalah suatu istilah yang dapat dibatasi sebagai telaah mengenai bermacam-macam kata yang memiliki makna yang sama atau keadaan di mana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama (Keraf, 2004: 34). Sinonimi merupakan salah satu aspek leksikal yang mendukung kepaduan wacana. Sinonimi berfungsi untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana. Wujud satuan lingual yang bersinonimi ada lima macam, yaitu (1) sinonimi antara morfem (bebas) dengan morfem (terikat), (2) kata dengan kata, (3) kata dengan frasa atau sebaliknya, (4) frasa dengan frasa, dan (5) klausa/kalimat dengan klausa/kalimat (Sumarlam dkk., 2004: 47).

b. Antonimi (lawan kata)

Antonimi adalah satuan lingual yang berlawanan, antonimi dapat disebut dengan istilah oposisi (Sumarlam dkk., 2004:271). Berdasarkan sifatnya, oposisi antarkata dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu oposisi kembar, oposisi majemuk, opsisi gradual, oposisi relasional (kebalikan), oposisi hirarkis, dan oposisi inversi (Keraf, 2004: 40-41). Berikut paparan ringkas mengenai keenam oposisi tersebut.

1) Oposisi Kembar

Oposisi kembar adalah oposisi yang mencakup dua anggota seperti laki-laki – wanita, jantan – betina, hidup – mati. Ciri utama dari kelas antonim ini adalah penyangkalan terhadap yang satu berarti penegasan terhadap anggota yang lain, penegasan terhadap yang satu berarti penyangkalan terhadap yang lain (Keraf, 2004: 40).

2) Oposisi Majemuk

Oposisi majemuk adalah oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari dua kata. Ciri utama kelas antonim ini adalah penegasan terhadap suatu anggota akan mencakup penyangkalan atas tiap anggota lainnya secara terpisah, tetapi penyangkalan terhadap suatu anggota akan mencakup penegasan mengenai kemungkinan dari semua anggota yang lain (Keraf, 2004: 40).

3) Oposisi Gradual

Oposisi gradual merupakan suatu penyimpangan dari oposisi kembar, yaitu antara dua istilah yang berlawanan masih terdapat sejumlah tingkatan antara. Ciri utama antonim ini adalah penyangkalan terhadap yang satu tidak mencakup penegasan terhadap yang lain, walaupun penegasan terhadap yang satu mencakup penyangkalan terhadap yang lain (Keraf, 2004: 40).

4) Oposisi Relasional (kebalikan)

Oposisi relasional adalah oposisi antara dua kata yang mengandung relasi kebalikan. Relasi ini biasanya dinyatakan dengan mempergunakan kata yang berlainan dalam konstruksi kalimat yang sama (Keraf, 2004: 40-41).

5) Oposisi Hirarkis

Oposisi hirarkis adalah oposisi yang terjadi karena tiap istilah menduduki derajat yang berlainan. Oposisi ini sebenarnya sama dengan oposisi majemuk, namun di sini terdapat suatu kriteria tambahan yaitu tingkat. Termasuk dalam kelas ini adalah perangkat ukuran dan penanggalan (Keraf, 2004: 41).

6) Oposisi Inversi

Oposisi inversi adalah oposisi yang terdapat pada pasangan kata. Pengujian utama mengenai oposisi inversi ini adalah apakah ia mengikuti kaidah sinonim yang mencakup (a) penggantian suatu istilah

dengan yang lain, dan (b) mengubah posisi suatu penyangkalan dalam kaitan dengan istilah yang berlawanan (Keraf, 2004: 41).

c. Hiponimi (hubungan atas-bawah)

Hiponimi adalah semacam relasi antarkata yang berwujud atas-bawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Karena ada kelas atas yang mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil, dan ada sejumlah kelas bawah yang merupakan komponen-komponen yang tercakup dalam kelas atas, maka kata yang berkedudukan sebagai kelas disebut superordinat dan kelas bawah disebut hiponim (Keraf, 2004: 38).

d. Repetisi

Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Berdasarkan tempat satuan lingual yang diulang dalam baris, klausa atau kalimat, repetisi dapat dibedakan menjadi delapan macam, yaitu repetisi epizeuksis, tautotes, anafora, epistrofa, simploke, mesodiplosis, epanalepsis, dan anadiplosis (Keraf, 2004: 127-128). Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut.

1) Repetisi Epizeuksis

Repetisi epizeuksis adalah repetisi yang bersifat langsung, artinya kata yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut (Keraf, 2004: 127).

2) Repetisi Tautotes

Repetisi tautotes adalah repetisi atas sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi (Keraf, 2004: 127).

3) Repetisi Anafora

Repetisi anafora adalah repetisi yang berwujud perulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya (Keraf, 2004: 127).

4) Repetisi Epistrofa

Repetisi epistrofa adalah repetisi yang berwujud perulangan kata atau frasa pada akhir baris atau kalimat berurutan (Keraf, 2004: 128).

5) Repetisi Simploke

Repetisi simploke adalah repetisi pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut (Keraf, 2004: 128).

6) Repetisi Mesodiplosis

Repetisi mesodiplosis adalah repetisi di tengah baris-baris atau beberapa kalimat berurutan (Keraf, 2004: 128).

7) Repetisi Epanalepsis

Repetisi epanalepsis adalah pengulangan yang berwujud kata terakhir dari baris, klausa atau kalimat, mengulang kata pertama (Keraf, 2004: 128).

8) Repetisi Anadiplosis

Repetisi anadiplosis adalah kata atau frasa terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frasa pertama dari klausa atau kalimat berikutnya (Keraf, 2004: 128).

e. Kolokasi (sanding kata)

Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu (Sumarlam, 2004: 144).

f. Ekuivalensi

Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan lainnya dalam sebuah paradigma (Sumarlam, 2004: 145).

E. Koherensi dalam Analisis Wacana

Koherensi berarti keterpaduan dan keterpahaman antarsatuan dalam suatu teks atau tuturan (Brown dan Yule, 1996: 224). Dalam struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberadaannya untuk menata pertalian batin antara proposisi yang satu dengan lainnya untuk mendapatkan keutuhan (Mulyana, 2005: 30). Lebih lanjut lagi Mulyana (2005: 31) menegaskan, hubungan koherensi adalah suatu rangkaian fakta dan gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi secara implisit (terselubung) karena berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan interpretasi. Di samping itu,

pemahaman ihwal hubungan koherensi dapat ditempuh dengan cara menyimpulkan hubungan antarproposisi dalam tubuh wacana itu.

Di dalam buku *Pengajaran Wacana*, Tarigan (2009: 100) menegaskan bahwa koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya. Kalau kita menerima bahwa wacana ideal terdiri atas kalimat-kalimat, bahkan paragraf-paragraf, maka kita pun dapat mengerti bahwa untuk mencapai kekoherensifan yang mantap dibutuhkan pemarkah koherensif atau pemarkah transisi.

Menurut Frank J. D'Angelo (via Tarigan, 2009: 100-101) dalam karyanya "*Process and Thought in Composition*", telah meneliti serta mendaftarkan aneka sarana koherensif bagi paragraf. Aneka sarana koherensi paragraf itu sebagai berikut.

1. Penambahan adisi
2. Seri, rentetan
3. Pronomina
4. Pengulangan, repetisi
5. Padan kata, sinonim
6. Keseluruhan bagian
7. Kelas anggota
8. Penekanan
9. Komparasi, perbandingan
10. Kontras, pertentangan

11. Simpulan, hasil
12. Contoh, missal
13. Kesejajaran, parallel
14. Lokasi, tempat
15. Kala, waktu.

Menurut M. Ramlan (via Mulyana, 2005: 32) merinci hubungan antarbagian dalam wacana yang bersifat koheren, yakni sebagai berikut.

1. Hubungan penjumlahan
2. Hubungan perturutan
3. Hubungan perlawanan
4. Hubungan lebih
5. Hubungan sebab-akibat
6. Hubungan waktu
7. Hubungan syarat
8. Hubungan cara
9. Hubungan kegunaan
10. Hubungan penjelasan.

Sementara itu, Kridalaksana (1984: 69; 1987: 38-40) mengemukakan bahwa hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah 'hubungan semantis'. Artinya hubungan itu terjadi antarproposisi. Secara struktural, hubungan itu dipresentasikan oleh pertautan secara semantis antara kalimat (bagian) yang satu dengan yang lainnya. Hubungan maknawi ini kadang-kadang ditandai oleh alat-alat leksikal, namun kadang-kadang tanpa penanda.

Tujuan pemakaian aspek atau sarana koherensi antara lain ialah agar tercipta susunan dan struktur wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan logis. Dalam tataran analisis wacana, kajian tentang koherensi merupakan hal mendasar dan relatif penting. Berkaitan dengan hal itu Labov (via Mulyana, 2005: 35-36) menjelaskan bahwa “ *the fundamental problem of discourse analysis is to show how one utterance follows another in rational, rule-governed manner in other words, how we understand coherent discours*”. Pokok permasalahan dalam analisis wacana adalah bagaimana mengungkapkan hubungan-hubungan rasional dan kaidah-kaidah perihal cara terbentuknya tuturan-tuturan yang koheren.

F. Perbedaan Kohesi dan Koherensi

Kohesi dan koherensi sebenarnya hampir sama, beberapa penanda aspek kohesi juga merupakan penanda koherensi. Dengan demikian, terdapat hal-hal yang tumpang-tindih di antara kedua aspek wacana tersebut. Bukan berarti keduanya tidak dapat dibedakan. Untuk memudahkan pengertian, berikut ini adalah perbedaan relatif antara kohesi dan koherensi.

Matrik 1. Perbedaan Kohesi dan Koherensi

Kohesi	Koherensi
Kepaduan	Kerapian
Keutuhan	Kesinambungan
Aspek bentuk (<i>form</i>)	Aspek makna (<i>meaning</i>)
Aspek lahiriah	Aspek batiniyah
Aspek formal	Aspek ujaran
Organisasi sintaktik	Organisasi semantis
Unsur internal	Unsur eksternal

Diolah dari sumber Mulyana (2005 : 36).

Jadi, perbedaan di antara kedua aspek tersebut ialah pada sisi titik dukung terhadap struktur wacana. Artinya, dari arah mana aspek itu mendukung keutuhan wacana. Bila dari dalam (internal), maka disebut sebagai aspek kohesi. Sebaliknya bila aspek itu berasal dari luar, maka disebut sebagai koherensi (Mulyana, 2005:36).

G. Opini

Rubrik opini merupakan bagian yang amat vital dalam kehidupan pers di Indonesia. Rubrik ini penting tidak hanya sebagai berita, namun juga sebagai komoditi. Opini mengupas tentang berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Istilah opini dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu. Menurut Santoso Sastroputro (via Ollie, 2007: 20) istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah besar orang.

Menurut Emory S. Bogardus (via Ollie, 2007: 20) dalam *The Making of Publik Opinion* mengatakan opini publik merupakan hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokratis. Bogardus lebih lanjut menyatakan bahwa opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan. Menurut Bernard Hennessy (via Ollie, 2007: 20-21) dalam bukunya *Pendapat Umum*, mengemukakan lima faktor pembentuk opini publik sebagai berikut.

1. Adanya isu.
2. *Nature of Publics*. Harus ada kelompok yang dikenal dan berkepentingan dengan persoalan itu.

3. Pilihan yang sulit, mengacu pada totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu.
4. Suatu pernyataan/opini.
5. Jumlah orang terlibat.

Menurut Astrid (Via Ollie, 2007 : 21) beberapa pengertian mengenai opini publik yaitu sifat umum yang diselidiki ilmu komunikasi merupakan bentuk kelompok (sosial) yang kolektif dan tidak permanen. Perkataan “publik” melukiskan kelompok manusia yang berkumpul secara spontan dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Menghadapi suatu persoalan.
2. Berbeda opini mengenai suatu persoalan dan berusaha mengatasinya.
3. Untuk mencapai jalan keluar melalui keinginan berdiskusi.

Dengan demikian, opini adalah suatu pernyataan tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pemilihan jenis penelitian deskriptif sangat disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas dan tujuan penelitian. Untuk membahas permasalahan dan mencapai tujuan, peneliti memahami teori dasar dengan menggunakan analisis secara induktif mengacu pada pencarian data atau pengumpulan data, tidak dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian dilaksanakan (Djajasudarma, 1993:15). Istilah deskriptif itu mengacu bahwa penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1988: 62).

Fakta-fakta yang dideskripsikan tersebut adalah aspek-aspek yang membangun kohesi (aspek gramatikal dan leksikal) wacana pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* dari segi kewacanaan. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh deskripsi yang objektif dan akurat aspek-aspek yang membangun kohesi wacana politik pada rubrik opini politik surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*. Adapun fakta-fakta yang akan dideskripsikan adalah aspek-aspek (kohesi gramatikal dan leksikal) yang menjadi sarana

kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*, seperti kalimat, paragraf, dan teks wacana opini politik. Selain itu, penulis juga berusaha menjelaskan bagaimana unsur-unsur yang menjadi sarana kohesi wacana opini politik tersebut berperan dalam proses menuju teks yang padu dan utuh. Menurut Moleong (2000 : 239), tahap-tahap penelitian dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut.

1. Tahap orientasi dan memperoleh gambaran umum

Tahap orientasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*. Gambaran umum yang diperoleh adalah penanda kohesi gramatikal dan leksikal yang terdapat pada surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.

2. Tahap eksplorasi fokus

Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasi data penelitian yang terdapat pada wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* yang berupa kalimat atau paragraf yang mengandung kohesi gramatikal dan leksikal.

3. Tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data

Pada tahap ini pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi teori dan ketekunan pengamatan. Triangulasi teori ditempuh dengan membandingkan dua teori untuk memperoleh derajat kepercayaan pada penelitian ini. Setelah dilakukan perbandingan kedua teori tersebut sama atau reliabel.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah artikel-artikel opini politik dalam rubrik opini yang terdapat pada surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*, yang berjumlah 12 rubrik opini. Opini tersebut terbit pada bulan Januari tahun 2011. Dipilihnya artikel bulan Januari dikarenakan pada bulan ini sedang marak opini politik, terutama tentang keistimewaan Yogyakarta. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah aspek-aspek kohesi (gramatikal dan leksikal) yang menjadi sarana kohesi wacana opini politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* dan peranan aspek-aspek tersebut dalam proses menuju teks yang utuh dan padu.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri (*human instrumen*). Dalam hal ini, peneliti harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk menghasilkan data yang memadai peneliti memperluas seluruh pengetahuan yang didasarkan pada teori tentang kohesi (gramatikal dan leksikal). Untuk memudahkan proses pengambilan data, peneliti menggunakan alat bantu, yaitu alat tulis dan kartu data. Kartu data digunakan untuk membantu proses pengambilan data secara tertulis. Pemilihan kartu data ini dengan pertimbangan agar mudah saat mengkategorisasikan data-data pada rubrik opini. Penggunaan kartu data sangat membantu peneliti karena tanpa kartu

data peneliti akan kesulitan dalam pengambilan data dan mengkategorikan data. Berikut ini contoh kartu data.

Tanggal 4 Januari 2011 ini genap 65 tahun berdirinya Republik Jogja. Kebetulan tahun ini akan dibahas Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang kontroversi dan menegangkan lantaran sikap pemerintah yang tercermin dalam RUUK tersebut dinilai kurang memahami peran dan posisi Sultan serta jiwa kemerdekaan masyarakat Yogyakarta. (01/65T/04/Jan/11/KR).

Keterangan:

- 01 = nomor data
 65T = 65 Tahun Republik Jogja (judul opini)
 04 = tanggal terbit artikel
 Jan = bulan Januari (bulan terbit artikel)
 11 = tahun 2011 (tahun terbit artikel)
 KR = *Kedaulatan Rakyat*

Matrik 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Aspek	Indikator
Kohesi Gramatikal	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan gramatikal dalam wacana politik pada rubrik opini dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk bahasa yang digunakan - Bentuk bahasa dalam wacana politik digunakan sebagai penanda kohesi gramatikal : <ul style="list-style-type: none"> • Referensi adalah pengacuan • Substitusi adalah penggantian • Elipsis adalah pelesapan • Konjungsi adalah perangkaian
Kohesi Leksikal	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan leksikal dalam wacana politik pada rubrik opini untuk membangun keserasian struktur secara kohesif : <ul style="list-style-type: none"> • Sinonimi adalah persamaan kata • Antonimi adalah lawan kata • Hiponimi adalah hubungan atas bawah • Repetisi adalah pengulangan • Kolokasi adalah sanding kata • Ekuivalensi adalah kesepadanan

Diolah dari sumber Mulyana (2005 : 27-29).

D. Metode dan Teknik Penyediaan Data

Metode agar bermanfaat (untuk mewujudkan tujuan kegiatan ilmiah linguistik) haruslah digunakan dalam pelaksanaan yang konkret. Untuk itu, metode sebagai cara kerja haruslah dijabarkan sesuai dengan alat dan sifat alat yang dipakai yang disebut “teknik” (Sudaryanto, 1988: 26).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode simak. Metode tersebut dilaksanakan dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1988: 2). Istilah menyimak tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga secara tertulis (Mahsun, 2007: 92). Teknik yang dipakai dalam penyediaan data adalah teknik baca disertai dengan teknik pencatatan. Teknik baca dilakukan dengan membaca rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*. Teknik selanjutnya adalah teknik catat. Teknik ini digunakan langsung ketika teknik pertama selesai dilakukan. Sesuai dengan namanya, teknik ini dilakukan dengan mencatat data pada kartu data. Teknik penomoran data dalam kartu data ini berupa nomor data, judul opini, tanggal terbit, bulan terbit dan tahun terbit artikelnya.

E. Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi, mengelompokkan data (Mahsun, 2007: 253). Dalam rangka pengklasifikasian dan pengelompokkan data tentu harus didasarkan pada apa yang menjadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan yang menjadi fokus penelitian.

Metode yang digunakan untuk menganalisis kohesi wacana opini politik adalah metode agih dengan teknik bagi unsur langsung (*segmenting immediate constituents technique*). Metode agih merupakan metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 2001: 15). Metode agih kemudian diikuti oleh teknik bagi unsur langsung (BUL). Disebut demikian karena cara yang digunakan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur; dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung yang membentuk satuan lingual yang dimaksud (Sudaryanto, 2001: 31).

Teknik bagi unsur langsung ini merupakan dasar dalam menganalisis semua wacana politik. Caranya adalah wacana politik yang akan dianalisis tersebut diperinci atau dikelompok-kelompokkan berdasarkan paragraf-paragraf. Tiap-tiap paragraf diperinci lagi menjadi satuan-satuan lingual. Hal itu dilakukan untuk memudahkan langkah-langkah penganalisisan lebih lanjut (Sudaryanto, 2001 : 31).

Teknik bagi unsur langsung dilanjutkan dengan teknik lanjutan, yang berupa teknik ganti dan teknik lesap. Teknik ganti digunakan untuk membuktikan kesamaan kelas atau konstituen, yaitu unsur penyulih dan unsur tersulih pada kohesi penyulihan (Sudaryanto, 2001 : 48). Teknik lesap digunakan untuk membuktikan kadar keintian unsur yang dilesapkan (Sudaryanto, 2001 : 41). Teknik ganti digunakan dalam menganalisis wacana

dari aspek gramatikal berupa penanda referen dan substitusi. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan matrik teknik ganti berikut ini.

Matrik 3. Contoh Analisis Teknik Ganti

Sebelum dianalisis	Sesudah dianalisis
<p><i>Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Tawaran yang dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946 itu disambut baik oleh pemerintah di Jakarta. Pindahan ibukota ke Yogyakarta ini berhasil membuat roda pemerintahan yang sebelumnya macet menjadi berjalan kembali. Tawaran Sultan HB IX ini mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Saat itu hanya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat pemerintahan RI. Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani seperti itu. (04/65T/04/Jan/11).</i></p>	<p><i>Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Tawaran yang dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946 tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX disambut baik oleh pemerintah di Jakarta. Pindahan ibukota ke Yogyakarta ini berhasil membuat roda pemerintahan yang sebelumnya macet menjadi berjalan kembali. Tawaran Sultan HB IX ini mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Saat itu hanya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat pemerintahan RI. Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani seperti itu.</i></p>
<p><i>Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Tawaran yang dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946 itu disambut baik oleh pemerintah di Jakarta. Pindahan ibukota ke Yogyakarta ini berhasil membuat roda pemerintahan yang sebelumnya macet menjadi berjalan kembali. Tawaran Sultan HB IX ini mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Saat itu hanya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat pemerintahan RI. Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani seperti itu. (04/65T/04/Jan/11).</i></p>	<p><i>Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Tawaran yang dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946 itu disambut baik oleh pemerintah di Jakarta. Pindahan ibukota ke Yogyakarta ibukota RI berpindah ke Yogyakarta berhasil membuat roda pemerintahan yang sebelumnya macet menjadi berjalan kembali. Tawaran Sultan HB IX ini mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Saat itu hanya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat pemerintahan RI. Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani seperti itu.</i></p>

Berdasarkan matrik di atas dapat dijelaskan satuan lingual *tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX* disulih oleh pronomina *itu* pada kalimat selanjutnya. Satuan lingual *itu* dapat disubstitusi dengan satuan lingual *tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX*. Satuan lingual *ibukota RI berpindah ke Yogyakarta* disulih oleh pronomina *ini* pada kalimat selanjutnya. Satuan lingual *ini* dapat disubstitusi dengan satuan lingual *ibukota RI berpindah ke Yogyakarta*.

Teknik lesap digunakan untuk menganalisis wacana yang berupa kalimat-kalimat dari aspek gramatikal berupa penanda elipsis (pelesapan). Berikut ini contoh analisis teknik lesap untuk kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.

Matrik 4. Contoh Analisis Teknik Lesap

Sebelum dianalisis	Sesudah dianalisis
<p><i>Keraton juga menanggung biaya para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Keuangan RI dalam kondisi sangat buruk. Untuk pembiayaan ini, jumlah yang dikeluarkan oleh Keraton diperkirakan mencapai jutaan gulden. Hal ini juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, Ø makanan dan Ø harta benda. (06/65T/04/Jan/11).</i></p>	<p><i>Keraton juga menanggung biaya para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Keuangan RI dalam kondisi sangat buruk. Untuk pembiayaan ini, jumlah yang dikeluarkan oleh Keraton diperkirakan mencapai jutaan gulden. Hal ini juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, menyumbangkan makanan dan menyumbangkan harta benda.</i></p>

Berdasarkan matrik di atas dapat dijelaskan kata menyumbangkan mengalami pelesapan (Ø). Pelesapan tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan kalimat. Kata menyumbangkan hanya ditulis sekali pada kalimat yang belum dianalisis. Setelah dianalisis, kata menyumbangkan dieksplisitkan sehingga

berbunyi menyumbangkan tenaga, menyumbangkan makanan, dan menyumbangkan harta benda.

Berikut ini adalah rangkuman penggunaan teknik analisis data dalam kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*.

Tabel 1. Rangkuman Penggunaan Teknik Analisis Data

No.	Kohesi	Teknik Analisis						
		Teknik Lesap	Teknik Ganti	Teknik Perluas	Teknik Sisip	Teknik Balik	Teknik Ubah Ujud	Teknik Ulang
A.	Kohesi Gramatikal							
	1. Pengacuan persona		√					√
	2. Pengacuan demonstratif		√					√
	3. Pengacuan komparatif		√					√
	4. Substitusi		√					
	5. Elipsis	√						
	6. Konjungsi		√					√
B.	Kohesi Leksikal							
	1. Sinonimi		√					
	2. Antonimi		√					
	3. Hiponimi		√	√				
	4. Repetisi		√					√
	5. Kolokasi		√	√				
	6. Ekuivalensi		√	√				

F. Keabsahan Data

Data dalam penelitian diabsahkan dengan metode ketekunan pengamatan dan triangulasi. Data penelitian berupa kohesi gramatikal dan kohesi leksikal perlu dilakukan keabsahan data agar data penelitian bersifat akurat dan dapat dipercaya. Data yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat ditentukan keabsahannya dengan teknik-teknik berikut ini.

1. Ketekunan Pengamatan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat. Peneliti melakukan pengamatan secara berkesinambungan untuk menemukan data sebanyak-banyaknya. Indikator ketekunan pengamatan yaitu cermat dan teliti. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2000: 177). Alasan dilakukannya ketekunan pengamatan adalah sebagai berikut.

- a. agar data penelitian lebih valid;
- b. untuk mencapai derajat kecermatan dalam penelitian;
- c. untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000: 178). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi dengan teori, yaitu dengan cara melakukan pengecekan menggunakan buku-buku wacana. Alasan dilakukannya triangulasi adalah sebagai berikut.

- a. agar data penelitian dapat dipercaya;
- b. agar tidak ada perbedaan temuan dalam penelitian.

Matrik 5. Triangulasi Teori

Teori	Hasil Penemuan	Baryadi	Derajat Kepercayaan
Kohesi Gramatikal	Kohesi gramatikal dalam wacana opini politik dapat dilihat dari pengacuan (referensi), penggantian (substitusi), pelesapan (elipsis), dan perangkaian (konjungsi).	Keterikatan gramatikal antara bagian-bagian wacana yang dapat dirinci menjadi referensi, substitusi, pelesapan, dan konjungsi.	√
Kohesi Leksikal	Kohesi leksikal dalam wacana opini politik dapat dilihat dari kemiripan (sinonimi), pertentangan (antonimi), hubungan atas bawah (hiponimi), pengulangan (repetisi), sanding kata (kolokasi), dan kesepadanan (ekuivalensi).	Keterikatan leksikal antara bagian-bagian wacana yang meliputi sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.	√

Berdasarkan hasil perbandingan antara hasil penemuan dengan teori yang dikemukakan oleh Baryadi yang terdapat dalam matrik di atas dapat disimpulkan keduanya relatif sama sehingga bersifat reliabel dan dapat dipercaya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang kohesi wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* yang telah dilakukan. Secara sistematis, laporan penelitian ini disajikan dalam dua bagian, yaitu (A) Hasil Penelitian dan (B) Pembahasan.

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa penanda kohesi gramatikal dan leksikal wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*. Hasil penelitian ini tentang kohesi gramatikal dalam wacana politik pada “rubrik opini” surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* dapat digambarkan seperti dalam tabel 1 berikut ini.

**Tabel 2. Kohesi Gramatikal dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini”
Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat***

No	Kohesi Gramatikal	Penanda Kohesi	Frekuensi
1.	Pengacuan Persona	PP1T	3
		PP1J	15
		PP3T	34
2.	Pengacuan Demonstratif	PDW	7
		PDT	106
3.	Pengacuan Komparatif	seperti itu, ibarat, sama seperti	26
4.	Substitusi	SF	9
		SK	1
		SD	19
5.	Elipsis	menyumbangkan, krisis	15

No	Kohesi Gramatikal	Penanda Kohesi	Frekuensi
6.	Konjungsi	KSA	28
		KPT	27
		KPK	1
		KKO	8
		KT	2
		KPN	89
		KPI	15
		KH	1
		KU	11
		KW	4
		KS	8
KC	7		
JUMLAH			436

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa penanda kohesi gramatikal terdiri dari pengacuan persona, pengacuan demonstratif, pengacuan komparatif, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Frekuensi terbanyak pada penanda kohesi gramatikal adalah konjungsi, yaitu sebanyak 201 dari total 436 frekuensi. Sementara itu, frekuensi paling sedikit adalah elipsis, yaitu sebanyak 15 dari total 436 frekuensi.

Hasil penelitian ini tentang kohesi leksikal dalam wacana politik pada “rubrik opini” surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* dapat digambarkan seperti dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 3. Kohesi Leksikal dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*

No	Kohesi Leksikal	Penanda Kohesi	Frekuensi
1	Sinonimi	SKK	20
		SFF	2
2	Antonimi	OK	9
		OM	2
		OR	3
3	Hiponimi	persoalan, desentralisasi, demokratisasi	8
4	Repetisi	REPZ	20
		RA	2
5	Kolokasi	Contoh: tenaga, jiwa, dan raga	31
6	Ekuivalensi	Contoh: kepemimpinan, pemimpin, pimpinan	9
JUMLAH			106

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa penanda kohesi leksikal terdiri dari sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Frekuensi terbanyak pada penanda kohesi leksikal adalah kolokasi, yaitu sebanyak 31 dari 106 frekuensi. Sementara itu, frekuensi paling sedikit adalah hiponimi, yaitu sebanyak 8 dari 106 frekuensi.

B. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, akan dibahas tentang penanda koheisi gramatikal yang terdiri atas referensi (pengacuan), penyulihan (substitusi), pelesapan (elipsis), dan perangkaian (konjungsi) sedangkan penanda koheisi leksikal terdiri atas sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.

1. Penanda Koheisi Gramatikal

a. Referensi (pengacuan)

Referensi atau pengacuan adalah salah satu jenis koheisi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mendahului atau mengikutinya (Sumarlam, 2004: 156). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* terdapat tiga jenis pengacuan, yaitu pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif.

1) Pengacuan Persona

Pengacuan persona dapat direalisasikan melalui pronomina persona (kata ganti orang), yang meliputi persona pertama, kedua, dan ketiga baik tunggal maupun jamak (Sumarlam, 2004: 157). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* ditemukan dua pronomina, yaitu pronomina persona pertama tunggal bentuk bebas dan pronomina persona ketiga tunggal bentuk terikat lekat kanan yang dapat dilihat pada data (01) berikut ini.

- (01) Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Tawaran yang dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946 itu disambut baik oleh pemerintah di Jakarta. Pemandahan ibukota ke Yogyakarta ini berhasil

membuat rada pemerintahan yang sebelumnya macet menjadi berjalan kembali. Tawaran Sultan HB IX ini mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Saat itu haya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan **daerahnya** menjadi pusat pemerintahan RI. Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani seperti itu. (04/65T/04/Jan/11)

Pada data (01) satuan lingual kata daerahnya merupakan pronomina persona ketiga tunggal bentuk terikat lekat kanan –nya juga merupakan pengacuan endoforis karena memiliki acuan yang berada di dalam teks.

2) Pengacuan demonstratif

Pengacuan demonstratif merupakan pengacuan kata ganti penunjuk. Pengacuan ini meliputi pronomina demonstratif waktu dan tempat (lokasional). Pronomina demonstratif waktu meliputi pronomina waktu kini, waktu lampau, waktu yang akan datang, dan waktu netral (Sumarlam, 2004: 157-158). Pengacuan pronomina demonstratif tempat, menunjuk secara eksplisit yaitu kota, dan demonstratif tempat dekat dan agak dekat (Sumarlam, 2004: 119). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* ditemukan dua pronomina, yaitu pronomina demonstratif waktu dan pronomina demonstratif tempat yang dapat dilihat pada data (02) dan (03) berikut ini.

- (01) **Kini**, setelah 65 tahun berdirinya Republik Jogja, heroisme, patriotisme, dan jiwa kemerdekaan rakyat Yogyakarta seperti apa yang dikatakan oleh presiden Soekarno sendiri mulai diragukan. RUUK yang disusun pemerintah pusat dan telah diserahkan kepada DPR tidak selaras dengan kenyataan sejarah, bahkan terkesan merendahkan peran dan posisi Sultan serta jiwa dan semangat nasionalisme rakyat Yogyakarta. Sikap pemerintah pusat yang bertentangan dengan peran dan jasa Sultan dan rakyat Yogyakarta ibarat air susu dibalas air tuba. Oleh karena itu tidak mengherankan jika rakyat Yogyakarta semakin memperkuat ikatan emosional secara sosial kultural dengan Keraton dan menggelegak jiwa kemerdekaannya. (12/65T/04/Jan/11).

- (02) Pemindahan ke **Yogyakarta** dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan Kereta Luar Biasa (KLB), karena jadwal perjalanannya dilakukan diluar jadwal yang ada. Setibanya para pemimpin di Yogyakarta, roda pemerintahan langsung digulirkan. Hal ini bisa dilakukan karena tata pemerintahan di **Yogyakarta** saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi. (05/ 65T/04/Jan/11).

Pada data (02) satuan lingual kata **kini** merupakan pronomina demonstratif waktu yang mengacu pada waktu kini atau waktu sekarang, karena tidak menunjuk pada waktu lampau, waktu yang akan datang, dan waktu netral. Lebih lanjut, satuan lingual kata **Yogyakarta** pada data (03) adalah pronomina demonstratif tempat secara eksplisit karena menunjukkan kota.

3) Pengacuan Komparatif

Pengacuan komparatif adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berfifat membandingkan dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam bentuk sikap, sifat, watak, perilaku, dan sebagainya (Sumarlam, 2004: 158). Penggunaan pengacuan komparatif pada wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* dapat dilihat pada data (04) berikut ini.

- (03) Negara RI yang masih bayi, baru lahir pada 17 agustus 1945, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus. **Sama seperti** bayi yang dirawat dalam ruang inkubator, RI waktu itu membutuhkan perlindungan khusus supaya dapat bertumbuh dan melewati masa-masa kritisnya. Untuk itu, Yogyakarta yang paling tepat menjadi inkubator bagi bayi RI. (58/API/10/Jan/11).

Satuan lingual kata **sama seperti** pada data (04) membandingkan Negara RI sama seperti bayi yang dirawat dalam ruang inkubator. Negara RI dianggap mempunyai watak dan perilaku sama seperti halnya bayi yang dirawat dalam ruang inkubator.

b. Penyulihan (substitusi)

Penyulihan atau substitusi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian satuan lingual tertentu (yang telah disebutkan) dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda (Sumarlam, 2004: 265). Pada wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* dapat dilihat pada data (05) berikut ini.

- (04) Keadaan di Yogya berbeda. **HB IX dan PA VII** memberi kesaksian tentang peran rakyat dalam kemerdekaan dan mengakui paham *Kedaulatan Rakyat* yang dikandung UUD 1945 (Amanat 30/10/1945). **Keduanya** menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dipegang pemerintah penjajah belanda (Gubernur dengan kantornya) dan Jepang (Kooti Zimukyoku Tyookan dengan kantornya) telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada Kami berdua. (29/SMK/06/Jan/11).

Tampak pada data (05), kata **keduanya** merupakan konstituen penyulih dari frasa yang sama, yaitu **HB IX dan PA VII**. Penyulihan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pengulangan bentuk-bentuk satuan lingual yang sama dalam sebuah wacana, sehingga dapat menghilangkan kemonotonan.

c. Pelesapan (elipsis)

Pelesapan (elipsis) merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satuan lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya (Sumarlam, 2004: 267). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* ditemukan pelesapan pada data (06) berikut ini.

- (06a) Dengan demikian DIY, pada satu sisi mentaati konsesus nasional dalam bidang hukum dan perundang-undangan, kebijakan luar negeri, dan pendanaan pembangunan. Di sisi lain Yogyakarta mengatur dirinya sendiri, berdasarkan hak atas kedaulatan

sebagai bekas kerajaan, oleh karena itu kepemimpinan dipegang langsung oleh Sultan dan Paku Alam yang sedang jumeneng. Kenyataannya DIY dalam banyak hal malah menjadi barometer tegaknya demokrasi. Perilaku demokratis justru banyak diteladankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX dalam menyelesaikan **persoalan** sosial, Ø politik, Ø keamanan, dan Ø budaya. Dari Yogyakarta, penerapan sistem demokrasi dibangun atas semboyan “Tahta untuk kesejahteraan rakyat”. (49/KYE/08/Jan/11).

Unsur yang dilesepkan pada data (06a) yaitu satuan lingual pada kata persoalan. Pelesapan pada data (06a) terjadi tiga kali. Dalam data (06a) pelesapan digunakan untuk efektivitas dan efisien dalam berbahasa. Jika dituliskan secara lengkap, bentuk wacana itu dapat dilihat pada data (06b) di bawah ini.

(06b) Dengan demikian DIY, pada satu sisi mentaati konsensus nasional dalam bidang hukum dan perundang-undangan, kebijakan luar negeri, dan pendanaan pembangunan. Di sisi lain Yogyakarta mengatur dirinya sendiri, berdasarkan hak atas kedaulatan sebagai bekas kerajaan, oleh karena itu kepemimpinan dipegang langsung oleh Sultan dan Paku Alam yang sedang jumeneng. Kenyataannya DIY dalam banyak hal malah menjadi barometer tegaknya demokrasi. Perilaku demokratis justru banyak diteladankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX dalam menyelesaikan **persoalan** sosial, **persoalan** politik, **persoalan** keamanan, dan **persoalan** budaya. Dari Yogyakarta, penerapan sistem demokrasi dibangun atas semboyan “Tahta untuk kesejahteraan rakyat”. (49/KYE/08/Jan/11).

d. Perangkaian (konjungsi)

Konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Perangkaian unsur dalam wacana mempunyai bermacam-macam makna. Adapun unsur yang dirangkaian dapat berupa satuan lingual kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan paragraf (Sumarlam dkk, 2004: 160).

Berikut pemakaian konjungsi sebagai alat kohesi gramatikal yang ditemukan dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar *Harian Kedaulatan Rakyat*.

1) Sebab-Akibat

Sebab dan akibat merupakan dua kondisi yang berhubungan. Hubungan sebab-akibat terjadi apabila salah satu proposisi menunjukkan penyebab terjadinya suatu kondisi tertentu yang merupakan akibat atau sebaliknya (Rani dkk, 2006: 122). Penanda konjungsi sebab-akibat ditemukan pada data (07) berikut ini.

(07) Keberantakan substansial demokrasi di negeri kita pun dengan sepenuh kebanggaan disahkan dengan materai kemajuan betapapun kedaluwarsa dan bahkan palsunya materai itu. Kedaluwarsa, **sebab** demokrasi selaku isu modernitas dengan ilmu sebagai penyangganya sudah lama bergerak menuruni lereng krisisnyanya. Dan sekaligus palsu, **sebab** demokrasi tanpa pengelolaan nilai-nilai dasarnya semisal transparansi, rasionalitas, jalan damai, kedewasaan warga negara dan hukum yang adil, bukanlah sejatinya demokrasi. (99/BKK/27/Jan/11).

Konjungsi sebab-akibat pada data (07) yaitu **sebab**. Satuan lingual kata **sebab** menunjukkan hubungan sebab-akibat. Proposisi demokrasi selaku isu modernitas dengan ilmu sebagai penyangganya sudah lama bergerak menuruni lereng krisisnyanya dan **demokrasi** tanpa pengelolaan nilai-nilai dasarnya semisal transparansi, rasionalitas, jalan damai, kedewasaan warga negara dan hukum yang adil, bukanlah sejatinya demokrasi menjadi konstituen sebab, sedangkan kata kedaluwarsa dan palsu sebagai akibat.

2) Pertentangan

Hubungan pertentangan terjadi apabila ada dua proposisi atau ide yang menunjukkan pertentangan atau kekontrasan. Untuk menyatakan hubungan pertentangan dapat digunakan kohesi konjungsi pertentangan (Rani dkk, 2006:120). Penggunaan konjungsi pertentangan dapat dilihat pada data (08) di bawah ini.

- (08) Empat tahun pasca gempa, Jogja diberi dua peristiwa yang tidak kalah mencekam, bahkan tidak hanya satu peristiwa, **tetapi** dua peristiwa yang hampir bersamaan. Peristiwa pertama adalah Erupsi Merapi yang masih berdampak, dan erupsi pembenturan monarki dengan demokrasi yang mengusik ketenangan kawula Ngayogyakarta. (78/MKP/20/Jan/11).

Konjungsi **tetapi** pada data (08) juga mengandung makna pertentangan, yaitu proposisi empat tahun pasca gempa, Jogja diberi dua peristiwa yang tidak kalah mencekam, bahkan tidak hanya satu peristiwa, dipertentangkan dengan proposisi dua peristiwa yang hampir bersamaan.

3) Konesif

Adakalanya penulis artikel opini politik memaparkan suatu kelemahan atau kekurangan yang terjadi diluar jalur pokok tema yang sedan dibicarakan. Pengakuan kelemahan tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan konjungsi konesif (Rani dkk, 2006: 126). Satuan lingual penanda konjungsi konesif yang ditemukan dalam penelitian ini berupa satuan lingual kata **meskipun**. Penggunaan konjungsi konesif dapat dilihat pada data (09) berikut ini.

- (09) Mengapa? Karena Yogya merupakan sebuah negara monarki (Nagari Ngayogyokarto Hadiningrat) yang kokoh yang sudah eksis jauh sebelum negara RI lahir. Para penjajah – Belanda, Jepang –

mengakui eksistensinya sehingga senantiasa harus membuat kontrak politik dengan Kasultanan Yogya. **Meskipun** setelah menyatakan berintegrasi dengan RI tidak lagi menjadi sebuah negara sendiri, Kasultanan Yogya memiliki kapasitas untuk melindungi Yogya secara politis dan ekonomi bahkan menggaji para pejabat dan pegawai RI. (59/API/10/Jan/11).

Pada data (09) ditemukan hubungan secara konsesif melalui konjungsi **meskipun**. Konjungsi **meskipun** mengandung hubungan konsesif, yaitu meskipun setelah menyatakan berintegrasi dengan RI tidak lagi menjadi sebuah negara sendiri, Kasultanan Yogya memiliki kapasitas untuk melindungi Yogya secara politis dan ekonomi bahkan menggaji para pejabat dan pegawai RI. Bentuk meskipun yang terdapat pada kalimat tersebut adalah penanda konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan antarkalimat.

4) Tujuan

Hubungan tujuan terjadi apabila proposisi yang satu menyatakan suatu tujuan dari apa yang disebut oleh proposisi sebelumnya. Satuan lingual penanda konjungsi tujuan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu satuan lingual agar. Penggunaan konjungsi tujuan dapat dilihat pada data (10) berikut ini.

- (10) Kompetensi Sultan HB IX dan PA VII juga berlandaskan amanat 30 September 1945 yang menunjukkan tetap menyatukan diri dengan RI, seperti tersebut dalam amanatnya yang intinya, sepakat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, **agar** jalannya pemerintahan daerah Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara RI. (42/KYE/08/Jan/11).

Konjungsi **agar** pada data (10) menunjukkan makna tujuan. Unsur tujuan pada data (10) terdapat pada kalimat agar jalannya pemerintahan daerah Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara RI.

5) Penambahan (*aditif*)

Pada waktu memberikan informasi, penulis opini terkadang tidak menyampaikan seluruh informasi dengan menggunakan satu kalimat saja. Dalam hal ini, penulis opini menyampaikan informasinya secara bertahap. Informasi yang disampaikan dengan menggunakan suatu kalimat perlu ditambah lagi. Informasi tambahan itu kadang-kadang tampak lepas dari informasi sebelumnya (Rani dkk, 2006: 118). Oleh karena itu, agar kalimat itu tampak berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, perlu digunakan konjungsi tambahan. Satuan lingual penanda konjungsi penambahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu **dan** pada data (11) berikut ini.

- (11) Dalam massa itu pula, terjadi beberapa peristiwa penting yang diprakarsai dari tokoh-tokoh di Yogyakarta. Di antaranya, adalah pengakuan *de facto* Kerajaan Belanda terhadap keberadaan RI dalam perjanjian Linggarjati, **dan** pengakuan *de jure* dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebelumnya, dunia internasional dikejutkan dengan Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta. (10/65T/04/Jan/11).

Untuk menghubungkan bagian yang memberikan informasi atau keterangan tambahan, pada data (11) digunakan konjungsi **dan**. Kalimat di antaranya, adalah pengakuan *de facto* Kerajaan Belanda terhadap keberadaan RI dalam perjanjian Linggarjati diberikan tambahan informasi pada kalimat selanjutnya, yaitu pengakuan *de jure* dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

6) Harapan (*optatif*)

Hubungan optatif terjadi apabila ada ide atau proposisi yang mengandung suatu harapan atau doa (Rani dkk, 2006: 123). Satuan lingual penanda konjungsi

harapan yaitu **mudah-mudahan**. Konjungsi harapan dapat dilihat pada data (12) berikut ini.

- (12) **Mudah-mudahan** DPR yang akan membahas RUUK tersebut dapat memahami substansi keistimewaan DIY. (13/65T/04/Jan/11).

Konjungsi mudah-mudahan pada data (12) menyatakan makna harapan.

Dalam data tersebut dapat diketahui, bahwasanya penulis mengharapkan DPR yang akan membahas RUUK tersebut dapat memahami substansi keistimewaan DIY.

7) Perlawanan

Hubungan perlawanan adalah hubungan yang menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam proposisi pertama berlawanan, atau tidak sama, dengan apa yang dinyatakan dalam proposisi selanjutnya. Penanda hubungan perlawanan adalah satuan lingual kata **sebaliknya**. Penggunaan konjungsi perlawanan dapat dilihat pada data (13) berikut ini.

- (13) Kalau terjadi persamaan persepsi dan kesepakatan politik antara pemerintah dan fraksi-fraksi yang tergabung dalam mitra koalisi, maka dapat dipastikan draft RUUK DIY yang diajukan pemerintah akan berjalan mulus, dan tarik ulur kepentingan antara pemerintah dengan keraton dan masyarakat Yogya dalam proses politik di DPR akan berakhir anti klimaks. Namun apapun hasil yang dicapai dalam proses politik di DPR, tetap akan meninggalkan luka sebagai hasil dari sebuah zero sum game politik. Pemerintah akan kehilangan muka apabila kalah dalam proses ini, **sebaliknya** keraton dan masyarakat Yogya akan lupa berkepanjangan apabila fraksi-fraksi di DPR berbalik arah dan mendukung draft pemerintah. Sebagai sebuah permainan, politik memang sukar ditebak, semuanya bisa berubah. Yang semula mendukung, bisa saja berbalik menentang. **Sebaliknya**, yang semula menentang, bisa saja berbalik mendukung. Namun keistimewaan Yogyakarta senyatanya bukanlah semata soal politik. Di dalamnya terkandung masalah moral, harga diri dan identitas kultural. (71/RDP/19/Jan/11).

Pada data (13) terdapat dua konjungsi perlawanan yang ditandai dengan satuan lingual kata **sebaliknya**. Disebutkan pada data (13) proposisi pemerintah akan kehilangan muka apabila kalah dalam proses ini diperlawankan dengan proposisi keraton dan masyarakat Yogya akan lupa berkepanjangan apabila fraksi-fraksi di DPR berbalik arah dan mendukung draft pemerintah, selanjutnya proposisi yang semula mendukung, bisa saja berbalik menentang diperlawankan dengan proposisi yang semula menentang, bisa saja berbalik mendukung.

8) Syarat

Hubungan syarat terjadi apabila proposisi yang satu menyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam proposisi sebelumnya. Satuan lingual penanda hubungan syarat adalah **jika**. Penggunaan konjungsi syarat dapat dilihat pada data (14) berikut ini.

- (14) Mencermati dasar hukum keistimewaan Yogyakarta, sudah jelas yakni ada pada kepala daerah (gubernur) dari keturunan Sultan, dan wakil kepala daerah (wagub) dari keturunan Puro Pakualaman. **Jika** ada pemahaman bahwa kepala daerah dan wakilnya bisa dari orang umum, maka keistimewaan Yogya akan hilang, karena provinsi DIY tidak ada bedanya dengan provinsi yang lain. (40/KYE/08/Jan/11).

Konjungsi **jika** pada data (14) menunjukkan hubungan syarat. Proposisi jika ada pemahaman bahwa kepala daerah dan wakilnya bisa dari orang umum, maka keistimewaan Yogya akan hilang, karena provinsi DIY tidak ada bedanya dengan provinsi yang lain menunjukkan hubungan syarat.

9) Parafrase

Penulis opini terkadang ingin memperjelas proposisi/ide yang disampaikannya dengan ungkapan lain yang dapat melengkapi dan

menyempurnakan proposisi/ide sebelumnya. Apabila proposisi/ide yang diungkapkan itu tidak berbeda dengan sebelumnya, biasanya digunakan piranti kohesi yang menunjukkan parafrase tersebut (Rani dkk, 2006: 115). Satuan lingual penanda hubungan parafrase yakni **dengan kata lain**. Penggunaan konjungsi parafrase dapat dilihat pada data (15) berikut ini.

- (15) Ketiga, adanya aksesibilitas publik terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, publik juga diharapkan mempunyai akses yang sama dengan pihak-pihak lain untuk memperebutkan kekuasaan sesuai dengan konsesus yang telah disepakati bersama. Di sinilah kekuasaan dimaknai sebagai dari, oleh dan untuk rakyat. Sebab setiap individu yang menamakan dirinya elemen rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang wajar. (46/KYE/08/Jan/11).

Tampak pada data (15) konjungsi **dengan kata lain** menunjukkan hubungan dua buah ide yang sama, yang diungkapkan dengan cara yang berbeda. Pada kalimat pertama mengandung ide bahwa ketiga, adanya aksesibilitas publik terhadap kekuasaan, kemudian ide yang sama disampaikan penulis dengan memparafrasekan pada kalimat selanjutnya, yaitu publik juga diharapkan mempunyai akses yang sama dengan pihak-pihak lain untuk memperebutkan kekuasaan sesuai dengan konsesus yang telah disepakati bersama. Dalam data tersebut dapat diketahui adanya persamaan ide pada kalimat pertama dan kedua, yaitu publik juga diharapkan mempunyai akses yang sama dengan pihak-pihak lain untuk memperebutkan kekuasaan. Melalui konjungsi **dengan kata lain**, hubungan kalimat pada data (15) menjadi lebih jelas.

10) Ketidakserasian

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, proposisi yang diurutkan tidak selalu menunjukkan keserasian. Proposisi yang diurutkan itu kadang

menunjukkan ketidakserasian (Rani dkk, 2006: 116). Dua proposisi yang tidak serasi biasanya diurutkan dengan menggunakan piranti ketidakserasian melalui satuan lingual **padahal**. Penggunaan konjungsi ketidakserasian dapat dilihat pada data (16) berikut ini.

- (16) Ide PWI Yogyakarta untuk membuat semacam konsensus jurnalisme benuansa keistimewaan yang bertumpu pada akar budaya Jawa, menarik diperbincangkan. Jurnalisme Istimewa Yogyakarta (JIY) lahir dari pergumulan adanya peliputan media yang tak elok, bahkan cenderung tak berbudaya, kala erupsi Merapi terjadi. **Padahal**, masyarakat Yogyakarta amat identik dengan lakon hidup yang bersandar pada falsafah hidup Jawa yang sarat nuansa spiritual, simbol dan mutiara-mutiara kebijakan. Logika dan filsafat media yang belakangan ini makin buas, liar, materialistik, tak lagi seiring sejalan dengan dasar-dasar filsafat Jawa maupun etika jurnalisme. Mungkinkah konsesus JIY mengawinkan konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa? Bagaimana membentuk basis konsep dan panduan implementatifnya? (62/DDI/12/Jan/11).

Pada data (16), konjungsi **padahal** merupakan piranti kohesi yang menunjukkan makna ketidakserasian. Satuan lingual **padahal** pada data (16) menunjukkan adanya ketidakserasian antara proposisi Jurnalisme Istimewa Yogyakarta (JIY) lahir dari pergumulan adanya peliputan media yang tak elok, bahkan cenderung tak berbudaya, kala erupsi Merapi terjadi dengan proposisi masyarakat Yogyakarta amat identik dengan lakon hidup yang bersandar pada falsafah hidup Jawa yang sarat nuansa spiritual, simbol dan mutiara-mutiara kebijakan.

11) Tegasan

Dalam menyampaikan gagasan, penuls opini sering menggunakan berbagai macam cara agar proposisi yang disampaikan itu segera dipahami oleh

pembaca. Salah satu cara yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan cara penegasan (Rani dkk, 2006: 126). Satuan lingual penanda konjungsi tegasan yaitu **bahkan**. Penggunaan konjungsi tegasan dapat dilihat pada data (17) berikut ini.

- (17) Pilkada untuk kabupaten dan kota secara langsung dapat diterapkan, mengingat status keistimewaan itu hanya melekat pada gubernur dan wakil gubernur. Rotasi kekuasaan di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan seperti pada provinsi lain, dan **bahkan** bisa dibilang berjalan lancar tanpa gejolak. (50/KYE/08/Jan/11).

Konjungsi **bahkan** yang terdapat pada data (17) menunjukkan hubungan tegasan, yaitu proposisi bahkan bisa dibilang berjalan lancar tanpa gejolak, menjadi proposisi penegas dari kalimat-kalimat yang diungkapkan sebelumnya. Proposisi yang mengikuti konjungsi bahkan pada data (17) digunakan sebagai piranti yang menyatakan penegasan yang menyangatkan. Dalam data tersebut, proposisi yang mengikuti mengandung arti yang lebih menguatkan.

2. Penanda Kohesi Leksikal

Telah diuraikan di atas bahwa selain aspek kohesi gramatikal, pada bagian ini akan dibahas pula mengenai aspek kohesi leksikal. Kohesi leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif (Mulyana, 2005: 29). Berdasarkan hasil analisis ditemukan beberapa aspek kohesi leksikal, yaitu sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.

a. Sinonimi

Sinonimi merupakan nama lain untuk benda atau hal yang sama yang berfungsi untuk hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual tertentu

dengan satuan lingual yang lain dalam wacana (Sumarlam, 2004: 190). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* ditemukan sinonimi pada data (18) berikut ini.

- (18) Demokrasi liberal mempunyai indikator yang tegas mengenai peralihan kekuasaan. Yakni, pertama, adanya rotasi kekuasaan. Kekuasaan tidak dimaknai sebagai suatu sistem yang permanen dan terus menerus melekat pada seseorang (pemimpin), tetapi dimaknai sebagai proses rekrutmen yang **sehat, jujur, dan bersih**. Dalam rekrutmen peralihan kekuasaan itu, setiap individu mempunyai hak untuk mengambil alih mandat kekuasaan secara elegan. (44/KYE/08/Jan/11).

Pada data (18) tersebut ditemukan sinonimi kata dengan kata. Pada data (18) satuan lingual kata **sehat** bersinonim dengan kata **jujur dan bersih** pada kalimat selanjutnya.

b. Antonimi

Antonimi disebut juga oposisi makna. Pengertian oposisi makna mencakup konsep yang betul-betul berkawanan sampai kepada yang hanya kontras makna saja (Sumarlam, 2004: 169). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* ditemukan antonimi pada data (19) berikut ini.

- (19) Hasil riset laboratorium politik universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentu membuat segenap wong Yogya berbesar hati. Data itu pun pasti sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat. Namun, sejauh mana penduduk Yogya yang pro keistimewaan dan pro penetapan memberi dukungan dengan pemahaman dan penghayatan yang mendalam? Dalam sebuah wawancara di televisi, peneliti dan pengamat politik dari CSIS J Kristiadi pernah menyindir kalau wong Yogya itu terkadang “*nggih nggih ora kepanggih*” (tidak jelas antara **ya dan tidak**, antara **setuju dan tidak setuju**). (89/PKK/27/Jan/11).

Pada data (19) terdapat oposisi relasional (kebalikan) dan oposisi inversi. Pada data (19) terdapat oposisi relasional antara kata **ya** dan **tidak**. Selanjutnya, terdapat juga oposisi inversi antara kata **setuju** dan **tidak setuju**.

c. Hiponimi

Hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas-bawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain (Keraf, 2004: 38). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* di temukan hiponimi pada data (20) berikut ini.

- (20) Bukan kebetulan Yogya berstatus daerah istimewa. Pada 19/8/1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan sembilan **provinsi**, di antaranya **Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat**, Jawa tengah tak mencakup Kooti Surakarta maupun Yogyakarta. Kooti dilanjutkan dan berhubungan langsung dengan Presiden RI. Bung Karno juga berkirim telgram bahwa HB IX dan PA VIII tetap dalam kedudukannya serta bertanggungjawab atas keselamatannya Yogya sebagai bagian RI. Tampaknya ‘Piagam Kedudukan’ ini dihasilkan setelah ‘Presiden Soekarno berbicara di ‘belakang layar’ dengan wakil-wakil Kooti, sesuai saran Otto Iskandar Dinata (Setneg, 1995: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, hlm. 470). (23/ AKY/05/Jan/11)

Pada data (20) terdapat hiponim yaitu provinsi sebagai hipernim dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagai hiponimnya.

d. Repetisi

Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk diberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Keraf, 2004: 127). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* ditemukan repetisi pada data (21) berikut ini.

- (21) Sebelumnya (15/7/1945), status kerajaan dibahas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dapat dimengerti. Wakil-wakil Yogyakarta dan Surakarta menjadi

anggota BPUPKI dan PPKI. **Anggota BPUPKI** Soepomo menguraikan konsep negara kesatuan yaitu tanpa ‘negara bawahan’ (onderstaat), hanya ada daerah-daerah pemerintahan dan bukan staat. (24/ AKY/05/Jan/11)

Pada data (21) kata **anggota BPUPKI** diulang dua kali. Kata yang diulang tersebut untuk menekankan pentingnya makna dalam konteks kutipan itu.

e. Kolokasi

Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan berdampingan. Kata-kata berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu (Sumarlan, 2004: 144). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* ditemukan kolokasi pada data (22) berikut ini.

(22) Kemudian penjelasan Pasal 122 UU Nomor 22/1999 bergeser. Isi keistimewaan Yogya adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan wagub dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat undang-undang ini. Pergeseran ini diakui oleh Pasal 226 UU Nomor 32/2004 di masa Presiden Megawati, meski MPR tahun 2000 mengharuskan **gubernur, bupati atau walikota** dipilih secara demokrasi (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945). (34/SMK/06/Jan/11)

Pada data (22) terdapat kolokasi pada kata **gubernur, bupati, atau walikota**. Kata **gubernur, bupati, atau walikota** menunjukkan kolokasi yang memiliki asosiasi tertentu yaitu para petinggi dipemerintahan.

f. Ekuivalensi

Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan lainnya dalam sebuah paradigma (Sumarlan, 2004: 145). Dalam wacana politik pada rubrik opini surat kabar Harian *Kedaulatan Rakyat* ditemukan ekuivalensi pada data (23) berikut ini.

- (23) Sistem pemerintahan asli dan **kepemimpinan** Sultan dan Paku Alam di Yogya – sebagai sebuah nagari yang eksis selama ratusan tahun – memberi motivasi bagi para **pemimpinan** RI untuk membangun organisasi barunya yang bernama republik itu. Itulah sebabnya Mr Ali Sastoamidjojo mengatakan bahwa dengan menjadikan Kota Mataram sebagai ibukota maka RI akan dapat melangsungkan lebih tepat dan cepat segala **pimpinan** dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahannya. (60/API10/Jan/11)

Pada data (23) terdapat kata-kata yang berasal dari kata dasar yang sama , yaitu **kepemimpinan**, **pemimpinan**, dan **pimpinan** dari dasar kata pimpin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penanda kohesi gramatikal terdiri atas pengacuan persona, pengacuan demonstratif, pengacuan komparatif, substitusi, ellipsis, dan konjungsi. Frekuensi terbanyak pada penanda kohesi gramatikal adalah konjungsi, yaitu sebanyak 201 dari total 436 frekuensi. Sementara itu, frekuensi paling sedikit adalah ellipsis, yaitu sebanyak 15 dari total 436 frekuensi.
2. Penanda kohesi leksikal terdiri atas sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Frekuensi terbanyak pada penanda kohesi leksikal adalah kolokasi yaitu sebanyak 31 dari 106 frekuensi. Sementara itu, frekuensi paling sedikit hiponimi, yaitu sebanyak 8 dari 106 frekuensi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam *Kedaulatan Rakyat* banyak ditemukan penanda kohesi yang sejenis yang selalu diulang-ulang di setiap wacana dalam surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* sehingga banyak data yang direduksi saat proses pengumpulan data berlangsung.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada analisis kohesi, tanpa mempertimbangkan keterkaitan makna di dalamnya.

C. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dapat diimplikasikan sebagai berikut ini.

1. Terdapatnya kohesi wacana politik pada “Rubrik Opini” di surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* dapat memberikan bukti bahwa penggunaan kohesi wacana tidak hanya sebatas penelitian pada media audio visual saja. Terbukti dengan adanya penelitian ini, kohesi wacana muncul pada media cetak surat kabar.
2. Kohesi wacana yang terdapat dalam penelitian ini menyebabkan munculnya berbagai penanda kohesi gramatikal dan penanda kohesi leksikal. Penanda kohesi gramatikal terdiri atas pengacuan persona, pengacuan demonstratif, pengacuan komparatif, substitusi, ellipsis, dan konjungsi. Penanda kohesi leksikal terdiri sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan, banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Maka dapat disarankan beberapa hal berikut ini.

1. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kohesi wacana politik pada “Rubrik Opini”, khususnya pada media surat kabar.

2. Bagi para peneliti, hendaknya dapat mengembangkan penelitian-penelitian di bidang linguistik, khususnya di bidang kajian wacana. Pengembangan tersebut dimaksudkan karena pada penelitian yang telah dilakukan ini, ditemukan adanya hambatan dan kesulitan, di antaranya kesulitan dalam menganalisis kohesi wacana politik pada “Rubrik Opini”. Kesulitan tersebut disebabkan oleh kurangnya teori kohesi wacana dan hal itu menjadi penghambat dalam melakukan analisis dan pembahasan. Dengan demikian, hanya dikaji kohesi wacana politik pada “Rubrik Opini” sebagai bahan analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Baryadi, Praptomo. 2002. *Dasar-Dasar Analisis Wacana Dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli.
- Brown, Gillian dan George Yule. 1996. *Analisis Wacana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djajasudarma, Fatimah. 2006. *Metode Lingistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Keraf, Gorys. 2004. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahsun. 2007. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Olii, Helena. 2007. *Opini Publik*. Jakarta: PT Indeks.
- Rani, Abdul , Bustanul Arifin, dan Martutik. 2006. *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik Bagian Pertama: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1988. *Metode Linguistik Bagian Kedua: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2001. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana Univesity Press.
- Sumarlam, Agnes Adhani, A. Indratmo. 2004. *Analisis Wacana*. Bandung: Pakar Raya.
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengacuan Persona dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*

No.	Nomor Kartu Data	Data	Penanda Kohesi						
			PP1T	PP1J	PP2T	PP2J	PP3T	PP3J	
1	04/65T/04/Jan/11	Saat itu harya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat pemerintahan RI. Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani seperti itu.						√	
2	05/65T/04/Jan/11	Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan Kereta Luar Biasa (KLB), karena jadwal perjalanannya dilakukan di luar jadwal yang ada.							√
3	09/65T/04/Jan/11	Pada periode ini pula Yogyakarta dengan jiwa kemerdekaannya memegang peran penting dalam mempertahankan kelangsungan RI.							√
4	11/65T/04/Jan/11	Selain itu diakui sendiri oleh Presiden Soekarno (pemerintah pusat) dalam kesannya , keberhasilan Republik Jogja dalam mempertahankan RI tak lepas dari jiwa kemerdekaan rakyat Yogyakarta.							√
5	14/AKY/05/Jan/11	Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII mengintegrasikan kerajaannya sebagai daerah istimewa di dalam Republik Indonesia (5/91945).							√
6	15/AKY/05/Jan/11	Namun urusan keistimewaannya tergerus di zaman sentralisasi berdasarkan Penpres Nomor 6/1959, UU Nomor 18/1965, UU Nomor 5/1974 dan UU Nomor 5/1979.							√
7	18/AKY/05/Jan/11	Selain berintegrasi dengan Indonesia, HB IX dan PA VIII juga menyiapkan kerajaannya jadi ‘suaka’ para pemimpin Indonesia.							√
8	29/SMK/06/Jan/11	Keduanya menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dipegang pemerintah penjajah Belanda (Gubernur dengan kantornya) dan Jepang (Kooti Zimukyoku Tyookan dengan kantornya) ‘telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada Kami berdua’.		√					√
9	31/SMK/06/Jan/11	Keduanya mengakui dan menetapkan BP KNID sebagai lembaga perwakilan rakyat yang akan membuat undnag-undang dan menentukan arah penyelenggaraan pemerintah di Yogy sesuai aspirasi rakyat (Amanat 30/10/1945). Setelah Yogy mnjadi ibu kota RI masa perang (Januari 1946-Desember 1949), HB IX dan PA VIII melanjutkan ‘demokratisasi’. Dengan persetujuan BP KNID keduanya menerbitkan aturan pembentukan DPRD provinsi, kota, kabupaten dan kalurahan di							√

10	30/SMK/06/Jan/11									√
11	32/SMK/06/Jan/11									√
12	33/SMK/06/Jan/11									√
13	38/SMK/06/Jan/11									√
14	42/KYE/08/Jan/11									√
15	45/KYE/08/Jan/11									√
16	48/KYE/08/Jan/11							√		√

Yogya (Maklumat tanggal 18/05/1946).

Kepada 'segenap penduduk dari segala bangsa' di Yogya **keduanya** menyatakan, menyelaraskan penyelenggaraan pemerintah di Yogya dengan konstitusi.

Metamorfosis Negari Ngajogyakarta mengakibatkan pemerintah DIY bekerja dengan **perangkatnya** sendiri, **meski** jabatan gubernur-wagub Provinsi DIY jadi privilese HB IX dan PA VIII.

Pasal 91b UU Pemda 1974 bahkan menyatakan, **keduanya** tidak terikat pada syarat dan tata cara pengisian gubernur/wagub yang berlaku di daerah lain.

HB IX dan PA VIII telah menggulirkan transformasi bagi **kerajaannya** dan bersama masyarakat Yogya mengarungi gelombang besar keindonesiaan.

Kompetensi Sultan HB IX dan PA VIII juga berlandaskan amanat 30 September 1945 yang menunjukkan tetap menyatukan diri dengan RI, seperti tersebut dalam **amanatnya** yang **intinya**, sepakat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, agar jalannya pemerintah daerah Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara RI.

Kekuasaannya seolah-olah dirinya adalah kehendak dan kemauan masyarakat, atas nama masyarakat, sehingga mudah terjebak pada pola-pola penanganan secara pragmatis tanpa dibarengi observasi yang mendalam.

Mari **kita** telaah secara jernih, sejak bergabung menyatukan diri dengan NKRI kepemimpinan di wilayah DIY langsung dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah dan Sri Paku Alam VII sebagai Wakil Kepala Daerah sampai akhir hayatnya. Selanjutnya pada pemilihan kepala daerah berikutnya yang menghasilkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai kepala daerah dan Sri Paku Alam IX sebagai wakil sudah menggunakan UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 122 UU 22 Tahun 1999 menyebutkan, pengakuan keistimewaan DIY, didasarkan pada asal usul dan **perannya** sejarah perjuangan bangsa. **Keistimewannya** adalah pengangkatan kepala daerah (gubernur) dengan mempertimbangkan

17	51/KYE/08/Jan/11	calon dari keturunan Sultan dan wagub dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat dengan UU ini. Perubahan besar yang didorong oleh (force of change), yaitu krisis ekonomi, demokratisasi, desentralisasi dan tuntutan akan transparansi dan pertanggungjawaban telah melahirkan UU No 32/2004, No. 33/2004 dan No 25/2004 bertujuan memberikan peran yang lebih besar pada pemerintahan daerah dan masyarakat untuk membangun daerahnya .						√	
18	54/API10/Jan/11	Hal-hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastramidjojo di depan corong RRI Yogya pada 4 Februari 1946 malam. Berikut adalah cuplikan pidatonya itu (diambil dari buku 'Republik Indonesia : Daerah Istimewa Jogjakarta', Penerbit Kementerian Penerangan, 1953).						√	
19	55/API10/Jan/11	"Sebelum kami menyiarkan beberapa pengumuman resmi, maka lebih dahulu kami menyampaikan salam nasional kita . Merdeka! Saudara-saudara, pertama kami atas nama Pemerintah mengumumkan dengan resmi bahwa mulai pagi ini tanggal 4 Februari 1946 sebagian dari Pemerintah Agung buat sementara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dari sebab itu mulai hari ini Presiden kita Bung Karno dan Wakil Presiden Bung Hatta buat sementara waktu berkedudukan di kota Mataram"						√	
20	56/API10/Jan/11	"Berhubung dengan pemindahan sebagian dari Pemerintahan Agung ke Yogyakarta ini perlu agaknya diterangkan di sini, bahwa hal itu tidak usah menggoncangkan hati kita .						√	
21	57/API10/Jan/11	Alasan itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita , bahkan dari renovasi rakyat Indonesia pada masa ini.						√	
22	59/API10/Jan/11	Para penjajah – Belanda, Jepang – mengakui eksistensinya sehingga senantiasanya harus membuat kontrak politik dengan Kasultanan Yogya.						√	
23	64/DDI/12/Jan/11	Namun, berangkat dari realitas dan kompleksitas itu, kita perlu mencari strategi penyusunan konsep yang lengkap, cepat dan akurat, tanpa meninggalkan kualitas. Menurut saya , buku panduan ini sebisa mungkin simpel dalam format, kuat dalam isi konsep dan liat dalam praktikal.						√	
24	67/DDI/12/Jan/11	Pada titik ini, kita perlu mencari dan menemukan nilai-nilai budaya Jawa yang seirama dan senapas dengan konsep jurnalisme yang bertumpu pada fakta, kebenaran dan pro pada yang lain, kata Ashadi						√	

25	74/RDP/19/Jan/11	Siregar, bukan pada gosip dan <i>ngrasani</i> . Raja akhirnya sama dengan pribadi lain yang mungkin terjebak dalam permainan politik yang dapat menurunkan <u>wibawanya</u> dan menjatuhkan <u>derajatnya</u> sebagai seorang raja.						√	
26	75/RDP/19/Jan/11	Kesetiaan masyarakat Yoga pada Sultan dan Paku Alam bukan semata pada <u>kedudukannya</u> sebagai raja di Kesultanan dan Paku Alaman. Oleh karenanya memisahkan Sultan dan Paku Alam dari <u>jabatannya</u> sebagai raja dan mengatur pemerintahan, sama artinya “mengandangkan” Sultan dan Paku Alam dalam sangkar emas “kekuasaan simbolik” tanpa kewenangan pengaturan pemerintah yang riil yang bersentuhan langsung dengan <u>rakyatnya</u> . Masyarakat akan kehilangan interaksi dengan simbol dan identitas <u>kulturalnya</u> .						√	
27	77/MKP/20/Jan/11	Dalam 5 tahun terakhir <u>kita</u> digoncang dengan berbagai peristiwa. <u>Kita</u> masih ingat tahun 2006 masyarakat Bantul DIY mengalami peristiwa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan. Dengan kearifan <u>lokalnya</u> masyarakat Bantul bangkit pasca gempa 2006.					√		
28	79/MKP/20/Jan/11	Erupsi Merapi mengantar <u>kita</u> menuju kesadaran baru bagaimana memahami bahasa Merapi seraf mungkin, dan Erupsi Monarki mengantar kita sejenak kembali mendalami arti keistimewaan Yogyakarta. Bagaimana <u>kita</u> dapat menjalani transformasi sehingga mampu melampaui kondisi dan posisi sebelum terjadi peristiwa erupsi. Kedua peristiwa itu sungguh mahal <u>harganya</u> . <u>Rasanya</u> terlalu mahal jika <u>kita</u> hanya ingin sekedar kembali sama ke titik semula. Bukan seperti keledai yang lebai. <u>Kita</u> bisa menjadi transformer-transformer yang mampu melihat visi kedepan untuk lebih mendekatkan pada cita-cita hidup bersama. <u>Kita</u> mempunyai sumber daya batin yang memungkinkan terjadinya lompatan yang melampaui titik semula. Sumber daya batin itu berupa keyakinan (belief) yang kuat. Keyakinan akan adanya kesejahteraan yang lahir dari pemahaman hakikat “Manunggaling Kawula Gusti”, “Memayu Hayuning Bawana” serta “Tahta untuk Rakyat”, berikut <u>aktualisasinya</u> dalam konteks kekinian.					√		
29	80/MKP/20/Jan/11	Hal itu dapat <u>kita</u> baca dalam “Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan” tanggal 5 September 1945 sbb :					√		

30	83/MKP/20/Jan/11	Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan : Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifar kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia Dst.							
		Pada Pisowanan Agung hari Rabu Kliwon 18 April 2007 Sri Sultan Hamengku Buwono X bersabda menyatakan : 1. Saya berjanji pada orang tua saya tidak boleh punya ambisi apapun kecuali mensejahterakan Rakyat. Janji saya ini, insya Allah, saya pegang sampai mati. 2. Dengan kejujuran dan keikhlasan saya ingin mengabdikan Bangsa karena bangsa saya menghadapi banyak persoalan yang perlu diselesaikan. 3. Dari Yogyakarta ini kita bangun Indonesia Baru dengan peradapan baru. 4. Saya akan tultarkan kemajemukan Jogja, yang tidak mempersoalkan agama apapun, karena di Jogja agama apapun tidak bisa memaksakan kehendak agama lain.	√						
31	85/MKP/20/Jan/11	Keraton dalam realitasnya bisa inklusif lebih adaptif & aspiratif.							√
32	86/MKP/20/Jan/11	Jadi keistimewaan adalah wujud tekad bersama antara Kerajaan Ngayogyakarta dan Negara Republik Indonesia untuk membangun kehidupan bersama, melalui pengakuan dan penghormatan atas kedudukannya masing-masing. Maka segenap kawula Jogja dapat berseru, “ aku kawula Ngayogyakarta yang berbangsa Indonesia” .	√						√
33	92/PKK/27/Jan/11	Mumpung ingatan kolektif tentang sejarah keistimewaan Yogya masih kuat, marilah kita tegakkan kebenaran tersebut.						√	
34	96/BKK/27/Jan/11	Gubernur, bupati, walikota, ketua RT atau presiden sekalipun belum otomatis pemimpin jika mereka hanya mengandalkan sandaran kepejabatatan melalui mayoritas hasil suatu coblosan.							√
35	98/BKK/27/Jan/11	Demokrasi di negeri kita dalam sejumlah reformasi adalah pabrik pengolah <i>the wrong men in the right place</i> dimana capaian-capaian kekuasaan ditempuh melalui mekanisme anti-demokrasi. Tirani “Duwitologi” dan represi figur tunggal penentu sebuah partai runyam mengendali pendidikan politik untuk mencapai keandalan masyarakat sipil. Partai, dengan begitu juga demokrasi, sebagai sarana dan wahana demokratisasi adalah nonsense. Partai hanyalah dominan menjadi alat memburu nafkah dan memperkaya diri, menebar pesona sekaligus dimana mungkin sebagai katrol neofeodalisme dimana “gembel”						√	

36	99/BKK/27/Jan/11	merajakan diri sedangkan raja sendiri merakytatkan dirinya . Keberantakan substansial demokrasi di negeri kita pun dengan sepenuh kebanggaan disahkan dengan materai kemajuan betapapun kedaluwarsa dan bahkan palsunya materai itu.	✓				
37	100/BKK/27/Jan/11	Dewasa ini masih cukup banyak orang memuja-puji apa yang di dalam karung itu sambil beriktihar menyingkap karungnya sampai datang saat tatkala para pemimpin lintas agama melontarkan konstataasi kebohongan publik.	✓				
38	103/BKK/27/Jan/11	Dalam workshop RUUK DIY 19 Januari lalu di Jakarta yang difasilitasi oleh Aliansi Bhinneka Tunggal Ika dan Jaringan Indonesia (JIRA) yang dihadiri secara nasional dengan lima profesor dan seorang mantan diplomat senior, diakui bahwa masalah Yogyakarta yang hendak ditorpedo keistimewaannya – melalui RUUK versi pemerintah – secara hakiki merupakan manifestasi dari usaha mentorpedo Indonesia.	✓				
39	104/BKK/27/Jan/11	Mereka – boleh jadi – telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas Yogyakarta sesungguhnya lebih melucuti Yogyakarta dari nada keindonesiaannya .	✓				
40	114/SKY/29/Jan/11	Pada sisi politik, apabila kita mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin meredukasi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di Yogyakarta. Sedangkan pada sisi budaya, pemerintah hanya menganggap Yogyakarta sebatas sebagai provinsi yang sama dengan propinsi lain. Keistimewaan Yogyakarta dianggap hanya sekadar warisan sejarah dan budaya pada masa dinasti Sultan Hamengku Buwono IX saja. Di tengah-tengah euforia demokrasi dan pemilihan langsung, suara rakyat sudah tidak lagi menjadi bagian dari esensi demokrasi. Kepentingan penguasa lebih utama dari pada mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY tampaknya sudah mendekati pemerintahan bertangan besi dan ber-rejim pemilihan.	✓				
41	115/SKY/29/Jan/11	Apabila kita cermati bahwa ada sisi lain yang menarik yang dapat menunjukkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang lebih humanis. Hal itu terbukti dari predikat Yogyakarta yang mampu mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan kalangan	✓				

		<p>masyarakat banyak. Sisi kebhinekaan Yogyakarta pun terbukti dengan berdirinya berbagai asrama daerah dari Sabang sampai Merauke dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 33 asrama daerah yang dibangun di tanah Yogyakarta. Daerah mana yang ada di Indonesia memiliki asrama daerah yang beragam seperti di Yogyakarta. Sisi lain yang menarik adalah berbagai jenis plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia hanya Yogyakarta yang memiliki keanekaragamannya. Apabila mengamati plat nomor kendaraan kita dapat melihat ada berbagai macam ragamnya seperti BG, G, AB, L, R, B, AG, M, S, dll. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah kota istimewa, banyak mahasiswa dan pelajar membawa kendaraan dari daerah asal mereka dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta karena kecintaan mereka terhadap kota Yogyakarta.</p>				
42	116/SKY/29/Jan/11	<p>Dalam hal ini, pemerintah sudah kalah karena dasar yuridis konstitusional dan historis sangat lemah untuk menunjukkan kepentingannya melakukan demokratisasi dengan cara pemaksaan. Mereka hidup tidak untuk sekali dalam lima tahun dan pada saat pemilu tetapi mereka memerhatikan perhatian dan jaminan dari pemerintah akan keberlangsungan kehidupannya.</p>			√	
43	120/SKY/29/Jan/11				√	
		JUMLAH	3	15	-	34
			-	-	-	-

Lampiran 2. Pengacuan Demonstratif dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

No.	Nomor Kartu Data	Data	Penanda Kohesi	
			PDW	PDT
1	01/65T/04/Jan/11	Tanggal 4 Januari 2011 <u>ini</u> genap 65 tahun berdirinya Republik Jogja. Kebetulan tahun <u>ini</u> akan dibahas Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang kontroversi dan menegangkan lantaran sikap pemerintah yang tercermin dalam RUUK tersebut dinilai kurang memahami peran dan posisi Sultan serta jiwa kemerdekaan masyarakat Yogyakarta.		√
2	02/65T/04/Jan/11	Republik Jogja adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut periode ketika kedudukan ibukota Republik Indonesia berada di <u>Yogyakarta</u> , yaitu antara tanggal 4 Januari 1946 sampai tanggal 27 Desember 1949. Selama tiga tahun Keraton <u>Yogyakarta</u> dan <u>Puro Pakualaman</u> menjadi tulang punggung yang menopang jalannya pemerintahan dan kelanjutan perjuangan RI.		√
3	03/65T/04/Jan/11	Berpindahnya ibukota RI pada saat itu dipicu situasi <u>Jakarta</u> yang tidak kondusif untuk menjadi pusat pemerintahan. Saat itu, pasukan Sekutu mulai mendarat, sedangkan tentara Jepang belum pergi.		√
4	04/65T/04/Jan/11	Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ibukota RI berpindah ke <u>Yogyakarta</u> . Tawaran yang dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946 <u>itu</u> disambut baik oleh pemerintah di <u>Jakarta</u> . Pemandahan ibukota ke <u>Yogyakarta ini</u> berhasil membuat rada pemerintahan yang sebelumnya macet menjadi berjalan kembali. Tawaran Sultan HB IX <u>ini</u> mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya.		√
5	05/65T/04/Jan/11	Pemindahan ke <u>Yogyakarta</u> dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan Kereta Luar Biasa (KLB), karena jadwal perjalanannya dilakukan di luar jadwal yang ada. Setibanya para pemimpin di <u>Yogyakarta</u> , roda pemerintah langsung digulirkan. Hal <u>ini</u> bisa dilakukan karena tata pemerintahan di <u>Yogyakarta</u> saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi.		√
6	06/65T/04/Jan/11	Keraton juga menanggung biaya para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Keuangan RI dalam kondisi sangat buruk. Untuk pembiayaan <u>ini</u> , jumlah yang dikeluarkan oleh Keraton diperkirakan mencapai jutaan gulden. Hal <u>ini</u> juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, makanan dan harta benda.		√
7	07/65T/04/Jan/11	Sumbangsih Keraton <u>Yogyakarta</u> terhadap RI tidak hanya melalui peran aktif Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Negara dan Menteri Pertahanan, namun juga bantuan materi secara langsung dari Keraton dan Puro Pakualaman.		√

8	08/65T/04/Jan/11	Oleh karena itu Keraton Yogyakarta memberikan berbagai peralatan secara lengkap. Tidak hanya itu .		√
9	09/65T/04/Jan/11	Pada periode ini pula Yogyakarta dengan jiwa kemerdekaannya memegang peran penting dalam mempertahankan kelangsungan RI.		√
10	10/65T/04/Jan/11	Dalam masa itu pula, terjadi beberapa peristiwa penting yang diprakarsai dari tokoh-tokoh di Yogyakarta . Di antaranya, adalah pengakuan defacto Kerajaan Belanda terhadap keberadaan RI dalam Perjanjian Linggarjati, dan pengakuan <i>dejure</i> dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebelumnya, dunia internasional dikejutkan dengan Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta .		√
11	11/65T/04/Jan/11	Selain itu diakui sendiri oleh Presiden Soekarno (pemerintah pusat) dalam kesannya, keberhasilan Republik Jogja dalam mempertahankan RI tak lepas dari jiwa kemerdekaan rakyat Yogyakarta. Kesan itu ditulis sendiri oleh Presiden Soekarno saat meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta pada tanggal 28 Desember 1949.		√
12	12/65T/04/Jan/11	Kini , setelah 65 tahun berdirinya Republik Jogja, heroisme, patriotisme, dan jiwa kemerdekaan rakyat Yogyakarta seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno sendiri mulai diragukan. RUUK yang disusun pemerintah pusat dan telah diserahkan kepada DPR tidak selaras dengan kenyataan sejarah, bahkan terkesan merendahkan peran dan posisi Sultan serta jiwa dan semangat nasionalisme rakyat Yogyakarta . Sikap pemerintah pusat yang bertentangan dengan peran dan jasa Sultan dan rakyat Yogyakarta ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Oleh karena itu tidak mengherankan jika rakyat Yogyakarta semakin memperkuat ikatan emosional secara sosial kultural dengan Keraton dan menggelak jiwa kemerdekaannya.	√	√
13	16/AKY/05/Jan/11	Jakarta 4 Januari 1946. Rangkaian kereta api jadwal khusus disiapkan di Stasiun Manggarai , dekat rumah Presiden Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Bung Karno dan Ibu Fatmawati serta Wakil Presiden Hatta dan Ibu Rahmi Hatta bergegas naik kereta api, menjinjing kopor berisi pakaian seadanya. Tujuan : Yogyakarta . Mengapa mereka meninggalkan tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia.		√
14	17/ AKY/05/Jan/11	Sejarah menjawab. RI baru berusia empat bulan namun terancam kembali dikuasai Belanda yang memboncong Sekutu. Medan dan Palembang jatuh ke tangan pasukan Sekutu. Bendera Belanda kembali berkibar di Jakarta pada Oktober 1945, setelah ribuan pejuang terbunuh. Semarang, Surabaya juga dikuasai tentara Sekutu.		√
15	18/AKY/05/Jan/11	Selain berintegrasi dengan Indonesia, HB IX dan PA VIII juga menyiapkan kerajaannya jadi 'suaka' para pemimpin Indonesia. HB IX menyambut kedatangan Soekarno-Hatta di Stasiun Tugu .		√

16	19/AKY/05/Jan/11	Meski Yogya berhasil dikuasai tentara Belanda (agresi 19/12/1948) dan Soekarno-Hatta akhirnya ditawan dan diasingkan, tetapi mandat Pemerintah Darurat RI dipegang Sjafoedin Prawira negara di Bukit Tinggi (Sumbar) , sedangkan diplomasi politik dan taktik perang gerilya (1948-1949) dari Yogya membuahkan hasil.	✓
17	22/ AKY/05/Jan/11	Negari Ngayogyakarta adalah suatu pemerintah tahan daerah swapraja, yang diatur Zelfbestuuregelen 1933 pada masa Hindia Belanda dan ditetapkan sebagai Kooti oleh penguasa militer Jepang . HB IX memiliki persoalan sendiri, misalnya harus menandatangani Perjanjian 1940 dengan Belanda yang membuatnya hampir tentara oleh penguasa militer Jepang .	✓
18	23/ AKY/05/Jan/11	Bukan kebetulan Yogya berstatus daerah istimewa. Pada 19/8/1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan sembilan provinsi, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jawa tengah tak mencakup Kooti Surakarta maupun Yogyakarta .	✓
19	24/ AKY/05/Jan/11	Sebelumnya (15/7/1945), status kerajaan dibahas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dapat dimengerti. Wakil-wakil Yogyakarta dan Surakarta menjadi anggota BPUPKI dan PPKI.	✓
20	25/AKY/05/Jan/11	Bentuk pemerintahan di daerah akan diatur undang-undang dengan mengakui kerajaan Sultanaat atau Kooti di Jawa dan luar Jawa, maupun daerah kecil bersusunan asli seperti desa, marga, nagari, huta/kuria atau gampong (Setneg, 1995:271-272).	✓
21	26/ AKY/05/Jan/11	Negari Ngayogyakarta berubah status menjadi daerah istimewa dalam UUD 1945 tetapi bukan staat, dan harus memperhatikan dasar permusyawaratan.	✓
22	27/SMK/05/Jan/11	Keadaan sosial-politik di Yogyakarta dan surakarta berubah cepat pada awal kemerdekaan Indonesia. Antara Oktober 1945 hingga Juni 1945 di Surakarta bergulir gerakan anti-swapraja untuk menghapus keistimewaan/kerajaan.	✓
23	28/SMK/06/Jan/11	Dalam konteks ini Presiden Soekarno mencabut status keistimewaan Surakarta (16/6/1946). Presiden di Yogya langsung memegang pemerintahan setelah Perdana Menteri Syahrir diculik di Surakarta pada akhir Juni 1946 (kabinet parlementer terbentuk sejak November 1945).	✓
24	29/SMK/06/Jan/11	Keadaan di Yogya berbeda. HB IX dan PA VIII memberi kesaksian tentang peran rakyat dalam kemerdekaan dan mengakui paham <i>Kedaulatan Rakyat</i> yang dikandung UUD 1945 (Amanat 30/10/1945). Keduanya menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dipegang pemerintah penjajah Belanda (Gubernur dengan kantornya) dan Jepang (Kooti Zimukyoku Tyoookan dengan kantornya) ‘telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada Kami berdua’.	✓
25	30/SMK/06/Jan/11	PPKI memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia di daerah-daerah (19/8/1945). HB IX dan PA VIII selanjutnya menyatakan, KNID di Yogya telah membentuk Badan pekerja	✓

		yang dipilih dari para anggotanya (19/10/1945). Lembaga baru ini bertugas sebagai badan legislatif yang turut menentukan haluan pemerintah daerah di masa perang. Kepada ‘segenap penduduk dari segala bangsa’ di <u>Yogya</u> keduanya menyatakan, menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintah di <u>Yogya</u> dengan konstitusi. Negeri <u>Ngajogjakarta</u> bermetamorfosis sebagai monarki konstitusional.		
26	31/SMK/06/Jan/11	Keduanya mengakui dan menetapkan BP KNID sebagai lembaga perwakilan rakyat yang akan membuat undnag-undang dan menentukan arah penyelenggaraan pemerintah di <u>Yogya</u> sesuai aspirasi rakyat (Amanat 30/10/1945). Setelah <u>Yogya</u> mnjadi ibu kota RI masa perang (Januari 1946-Desember 1949), HB IX dan PA VIII melanjutkan ‘demokratisasi’. Dengan persetujuan BP KNID keduanya menerbitkan aturan pembentukan DPRD provinsi, kota, kabupaten dan kalurahan di <u>Yogya</u> (Maklumat tanggal 18/05/1946). Pada bulan Juli 1951 rakyat <u>Yogya</u> melaksanakan pemilihan umum anggota DPRD, sebelum pemilu nasional 1955.		√
27	32/SMK/06/Jan/11	Secara bertahap sejak 1945, hampir seluruh wilayah Negeri <u>Ngajogjakarta</u> berada dalam sistem pemerintah di bawah konstitusi dan legislasi yang berlaku. Tersisalah ‘monarki kultural’ di <u>Kasultanan dan Pakualaman</u> . HB dan PA masing-masing sebagai ‘Kepala Kraton’ (Hoofd van het Huis) seperti raja lain di seluruh Indonesia. Metamorfosis Negeri <u>Ngajogjakarta</u> mengakibatkan pemerintah DIY bekerja dengan perangkatnya sendiri, meski jabatan gubernur-wagub Provinsi DIY jadi privilese HB IX dan PA VIII.		√
28	33/SMK/06/Jan/11	Tak heran bahwa Negeri <u>Ngajogjakarta</u> ditetapkan sebagai daerah istimewa setingkat provinsi (UU Nomor 3/1950); kedudukan kepala daerah melekat pada HB IX dan wakil kepala daerah pada PA VIII.		√
29	34/SMK/06/Jan/11	Kemudian penjelasan Pasal 122 UU Nomor 22/1999 bergeser. Isi keistimewaan <u>Yogya</u> adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan <u>Yogjakarta</u> dan wagub dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat undang-undang <u>ini</u> . Pergeseran <u>ini</u> diakui oleh Pasal 226 UU Nomor 32/2004 di masa Presiden Megawati, meski MPR tahun 2000 mengharuskan gubernur, bupati atau walikota dipilih secara demokrasi (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945).		√
30	36/SMK/06/Jan/11	Saat konfigurasi serupa terjadi di tiga kabupaten (<u>Gunungkidul</u> , <u>Sleman</u> , <u>Kulonprogo</u>) dan Kota <u>Yogya</u> maka Partai Demokrat tak dapat mengendalikan kalaborasi ‘parpol koalisi dan oposisi’ di DIY.		√
31	37/SMK/06/Jan/11	Transformasi <u>Yogya</u> selama 65 tahun mungkin sudah melahirkan 30-an persen warga <u>Yogya</u> yang tak menghendaki gubernur-wagub dijabat keturunan HB IX dan PA VIII. Kemungkinan lain, sejak massa tumpah-ruah dalam Pisowanan Ageng di <u>Alun-alun Utara</u> pada bulan Mei		√

		1998, sudah 70-an persen warga Yogya menghendaki HB X dan PA IX ditetapkan sebagai gubernur-wagub.		
32	38/SMK/06/Jan/11	Namun tinta sejarah belum kering untuk menuturkan masa depan Yogya dalam konstitusionalisme Indonesia.		✓
33	39/KYE/08/Jan/11	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman , baik secara de jure maupun de facto telah memiliki pemerintahan yang teratur dengan pembagian wilayah yang bersifat administratif sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 5 September mengeluarkan maklumat bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam yang berbentuk kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.		✓
34	40/KYE/08/Jan/11	Mencermati dasar hukum keistimewaan Yogyakarta , sudah jelas yakni ada pada kepala daerah (gubernur) dari keturunan Sultan, dan wakil kepala daerah (wagub) dari keturunan Puro Pakualaman. Jika ada pemahaman bahwa kepala daerah dan wakilnya bisa dari orang umum, maka keistimewaan Yogya akan hilang, karena provinsi DIY tidak ada bedanya dengan provinsi yang lain.		✓
35	41/KYE/08/Jan/11	Mari kita cermati kembali pengakuan negara terhadap keistimewaan Yogyakarta yang terkandung di dalam piagam Kedudukan yang diberikan negara kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka paku Alam VIII, pada tanggal 19 Agustus 1945 isi Piagam kedudukan Keistimewaan Yogyakarta itu, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno menetapkan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta . Bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Jadi ketentuan ini sudah jelas, sehingga jangan diinterpretasikan lagi yang justru membuat bingung masyarakat.		✓
36	43/KYE/08/Jan/11	Sekarang mari kita cermati bersama era demokrasi yang kini sedang marak, menurut demokrasi liberal pada dasarnya eksistensi kekuasaan adalah sebagai hasil dari sebuah konsensus bersama. Sehingga ditunjukkan sekelompok orang untuk mengatur jalannya tertib dan damainya perikehidupan dalam masyarakat. Sekelompok orang ini mestinya sadar betul bahwa mereka adalah penerima mandat orang banyak, untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, demi kemajuan bersama.	✓	✓
37	47/KYE/08/Jan/11	Lantas bagaimana dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sejarah seperti saya		✓

		sampaikan di depan tulisan ini ? Di antara derasnya keinginan untuk mengadakan reformasi politik, yang meng-inginkan adanya perubahan yang signifikan tentang pergantian kekuasaan.		
38	48/KYE/08/Jan/11	Keistimewaannya adalah pengangkatan kepala daerah (gubernur) dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan dan wagub dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat dengan UU ini . Tatib Pilkada DIY pada waktu itu Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5, bakal calon adalah seorang atau lebih, dengan mempertimbangkan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono IX dan keturunan Paku Alam VIII yang dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan syarat menunjukkan kekancingan atau bukti.		√
39	49/KYE/08/Jan/11	Di sisi lain Yogyakarta mengatur dirinya sendiri, berdasarkan hak atas kedautan sebagai bekas kerajaan, oleh karena itu, kepemimpinan depegang langsung oleh Sultan dan Paku Alam yang sedang jumeneng.		√
40	50/KYE/08/Jan/11	Pilkada untuk kabupaten dan kota secara langsung dapat diterapkan, mengingat status keistimewaan itu hanya melekat pada gubernur dan wakil gubernur.		√
41	52/KYE/08/Jan/11	Dengan perubahan zaman yang terus bergulir, dan mencermati peran Keraton sebagai representatif pusat kekuatan masyarakat, kekuatan moral dan kultur dari kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian tiada batas dari masyarakat Yogyakarta hendaknya mampu dipahami oleh pemerintah pusat. Dengan demikian Yogyakarta sebagai daerah istimewa tetap harus dipertahankan, dan Undang-Undang Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya segera disahkan, dan Gubernur dan wakil Gubernur ditetapkan tidak perlu melalui pemilihan.		√
42	53/API10/Jan/11	Alasan pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke yoga sejak 4 Januari 1946 bukan hanya karena kondisi Jakarta sudah tidak aman. Memang benar bahwa kondisi di Jakarta darurat karena pasukan marinir Belanda sudah mendarat di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945 dan segera melancarkan aksi-aksinya untuk kembali merebut Indonesia. Tetapi, ada alasan lain, yang lebih mendasar, yaitu untuk mendapatkan suasana kondusif bagi pembangunan pemerintah RI yang masih baru itu .		√
43	54/API10/Jan/11	Hal-hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastramidjojo di depan corong RRI Yogya pada 4 Februari 1946 malam. Berikut adalah cuplikan pidatonya itu (diambil dari buku 'Republik Indonesia : Daerah Istimewa Jogjakarta', Penerbit Kementerian Penerangan, 1953).		√
44	55/API10/Jan/11	“Sebelum kami menyiarkan beberapa pengumuman resmi, maka lebih dahulu kami menyampaikan salam nasional kita, Merdeka! Saudara-saudara, pertama kami atas nama		√

		Pemerintah mengumumkan dengan resmi bahwa mulai pagi ini tanggal 4 Februari 1946 sebagian dari Pemerintah Agung buat sementara dipindahkan dari <u>Jakarta</u> ke <u>Yogyakarta</u> . Dari sebab itu mulai hari <u>ini</u> Presiden kita Bung Karno dan Wakil Presiden Bung Hatta buat sementara waktu berkedudukan di kota <u>Mataram</u>”		
45	56/API10/Jan/11	“Berhubung dengan pemindahan sebagian dari Pemerintahan Agung ke Yogyakarta <u>ini</u> perlu agaknya diterangkan <u>di sini</u> , bahwa hal <u>itu</u> tidak usah menggoncangkan hati kita. Pemindahan <u>ini</u> tidak menjadi sebab untuk merubah pendirian Pemerintah terhadap luar maupun dalam negeri. Pemindahan sementara <u>itu</u> beralasan dalam hal, pertama, keadaan tidak aman yang terdapat di <u>Jakarta</u> . Kedua, untuk menyempurnakan organisasi dalam negeri”		√
46	57/API10/Jan/11	Alasan <u>itu</u> pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan dari renovasi rakyat Indonesia pada <u>masa ini</u> . Sebab Pemerintahan Agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah Kota <u>Mataram</u> akan dapat melangsungkan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan di daerah-daerah. Bahwa penyempurnaan organisasi-organisasi <u>itu</u> sennantiasa di lakukan, terbuktiilah dari perubahan-perubahan dalam susunan Pemerintahan Agung yang kami umumkan tadi Dengan demikian maka koordinasi yang tersusun, yang menjadi syarat mutlak untuk berputarnya roda pemerintahan dengan <u>licin</u> , akan lekas tercapai.”	√	√
47	58/API10/Jan/11	Sama seperti bayi yang dirawat dalam ruang inkubator, RI waktu itu membutuhkan perlindungan khusus supaya dapat bertumbuh dan melewati masa masa kritisnya. Untuk <u>itu</u> , Yogyakarta yang paling tepat menjadi inkubulator bagi bayi RI.		√
48	59/API10/Jan/11	Mengapa ? Karena <u>Yogya</u> merupakan sebuah negara monarki (Nagari Ngayogyakarta Hasiningrat) yang kokoh yang sudah eksis jauh sebelum negara RI lahir. Para penjajah – <u>Belanda, Jepang</u> – mengakui eksistensinya sehingga senantiasa harus membuat kontrak politik dengan Kasultanan Yogya. Meskipun setelah menyatakan berintegrasi dengan RI tidak lagi menjadi sebuah negara sendiri, <u>Kasultanan Yogya</u> memiliki kapasitas untuk melindungi <u>Yogya</u> secara politis dan ekonomi – bahkan menggaji para pejabat dan pegawai RI.		√
49	60/API10/Jan/11	Sistem pemerintahan asli dan kepemimpinan Sultan dan Paku Alam di <u>Yogya</u> – sebagai sebuah nagari yang eksis selama ratusan tahun – memberi motivasi bagi para pemimpin RI untuk membangun organisasi barunya yang bernama republik itu. <u>Itulah</u> sebabnya Mr Ali Sastoadidjojo mengatakan bahwa dengan menjadikan Kota <u>Mataram</u> sebagai ibukota maka RI akan dapat melangsungkan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahannya.		√
50	61/API10/Jan/11	Hal itu menunjukkan bagaimana kontribusi <u>Yogya</u> dalam mengasuh, merawat, melindungi, dan membersarkan negara RI. Tanpa peran <u>Yogya</u> seperti <u>itu</u> maka negara RI belum tentu masih		√

51	62/DDI/12/Jan/11	ada dan berkembang seperti sekarang ini!!! IDE PWI Yogyakarta untuk membuat macam kosensus jurnalisme bernuansa keistimewaan yang bertumpu pada akar budaya Jawa, menarik diperbincangkan. Jurnalisme Istimewa Yogyakarta (JIY) lahir dari pergumulan adanya peliputan media yang tak elok, bahkan cenderung tak berbudaya, kala erupsi Merapi terjadi. Padahal, masyarakat Yogya amat identik dengan lakon hidup yang bersandar pada falsafah hidup Jawa yang sarat nuansa spiritual, simbol, dan mutiara-mutiara kabijakan. Logika dan filsafat media yang belakangan ini makin buas, liar, materialistik, tak lagi seiring sejalan dengan dasar-dasar filsafat Jawa maupun etika jurnalisme.	✓
52	63/DDI/12/Jan/11	Seperti yang dikatakan Ketua PWI DIY, Drs. Sihono HT Msi (KR, 11/12/2010), bahwa untuk membuat rumusan perpaduan antara konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa yang nantinya menjadi buku panduan peliputan wartawan anggota PWI di area Yogya , bukanlah hal mudah adalah benar adanya. Sebagai sebuah kosensus ini yang harus menjadi panduan kerja-kerja jurnalistik di wilayah Yogyakarta , kosensus ini yang harus berdiri di atas kesepakatan <i>stake holders</i> kewartawanan, ilmuwan komunikasi, praktisi komunikasi, ilmuwan budaya dan aktivis budaya. Dengan beragamanya aktor yang ikut terlibat dalam perumusan kosensus JIY ini , bukan tidak mungkin perdebatan konseptual dan praktikal akan memakan waktu yang tidak pendek, padahal, urgensitas kosensus ini diburu waktu. Memang, problem waktu tidak seharusnya membatasi kualitas dan mutu konsep kosensus JIY ini .	✓
53	64/DDI/12/Jan/11	Namun, berangkat dari realitas dan kompleksitas itu , kita perlu mencari strategi penyusunan konsep yang lengkap, cepat dan akurat, tanpa meninggalkan kualitas. Karena pokok tujuan dari konsep JIY ini akan dibukukan, maka persoalan format dan isi buku amat krusial diapungkan. Menurut saya, buku panduan ini sebisa mungkin simpel dalam format, kuat dalam isi konsep dan liat dalam praktikal. Ketiga elemen ini dapat dibuat <i>outline</i> buku seperti : 1. Latar belakang: <i>hatrick</i> bencana; 2. Basis konsep: perkawinan jurnalisme dan budaya Jawa; 3. Panduan implementasi: setting, kualitas narasumber, pola penulisan dan lain-lain.	✓
54	65/DDI/12/Jan/11	Seperti kejadian tiga bencana alam, bencana jurnalisme dan bencana politik di Yogya pada periode pra erupsi dan pasca erupsi Merapi yang terlihat akhir-akhir ini , menjadi latar belakang yang cukup sah untuk mengurai fakta yang seajutnya merupakan identitas dalam penulisan karya jurnalistik.	✓
55	66/DDI/12/Jan/11	Manakala erupsi Merapi menerpa warga Yogya , ia menyisahkan kisah duka, nestapa dan kengerian. Pengalaman traumatik ini , amat elok, etis dan cerdas, jika karya peliputan jurnalistik, memuat panduan preventif bencana, ulasan harapan di tengah bencana, semangat dan asa memulihkan kehidupan, sembari menyajikan tulisan inspiratif-solutif pasca bencana	✓

		<p>ihwal rekonstruksi kawasan, pemulihan ekonomi warga dan penataan infrastruktur <i>pro life</i>. Anehnya, tidak demikian! Hanya segelintir media yang menyuarakan ini. Yang lainnya, mabuk dengan histeria ala budaya pop yang tentunya jauh dari laku falsafah hidup Jawa. Belum kering air mata <i>wong Yogyakarta</i>, bencana politik menyergap. Politik <i>ngono yo ngono ning aja ngono</i>, tak berlaku dalam diskursus status keistimewaan Yogyakarta. Amnesia sejarah amat lekat dengan bencana politik ini.</p>		
56	67/DDI/12/Jan/11	<p>Perkawinan antara ilmu jurnalisisme dan aneka konsep Jawa adalah pokok utama dalam uraian isi buku panduan JIY ini. Pada titik ini, kita perlu mencari dan menemukan nilai-nilai budaya Jawa yang seirama dan senapas dengan konsep jurnalisisme yang bertumpu pada fakta, kebenaran dan pro pada yang lain, kata Ashadi Siregar, bukan pada gosip dan <i>ngrasani</i>. Jurnalisisme akhir-akhir ini sudah mengarah pada <i>ngrasani</i>, jauh dari <i>memayu hayuning bawana, ayem-tentrem</i>, dan patahnya <i>rukun agawe santosa</i> (Suwardi Endraswara, 2010), juga tanpa verifikasi, tanpa kebenaran, jauh dari komprehensif dan proporsional (Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2003).</p>		√
57	68/DDI/12/Jan/11	<p>Wartawan yang bertugas di Yogyakarta memahami secara mendasar sejarah, potensi wisata, identitas kota, fenomena geologi dan perkembangan budaya. Wartawan sebagai mata keadilan dan kebenaran. Wartawan menulis dengan fakta bukan fiksi. Wartawan mendorong berita yang pro pada penguatan kohesi sosial dan rakyat marjinal. Wartawan mendorong dan mencari berita yang menguatkan peradaban kota. Jika ini dikawinkan dengan konsep nilai-nilai Jawa sebagai batu penjurju yang merepresentasi nilai-nilai <i>universal</i> kemanusiaan, maka jurnalisisme model ini layak disebut istimewa.</p>		√
58	69/DDI/12/Jan/11	<p>Kritik jenis ini merepresentasikan keluhuran budi dan kewaskitaan sebagai manusia, meminjam Indra Tranggono. <i>Ketiga</i>, tulisan informasi geologi sebaiknya memuat hal preventif, <i>emergency</i> dan liputan rehabilitasi yang sigi dengan warna <i>memayu hayuning bawana</i>.</p>		√
59	70/RDP/19/Jan/11	<p>Sejauh ini pemerintah kelihatan begitu percaya diri bahwa draf RUUK yang diajukan akan mendapat pengesahan DPR. Keyakinan itu setidaknya didasarkan pada dua hal, pertama, pemerintah berpendapat bahwa gerakan massa yang termanifestasi dalam aksi mendukung penetapan hanyalah sebagian saja dari sikap keseluruhan masyarakat Yogyakarta.</p>		√
60	71/RDP/19/Jan/11	<p>Kalau terjadi persamaan persepsi dan kesepakatan politik antara pemerintah dan fraksi-fraksi yang tergabung dalam mitra koalisi, maka dapat dipastikan draf RUUK DIY yang diajukan pemerintah akan berjalan mulus, dan tarik ulur kepentingan antara pemerintah dengan keraton dan masyarakat Yogyakarta dalam proses politik di DPR akan berakhir anti klimaks. Namun apapun hasil yang dicapai dalam proses politik di DPR, tetap akan meninggalkan luka sebagai hasil dari sebuah zero sum game politik. Pemerintah akan kehilangan muka apabila kalah dalam</p>		√

		<p>proses ini, sebaliknya keraton dan masyarakat Yogya akan luka berkepanjangan apabila fraksi-fraksi DPR berbalik arah dan mendukung draf pemerintahan. Sebagai sebuah permainan, politik memang sukar ditebak, semuanya bisa berubah. Yang semula mendukung, bisa saja berbalik menentang. Sebaliknya yang semula menentang, bisa saja berbalik mendukung. Namun keistimewaan Yogyakarta senyatanya bukanlah semata soal politik. Di dalamnya terkandung masalah moral, harga diri dan identitas kultural.</p>		
61	72/RDP/19/Jan/11	<p>Kalau banyak tokoh mengatakan pemerintah tidak tahu sejarah, hal ini dapat dimaknai bahwa pemerintah tidak menghargai dan tidak tahu membalas pada pengorbanan yang telah diberikan Raja Yogyakarta. Ini menyangkut masalah moral ketika itikad baik dan pengorbanan untuk mengintegrasikan diri dengan NKRI kemudian diabaikan.</p>		✓
62	73/RDP/19/Jan/11	<p>Ini merupakan bentuk moral hazard terhadap Sultan dan Paku Alam sebagai pewaris Kesultanan dan Paku Alaman.</p>		✓
63	74/RDP/19/Jan/11	<p>Tindakan pemerintah dengan menurunkan derajat Sultan dan Paku Alam untuk berkompetisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sangat mengusik harga diri, tidak saja Sultan dan Paku Alam, tetapi masyarakat Yogya pada umumnya. Raja yang dijunjung tinggi harus ikut dalam perebutan jabatan yang tentu saja sulit diterima dalam logika masyarakat Jawa. Dalam konsep tradisional Jawa, kekuasaan adalah wahyu yang menjadi amanat dari pribadi tinggi yang mendapatkannya. Kalau seorang raja harus ikut berkompetisi memperebutkan jabatan atau kekuasaan, tentu akan menghilangkan makna kesakralan dari kekuasaan itu sendiri. Raja akhirnya sama dengan pribadi lain yang mungkin terjebak dalam permainan politik yang dapat menurunkan wibawanya dan menjatuhkan derajatnya sebagai seorang raja. Seorang raja harus menjaga ucapan, sikap dan tata lakunya yang mencerminkan pribadi tinggi sebagai khalifatullah sayidina panatagama. Dalam istilah Jawa dikenal ungkapan sabda pandhita ratu, tan keno wola-wali, lan berbudhi bawalaksana. Dalam konsep ini, seorang raja adalah juga seorang pandhita yang ucapan dan perilakunya sangat terjaga.</p>		✓
64	75/RDP/19/Jan/11	<p>Kesetiaan masyarakat Yogya pada Sultan dan Paku Alam bukan semata pada kedudukannya sebagai raja di Kesultanan dan Paku Alaman. Lebih dari itu, Sultan dan Paku Alam adalah simbol dan identitas kultural masyarakat Yogyakarta yang melekat pada pribadi Sultan dan Paku Alam sebagai raja sekaligus sebagai “Senopati Ing Ngalogo” dalam mengatur pemerintahan. Hal ini sudah tertanam lama dalam benak masyarakat Yogya sebagai suatu keistimewaan yang membedakan Yogyakarta dengan daerah lainnya di Indonesia. Oleh karenanya memisahkan Sultan dan Paku Alam dari jabatannya sebagai raja dan pengatur pemerintahan, sama artinya “mengandangan” Sultan dan Paku Alam dalam sangkar emas “kekuasaan simbolik” tanpa kewenangan pengaturan pemerintah yang riil yang bersentuhan</p>		✓

		langsung dengan rakyatnya. Masyarakat akan kehilangan interaksi dengan simbol dan identitas kulturalnya. Itulah mengapa masyarakat Yogya memiliki sensitivitas dan resistensi yang tinggi terhadap draf RUUK DIY tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Sultan dan Paku Alam adalah paradigma keistimewaan DIY yang tertanam kuat di benak masyarakat Yogyakarta . Oleh karena itu diperlukan kearifan dari pemerintah dalam menyikapi masalah keistimewaan DIY ini .		
65	76/MKP/20/Jan/11	Ada banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang terlalu mahal jika hanya berlalu begitu saja.		√
66	77/MKP/20/Jan/11	Dalam 5 tahun terakhir kita digoncang dengan berbagai peristiwa. Kita masih ingat tahun 2006 masyarakat Bantul DIY mengalami peristiwa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan. Peristiwa gempa bumi tersebut juga sebuah momentum untuk memicu perubahan kesadaran dan posisi diri. Dengan kearifan lokalnya masyarakat Bantul bangkit pasca gempa 2006. Namun mereka tidak sekedar bangkit untuk kembali ke titik semula. Rumah-rumah tidak hanya diperbaiki seperti sediakala. Program rekonstruksi telah memperbaiki konstruksi bagaimana rumah tahan gempa itu seharusnya dibangun. Sekarang kita dapat melihat realitas hasil. Rumah-rumah penduduk di Bantul menjadi relatif lebih asri dan sehat. Lingkungan dan infrastruktur lebih baik. Semua itu telah melampaui titik kondisi sebelum gempa.		√
67	78/MKP/20/Jan/11	Empat tahun pasca gempa, Jogya diberi dua peristiwa yang tidak kalah mengekam, bahkan tidak hanya satu peristiwa, tetapi dua peristiwa yang hampir bersamaan. Peristiwa pertama adalah Erupsi Merapi yang masih berdampak dan erupsi pembentukan monarki dengan demokrasi yang mengusik ketenangan kawula Ngayogyakarta .		√
68	79/MKP/20/Jan/11	Erupsi Merapi mengantar kita menuju kesadaran baru bagaimana memahami bahasa Merapi seraf mungkin, dan Erupsi Monarki mengantar kita sejena kembali mendalami arti keistimewaan Yogyakarta. Sama dengan 2006 di Bantul peristiwa ini juga sedang dan akan menjadi momentum penguah kesadaran diri. Bagaimana kita dapat menjalani transformasi sehingga mampu melampaui kondisi dan posisi sebelum terjadi peristiwa erupsi. Kedua peristiwa itu sungguh mahal harganya. Rasanya terlalu mahal jika kita hanya ingin sekedar kembali sama ke titik semula. Bukan seperti keledai yang lebai. Kita bisa menjadi transformer-transformer yang mampu melihat visi kedepan untuk lebih mendekatkan pada cita-cita hidup bersama. Kita mempunyai sumber daya batin yang memungkinkan terjadinya lompatan yang melampaui titik semula. Sumber daya batin itu berupa keyakinan (belief) yang kuat.		√
69	80/MKP/20/Jan/11	Apa yang sebenarnya istimewa tentang Yogyakarta. Bagaimana jiwa keistimewaan itu dihayati dalam konteks hidup berbangsa saat ini . Menjadi kawula Yogyakarta adalah kebanggaan sekaligus amanah untuk menjaga semangat kebhinekaan dalam NKRI. Yogyakarta menjadi		√

		<p>istimewa karena berposisi dalam jajaran NKRI. Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono IX, tidak menempatkan kata istimewa sebagai tujuan pada dirinya sendiri (baca ; Yogyakarta). Khas dari yang disebut istimewa ada ketika ia berada dalam taburan kebinekaan Indonesia. Hal <u>itu</u> dapat kita baca dalam “Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan” tanggal 5 September 1945 sbb :</p> <p>Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri <u>Ngayogyakarta</u> Hadiningrat menyatakan : Bahwa Negeri <u>Ngayogyakarta</u> Hadiningrat yang bersifar kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia Dst. (Soedarisman, 1984; Purwadi, 2010).</p>		
70	82/MKP/20/Jan/11	<p>Di samping aspek historis, sisi lain istimewanya terletak pada <u>Yogyakarta</u> yang dipimpin oleh seorang Raja sebagai pengembalian amanah “Manunggaling Kawula Gusti”.</p>		√
71	83/MKP/20/Jan/11	<p>Janji saya <u>ini</u>, insya Allah, saya pegang sampai mati. 2. Dengan kejujuran dan keikhlasan saya ingin mengabdikan Bangsa karena bangsa saya menghadapi banyak persoalan yang perlu diselesaikan. 3. Dari Yogya <u>ini</u> kita bangun Indonesia Baru dengan peradapan baru. 4. Saya akan tultarkan kemajemukan <u>Jogja</u>, yang tidak mempersoalkan agama apapun, karena di <u>Jogja</u> agama apapun tidak bisa memaksakan kehendak agama lain.</p>		√
72	86/MKP/20/Jan/11	<p>Jadi keistimewaan adalah wujud tekad bersama antara Kerajaan <u>Ngayogyakarta</u> dan Negara Republik Indonesia untuk membangun kehidupan berbangsa, melalui pengakuan dan penghormatan atas kedudukannya masing-masing. Maka segenap kawula <u>Jogya</u> dapat berseru, “<u>aku</u> kawula <u>Ngayogyakarta</u> yang berbangsa Indonesia”.</p>		√
73	87/PKK/27/Jan/11	<p>Hasil penelitian laboratorium politik <u>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</u>, seperti dipajang di beberapa sudut kota, melaporkan data sebagai berikut. Sebanyak 96,6 persen penduduk DIY mendukung keistimewaan. Sebanyak 97,5 persen penduduk lulusan Perguruan Tinggi (PT) mendukung keistimewaan. Sebanyak 93,2 persen penduduk DIY mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahata sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY secara otomatis. Penduduk lulusan PT yang mendukung penetapan itu sebesar 94 persen. Adapun wilayah yang paling loyal terhadap keistimewaan adalah <u>Kabupaten Gunung Kidul</u> (96 persen) dan diikuti <u>Kabupaten Bantul</u> (89 persen).</p>		√
75	88/PKK/71/Jan/11	<p>Sajian angka-angka statistik dan prosentase-prosentase adalah ciri khas demokrasi prosedural. Karena <u>itu</u> setiap kali diadakan pemilihan umum senantiasa ada prediksi-prediksi dan berbagai analisis perhitungan cepat (<i>quick count</i>).</p>		√
76	89/PKK/27/Jan/11	<p>Hasil riset laboratorium politik <u>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</u> tentu membuat segenap wong Yogya berbesar hati. Data <u>itu</u> pun pasti sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat. Namun, sejauh mana penduduk Yogya yang pro keistimewaan dan pro penetapan memberi dukungan dengan pemahaman dan penghayatan yang mendalam?</p>		√

		Dalam sebuah wawancara di televisi, peneliti dan pengamat politik dari CSIS J Kristiadi pernah menyindir kalau wong Yogya <u>itu</u> terkadang “ <i>nggih nggih ora kepanggih</i> ” (tidak jelas antara ya dan tidak, antara setuju dan tidak setuju).		
77	90/PKK/27/Jan/11	Jika tanpa pemahaman mendalam, tanpa visi dan filosofi, masyarakat mudah goyah. Karena <u>itu</u> , iming-iming <i>money politic</i> yang begitu menggiurkan, misalnya, acapkali bisa menggoyang dan mengubah komitmen. Oleh sebab <u>itu</u> , yang sekarang mendesak diperlukan adalah peningkatan pemahaman dan penghayatan tentang keistimewaan <u>Yogyakarta</u> melalui pendidikan sejarah dan pendidikan politik secara intensif.		√
78	91/PKK/27/Jan/11	Persoalan keistimewaan <u>Yogya</u> adalah persoalan sejarah. Pendidikan sejarah di sekolah jangan hanya melulu mempelajari peristiwa demi peristiwa dalam kerangka kronologis.		√
79	92/PKK/27/Jan/11	Kemampuan menggali kebenaran sejarah secara obyektif dan ilmiah sangat diperlukan, sebab sudah sekian lama sejarah dipelintir untuk kepentingan politik. Antara “ <i>history</i> ” (sejarah) dan “ <i>his story</i> ” (cerita orang) sudah sering diputarbalikkan. Mumpung ingatan kolektif tentang sejarah keistimewaan <u>Yogya</u> masih kuat, marilah kita tegakkan kebenaran tersebut.		√
80	93/PKK/27/Jan/11	Persoalan keistimewaan <u>Yogya</u> adalah persoalan politik. Dinamika atau lebih tepatnya karut marut pembahasan RUUK <u>Yogya</u> selama bertahun-tahun <u>ini</u> di satu sisi memberikan pembelajaran politik tersendiri. Masyarakat menjadi tahu bagaimana tarik ulur kepentingan politik <u>itu</u> . Karena <u>itu</u> masyarakat justru perlu dibimbing untuk bisa melakukan proses belajar politik secara intensif.		√
81	94/PKK/27/Jan/11	Di sisi lain, komitmen masyarakat terhadap keistimewaan <u>itu</u> juga tidak sekedar keputusan “ <i>nggih nggih ora kepanggih</i> ” seperti dituduhkan oleh J Kristiadi.		√
82	95/BKK/27/Jan/11	Penetapan <u>itu</u> , yang dianggap anti-demokrasi oleh pihak pembikin polemik lebih mewujudkan politisasi. Kejelasan fakta sejarah bahwa lebih dari 60 tahun hal tersebut bukanlah masalah namun sekarang <u>ini</u> dipermasalahkan meniscayakan adanya “batu dibalik udang”.		√
83	97/BKK/27/Jan/11	Namun demikian demokrasi langsung seperti yang maujud dalam sepuluh tahun di negeri <u>ini</u> hanyalah mengkilap di pembungkus kadonya tetapi isinya menggecoh.		√
84	98/BKK/27/Jan/11	Dalam praktik serba aksesoris <u>itulah</u> demokrasi sulit menghasilkan sebuah kepemimpinan, melainkan cukuplah sebagai pabrik kekuasaan dan kepejabatatan.		√
85	99/BKK/27/Jan/11	Keberantakan substansial demokrasi di negeri kita pun dengan sepenuh kebanggaan disahkan dengan materai kemajuan betapapun kedaluwarsa dan bahkan palsuanya materai <u>itu</u> .		√
86	100/BKK/27/Jan/11	Dewasa <u>ini</u> masih cukup banyak orang memuja-puji apa yang di dalam karung <u>itu</u> sambil berikhtiar menyingkap karungnya sampai datang saat tatkala para pemimpin lintas agama melontarkan konstansi kebohongan publik.		√

87	101/BKK/27/Jan/11	Absurditas dan keremeh-temehan maupun kenaiifan politik seperti itulah kini menjamur sekaligus membencana di negeri ini . Rakyat, sekaligus kawula Ngayogyakarta pun kini unjuk rasa damai dengan sikap khas “eling lan waspada”, untuk belum bersedia dijajah oleh bangsa sendiri, model kepenjajahan yang oleh Soekarno disebut jauh lebih keji dari penjajah asing.	√	√
88	102/BKK/27/Jan/11	Diantar oleh kanal-kalan sejarah, budaya, filosofi dan kanal kejuangan, Yogyakarta bergerak menunjukkan epistemologi demokrasi di Indonesia sebagai memang “Demokrasi Indonesia”, yang hanya secara demikianlah bangsa ini sanggup mengindonesiakan Indonesia. Gerakan rakyat yang mayoritas tidak berpendidikan tinggi itu secara kategoris menolak sosialisasi ilmiah sejumlah pakar yang ingin menggeneralisasi paham demokrasi asing untuk Yogyakarta ; bahkan Indonesia.		√
89	103/BKK/27/Jan/11	Dalam workshop RUUK DIY 19 Januari lalu di Jakarta yang difasilitasi oleh Aliansi Bhinneka Tunggal Ika dan Jaringan Indonesia (JIRA) yang dihadiri secara nasional dengan lima profesor dan seorang mantan diplomat senior, diakui bahwa masalah Yogyakarta yang hendak ditorpedo keistimewaannya – melalui RUUK versi pemerintah – secara hakiki merupakan manifestasi dari usaha mentorpedo Indonesia.		√
90	104/BKK/27/Jan/11	Yogyakarta adalah benteng terakhir keindonesiaan; demikian semua peserta sampai-sampai peserta Jawa Timur menjamin, jika keistimewaan Yogyakarta mau dikutak-kutik “ Blitar sampai Banyuwangi ” siap membela. Peserta asal Kalimantan Tengah, Makassar dan Tanah Sunda pun terang benerang mendukung penetapan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam. Namun, sejumlah doktor yang bekerja di Yogyakarta justru berketetapan melakukan transformasi Yogyakarta demi Indonesia dengan cara pengisian Gubernur DIY melalui pilkadal atas nama demokrasi; sambil “membuang ke atas” Sultan dan Sri Paduka sebagai Pararadya atau Gubernur Utama. Mereka – boleh jadi – telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas Yogyakarta sesungguhnya lebih melucuti Yogyakarta dari nada keindonesiaannya .		√
91	105/BKK/27/Jan/11	Penulis, boleh kiranya berpegang pada integritas intelektual Pak Daed Joesoef, yang lama tinggal di Yogyakarta dimana beliau menulis bahwa mengajari rakyat Yogyakarta tentang demokrasi sama saja mengajari ikan berenang. Penulis sendiri dalam sosialisasi draft RUUK oleh DPD RI di gedung DPRD DIY belum lama mengusulkan perubahan redaksional. Bab V padal 9 (ayat (1) dan (2) draft tersebut bunyinya (dua ayat penulis gabungan) : “Sri Sultan Hamengku Buwono/Sri Paduka Paku Alam, selain sebagai pemimpin tertinggi Kasultanan/Kadipaten menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah/Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY”.		√
92	106/BKK/27/Jan/11	Waktu itu penulis usul diubah menjadi: “Sri Sultan Hamengku Buwono/Sri Paduka Paku Alam		√

93	107/BKK/27/Jan/11	<p>sebagai pemimpin tertinggi Kasultanan/Kadipaten adalah Gubernur/Wakil Gubernur DIY”. Dengan kata “adalah”, bermakna suatu eksistensi yang sifatnya genus; sedangkan dengan kata “sebagai” maknanya adalah spesies terdampak oleh hukum kausalitas hilir. Padahal, kemelekatan jabatan gubernur/wakil gubernur pada kepemimpinan Sultan/Sri Paduka <u>itu</u> sifatnya bukan hilir melainkan hulu.</p> <p>Dari realitas hulu kepemimpinan – sekaligus kepemimpinan hulu – itulah makna dipertahankannya kemelekatan Sri Sultan terhadap jabatan gubernur dan Sri Paduka terhadap jabatan wakil gubernur oleh kawula <u>Ngagogyakarta</u>; memberikan teladan bahwa seorang gubernur selaku pejabat bukanlah pertama dan terutama penguasa, melainkan pemimpin. Dalam perspektif keadaban, istimewaanya kepemimpinan negeri <u>Ngagogyakarta itu</u> adalah bukan mewujudkan kekuasaan berbasis kekuatan (power based power) melainkan kekuasaan berbasis kebudayaan (culture based power).</p>		✓
94	108/PDD/28/Jan/11	<p>Demokrasi dalam makan orijinal adalah pemerintahan rakyat yang embrionya lahir dari <u>Iraq</u> dalam pemerintahan demokrasi primitif pada tahun 3360-2400 SM (Wawasan Sistem Politik Islam, Mustholah Maufur MA). Namun di <u>benua Eropa</u> ada klaim bahwa pertama kali demokrasi lahir adalah di <u>Athena</u> pada tahun 508 SM.</p>		✓
95	109/PDD/28/Jan/11	<p>Bangsa Indonesia pernah mengalami demokrasi liberal yang kemudian direduksi oleh Bung Karno, presiden pertama RI menjadi Demokrasi Terpimpin. Dalam era Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto demokrasi terpimpin di modifikasi menjadi Demokrasi Pancasila yang diintegrasikan dengan ajaran Eka Prasetya Panca Karsa dalam suatu jабaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dengan berbagai nilai positif dan negatifya kedua tipologi demokrasi tersebut memiliki tuntunan yang jelas dan terarah. Sementara dalam era Reformasi sekarang <u>ini</u> demokrasinya tidak memiliki format yang terukur. Di satu sisi ada pemanjaan di kalangan rakyat, dan di sisi lain ada kendali kuat dari pusat kekuasaan yang bersembunyi di belakang legalitas konstitusional. Dalam kondisi ketiadaan format demokrasi seperti <u>ini</u> bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di arena pertarungan massal antara <u>itu</u> mendukung kebijakan pemerintah dengan pemilik <u>Kedaulatan Rakyat</u>. Tanda-tanda ke arah <u>itu</u> sebenarnya sudah tampak dengan berbagai bentuk demonstrasi massa menentang kebijakan penguasa di berbagai daerah yang sering berkeses anarkhis. Kalau kekuatan massa tersebar <u>itu</u> terakumulasi secara nasional dalam satu gerakan maka akan terjadi kekacauan di negara tercinta <u>ini</u>.</p>		✓
96	110/PDD/28/Jan/11	<p>Terlepas dari putaran sejarah yang sudah gamblang status kekratonan <u>Yogyakarta</u> (Ngagogyakarta Hadiningrat) seharusnya pemerintah tidak “ngotot” untuk memaksakan kepentingannya. Kawula <u>Yogyakarta</u> sudah cukup demokratis ikut menyukseskan SBY</p>		✓

97	112/DPP/28/Jan/11	<p>menjadi Presiden. Kalau kemudian kedudukan tertinggi NKRI <u>ini</u> akan dipakai menggebu-gebut demokrasi rakyat <u>Yogyakarta</u>, tentu tindakan <u>ini</u> justru tidak demokratis.</p> <p>Generalisasi penerapan asas demokrasi dalam perspektif otonomi daerah merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah DIY. Eksistensi kraton yang didramatisir sebagai identitas/symbol demokrasi monarkhi akhir-akhir <u>ini</u> menjadi polemik terhadap demokrasi nasional. Sementara demokrasi <u>itu</u> sendiri secara isoteris hanya dipahami oleh para elitis, sementara rakyat sendiri yang nota bene selalu dipakai stempel orasi politik, justru tidak banyak tahu tentang demokrasi. Bisa-bisa rakyat <u>Yogyakarta</u> berkesimpulan bahwa demokrasi adalah Pemilu-kada dan sebaliknya Pemilu-kada adalah demokrasi. Prevarikasi politik terhadap <u>Daerah Istimewa Yogyakarta</u> jangan menjadikan ketidakpastian status “istimewa” menjadi “peristiwa” hukum yang mencederai rakyat <u>DIY</u>. Mempertajamkan “demokrasi dan monarkhi yang sudah mapan” di <u>DIY</u> merupakan pemborosan energi politik nasional yang seharusnya fokus kepada upaya mengentaskan kemiskinan rakyat, termasuk kemiskinan akhlak dan moral agama para penyelenggara negara yang doyan KKN.</p>		✓
98	113/DPP/28/Jan/11	<p>Kalaulah demokrasi mau diterapkan di <u>DIY</u>, ada benang merah yang bisa diterapkan dengan sistem pemilihan tidak langsung. Berdayakan DPRD sebagai presentasi rakyat untuk menentukan dan mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka terlaksananya desentralisasi formil, materiel dan riil bersama pemerintah <u>DIY</u>.</p>		✓
99	114/SKY/29/Jan/11	<p>Berdasarkan hasil sidang di <u>DPR RI</u> terkait pembahasan RUU DIY, pada hari Rabu 26 Januari 2011 kemarin menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk “menghabisi” keistimewaan <u>Yogyakarta</u> pada sisi politik dan budaya nampak terlihat dengan jelas. Pada sisi politik, apabila <u>kita</u> mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin meredukasi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di <u>Yogyakarta</u>. <u>Sedangkan</u> pada sisi budaya, pemerintah hanya menganggap <u>Yogyakarta</u> sebatas sebagai provinsi yang sama dengan propinsi lain. Keistimewaan <u>Yogyakarta</u> dianggap hanya sekedar warisan sejarah dan budaya pada masa dinasti Sultan Hamengku Buwono IX saja. Di tengah-tengah euforia demokrasi dan pemilihan langsung, suara rakyat sudah tidak lagi menjadi bagian dari esensi demokrasi. Kepentingan penguasa lebih utama dari pada mendekati aspirasi rakyat. Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY tampaknya sudah mendekati pemerintahan bertangan besi dan ber-rejim pemilihan. <i>Kedaulatan Rakyat</i> sudah tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan partai, penguasa dan pengusaha. Sistem perwakilan yang telah dianut oleh negeri <u>ini</u> telah gugur dengan sendirinya ketika para wakil rakyat dan lembaga perwakilan rakyat lainnya sudah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lalu apa istimewanya negeri <u>ini</u>?</p>		✓

100	115/SKY/29/Jan/11	<p>Sekarang, keistimewaan Yogyakarta tidak pernah dilihat dalam ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Apabila kita cermati bahwa ada sisi lain yang menarik yang dapat menunjukkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang lebih humanis. Hal itu terbukti dari predikat Yogyakarta yang mampu mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan kalangan masyarakat banyak. Sisi kebhinekaan Yogyakarta pun terbukti dengan berdirinya berbagai asrama daerah dari Sabang sampai Merauke dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 33 asrama daerah yang dibangun di tanah Yogyakarta. Daerah mana yang ada di Indonesia memiliki asrama daerah yang beragam seperti di Yogyakarta. Sisi lain yang menarik adalah berbagai jenis plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia hanya Yogyakarta yang memiliki keanekaragamannya. Apabila mengamati plat nomor kendaraan kita dapat melihat ada berbagai macam ragamnya seperti BG, G, AB, L, R, B, AG, M, S, dll. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah kota istimewa, banyak mahasiswa dan pelajar membawa kendaraan dari daerah asal mereka dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta karena kecintaan mereka terhadap kota Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta bukan sekedar suatu fakta sejarah dan cerita masa lalu. Tetapi Keistimewaan Yogyakarta dapat terlihat dari denyut kehidupan masa kini dan yang akan datang. Sesungguhnya Yogyakarta telah menjadi ikon Indonesia mini harusnya mendapatkan penghargaan, perlindungan dan jaminan dari pemerintah tetapi di era pemerintahan SBY malah ingin mencoba untuk mencabut akar historis dari keistimewaan itu sendiri.</p>	✓	✓
101	116/SKY/29/Jan/11	<p>Ambisi pemerintah yang tetap menginginkan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta merupakan proses pemaksaan kepentingan yang bersumber dari perlakuan ideologi yang tidak demokratis di suatu negara demokrasi. Dalam hal ini, pemerintah sudah kalah karena dasar yuridis konstitusional dan historis sangat lemah untuk menunjukkan kepentingannya melakukan demokratisasi dengan cara pemaksaan. Fakta lain yang menunjukkan keistimewaan Yogyakarta adalah pergerakan reformasi pada tahun 1997 juga lahir dari rahim kota Yogyakarta, berbagai elemen masyarakat, organisasi, intelektual muda, dan praktisi merapatkan barisan untuk menggelorakan gerakan reformasi pada masa itu bertitik toak dari Yogyakarta.</p>	✓	✓
102	117/SKY/29/Jan/11	<p>Dari sisi kebudayaan, Yogyakarta juga telah berkontribusi bagi pelestarian kebudayaan Indonesia dengan diakuinya beberapa warisan kebudayaan Indonesia sebagai <i>the World Intangible cultural heritage</i> oleh UNESCO seperti Keris, Wayang, huruf <i>ha, na, ca, ra, ka</i>, dan Batik.</p>		✓

103	118/SKY/29/Jan/11	Beberapa warisan kebudayaan tersebut telah menginspirasi daerah-daerah di Indonesia untuk ikut memperjuangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya diikuti oleh alat musik angklung dari Jawa Barat juga mendapatkan pengakuan oleh UNESCO tahun 2010 sebagai warisan budaya dunia tak benda.		√
104	120/SKY/29/Jan/11	Demokrasi kita sudah <i>keblinger</i> . Demokrasi adalah demokrasi yang tidak pernah memperhatikan kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat yang saat ini sangat dibutuhkan mereka yaitu : pendidikan yang baik, jaminan kesehatan, kesejahteraan, dan lapangan kerja.		√
105	121/SKY/29/Jan/11	Sisi lain keistimewaan Yogyakarta adalah keinginan rakyat untuk tetap bisa menikmati hari esok yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, adanya pendidikan yang murah dan merakyat dan jaminan kesehatan yang lebih baik bukan untuk ikut pemilu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya bisa sehat, cerdas, dan waras.	√	√
106	122/SKY/29/Jan/11	Oleh karena itu, Yogyakarta sebagai daerah istimewa adalah jaminan akan peradaban manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan merakyat dan demokrasi tidak akan berarti apabila tidak ada kedamaian, kenyamanan, dan keharmonisan. Istimewanya negeri ini ketika masih ada daerah yang istimewa yang tetap menjadi benteng peradaban dan kebudayaan Indonesia.		√
JUMLAH			7	106

Lampiran 3. Pengacuan Komparatif dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

No.	Nomor Kartu Data	Data
1	04/65T/04/Jan/11	Saat itu haya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat pemerintahan RI. Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani <u>seperti itu</u> .
2	12/65T/04/Jan/11	Sikap pemerintah pusat yang bertentangan dngan peran dan jasa Sultan dan rakyat Yogyakarta <u>ibarat</u> air susu dibalas dengan air tuba.
3	27/SMK/05/Jan/11	Sejumlah petinggi kerajaan <u>seperti</u> Papatih Dalem (‘perdana menteri’) diculik dan dibunuh. Pusat pemerintahan (Kepelatihan) juga dibakar, diikuti pencopotan para bupati yang umumnya kerabat kerajaan.
4	32/SMK/06/Jan/11	HB dan PA masing-masing sebagai ‘Kepala Kraton’ (Hoofd van het Huis) <u>seperti</u> raja lain di seluruh Indonesia.
5	42/KYE/08/Jan/11	Kompetensi Sultan HB IX dan PA VIII juga berlandaskan amanat 30 September 1945 yang menunjukkan tetap menyatakan diri dengan RI, <u>seperti</u> tersebut dalam amanatnya yang intinya, sepakat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, agar jalannya pemerintah daerah Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara RI.
6	45/KYE/08/Jan/11	Kekuasaan yang terus menerus dilanggengkan ditengarai akan mempunyai impak pada menumpuhnya visi dan erosinya kepekaan penguasa terhadap persoalan-persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat luas. Kekuasaan <u>seperti itu</u> cenderung mempersonifikasikan kekuasaannya seolah-olah dirinya adalah kehendak dan kemauan masyarakat, atas nama masyarakat, sehingga mudah terjebak pada pola-pola penanganan secara pragmatis tanpa dibarengi observasi yang mendalam.
7	47/KYE/08/Jan/11	Lantas bagaimana dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sejarah <u>seperti</u> saya sampaikan di depan tulisan ini? Di antara derasnya keinginan untuk mengadakan reformasi politik, yang meng-inginkan adanya perubahan yang signifikan tentang pergantian kekuasaan.
8	50/KYE/08/Jan/11	Pilkada untuk kabupaten dan kota secara langsung dapat diterapkan, mengingat status keistimewaan itu hanya melekat pada gubernur dan wakil gubernur. Rotasi kekuasaan di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan <u>seperti</u> pada provinsi lain, dan bahkan bisa dibalang berjalan lancar tanpa gejala.
9	58/API10/Jan/11	Negara RI yang masih bayi, baru lahir pada 17 Agustus 1945, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus. <u>Sama seperti</u> bayi yang dirawat dalam ruang inkubator, RI waktu itu membutuhkan perlindungan khusus supaya dapat bertumbuh dan melewati masa masa

		<p>kritisnya. Untuk itu, Yogyakarta yang paling tepat menjadi inkubulator bagi bayi RI.</p> <p>Hal itu menunjukkan bagaimana kontribusi Yogyakarta dalam mengasuh, merawat, melindungi, dan membersarkan negara RI. Tanpa peran Yogyakarta seperti itu maka negara RI belum tentu masih ada dan berkembang seperti sekarang ini!!</p>
10	61/API/10/Jan/11	
11	63/DDI/12/Jan/11	<p>Seperti yang dikatakan Ketua PWI DIY, Drs. Sihono HT Msi (KR, 11/12/2010), bahwa untuk membuat rumusan perpaduan antara konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa yang nantinya menjadi buku panduan peliputan wartawan anggota PWI di area Yogyakarta, bukanlah hal mudah adalah benar adanya.</p>
12	64/DDI/12/Jan/11	<p>Menurut saya, buku panduan ini sebisa mungkin simpel dalam format, kuat dalam isi konsep dan liat dalam praktikal. Ketiga elemen ini dapat dibuat <i>outline</i> buku seperti : 1. Latar belakang: <i>hatrick</i> bencana; 2. Basis konsep: perkawinan jurnalisme dan budaya Jawa; 3. Panduan implementasi: setting, kualitas narasumber, pola penulisan dan lain-lain.</p>
13	65/DDI/12/Jan/11	<p>Seperti kejadian tiga bencana alam, bencana jurnalisme dan bencana politik di Yogya pada periode pra erupsi dan pasca erupsi Merapi yang terlihat akhir-akhir ini, menjadi latar belakang yang cukup sah untuk mengurai fakta yang sejatinya merupakan identitas dalam penulisan karya jurnalistik. Opini, dugaan, isu dan tuduhan, bukanlah aras jurnalistik.</p>
14	74/RDP/19/Jan/11	<p>Raja yang dijunjung tinggi harus ikut dalam perebutan jabatan yang tentu saja sulit diterima dalam logika masyarakat Jawa. Dalam konsep tradisional Jawa, kekuasaan adalah wahyu yang menjadi amanat dari pribadi tinggi yang mendapatkannya. Kalau seorang raja harus ikut berkompetisi memperebutkan jabatan atau kekuasaan, tentu akan menghilangkan makna kesakralan dari kekuasaan itu sendiri. Raja akhirnya sama dengan pribadi lain yang mungkin terjebak dalam permainan politik yang dapat menurunkan wibawanya dan menjatuhkan derajatnya sebagai seorang raja. Seorang raja harus menjaga ucapan, sikap dan tata lakunya yang mencerminkan pribadi tinggi sebagai khalifatulah sayidina panatagama.</p>
15	75/RDP/19/Jan/11	<p>Hal ini sudah tertanam lama dalam benak masyarakat Yogya sebagai suatu keistimewaan yang membedakan Yogyakarta dengan daerah lainnya di Indonesia. Oleh karenanya memisahkan Sultan dan Paku Alam dari jabatannya sebagai raja dan pengatur pemerintahan, sama artinya “mengandangkan” Sultan dan Paku Alam dalam sangkar emas “kekuasaan simbolik” tanpa kewenangan pengaturan pemerintah yang riil yang bersentuhan langsung dengan rakyatnya.</p>
16	77/MKP/20/Jan/11	<p>Peristiwa gempa bumi tersebut juga sebuah momentum untuk memicu perubahan kesadaran dan posisi diri. Dengan kearifan lokalnya masyarakat Bantul bangkit pasca gempa 2006. Namun mereka tidak sekedar bangkit untuk kembali ke titik semula. Tumah-rumah tidak hanya diperbaiki seperti sediakala. Program rekonstruksi telah memperbaiki konstruksi bagaimana rumah tahan gempa itu seharusnya dibangun. Sekarang kita dapat melihat realitas hasil.</p>

17	79/MKP/20/Jan/11	Rumah-rumah penduduk di Bantul menjadi relatif lebih asri dan sehat. Lingkungan dan infrastruktur lebih baik. Semua itu telah melampaui titik kondisi sebelum gempa. Erupsi Merapi mengantar kita menuju kesadaran baru bagaimana memahami bahasa Merapi seraif mungkin, dan Erupsi Monarki mengantar kita sejenis kembali mendalami arti keistimewaan Yogyakarta. Sama dengan 2006 di Bantul peristiwa ini juga sedang dan akan menjadi momentum pengubah kesadaran diri. Bagaimana kita dapat menjalani transformasi sehingga mampu melampaui kondisi dan posisi sebelum terjadi peristiwa erupsi. Kedua peristiwa itu sungguh mahal harganya. Rasanya terlalu mahal jika kita hanya ingin sekedar kembali sama ke titik semula. Bukan seperti keledai yang lebai. Kita bisa menjadi transformer-transformer yang mampu melihat visi kedepan untuk lebih mendekatkan pada cita-cita hidup bersama. Kita mempunyai sumber daya batin yang memungkinkan terjadinya lompatan yang melampaui titik semula. Sumber daya batin itu berupa keyakinan (belief) yang kuat.
18	87/PKK/27/Jan/11	Hasil penelitian laboratorium politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seperti dipajang di beberapa sudut kota, melaporkan data sebagai berikut. Sebanyak 96,6 persen penduduk DIY mendukung keistimewaan. Sebanyak 97,5 persen penduduk lulusan Perguruan Tinggi (PT) mendukung keistimewaan. Sebanyak 93,2 persen penduduk DIY mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertabta sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY secara otomatis.
19	94/PKK/27/Jan/11	Jika dikembangkan pemahaman sejarah dan politik yang kuat maka semangat pro keistimewaan tidak menjadi semangat yang emosional yang hanya bermodalan tekad “ <i>pokoke</i> ”. Di sisi lain, komitmen masyarakat terhadap keistimewaan itu juga tidak sekedar keputusan “ <i>nggih nggih ora kepanggih</i> ” seperti dituduhkan oleh J Kristiadi. Dengan demikian sikap pro keistimewaan yang berkembang tidak sekedar sloganistik, euforia, dan simbolis. Pro keistimewaan juga bukan sekedar aksi kuantitatif segenap masyarakat, namun sebuah komitmen bersama yang berkualitas mendalam!
20	97/BKK/27/Jan/11	Namun demikian demokrasi langsung seperti yang maujud dalam sepuluh tahun di negeri ini hanyalah mengkilap di pembungkus kadonya tetapi isinya mengecoh. Demokrasi berisikan sekian tipu muslihat melalui permainan uang, permainan oligarkis atau bahkan tiranis partai dan politik transaksional alias barter politik dan sangat mungkin sekaligus eksperimental dari sebuah politik manipulasi. Bukankah heboh manipulasi DPT pemilu 2008/2009 seperti ini dimulai dari pilkada Jawa Timur oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar?!
21	101/BKK/27/Jan/11	Absurditas dan keremeh-temehan maupun kenafian politik seperti itulah kini menjamur sekaligus membencana di negeri ini. Rakyat, sekaligus kawula Ngayogyakarta pun kini unjuk rasa damai dengan sikap khas “eling lan waspada”, untuk belum bersedia dijajah oleh bangsa sendiri, model kepenjajahan yang oleh Soekarno disebut jauh lebih keji dari penjajah asing.

22	105/BKK/27/Jan/11	<p>Penulis, boleh kiranya berpegang pada integritas intelektual Pak Daoed Joesoef, yang lama tinggal di Yogyakarta dimana beliau menulis bahwa mengajari rakyat Yogyakarta tentang demokrasi sama saja mengajari ikan berenang. Penulis sendiri dalam sosialisasi draft RUUK oleh DPD RI di gedung DPRD DIY belum lama mengusulkan perubahan redaksional. Bab V pasal 9 (ayat (1) dan (2) draft tersebut bunyinya (dua ayat penulis gabungan) : “Sri Sultan Hamengku Buwono/Sri Paduka Paku Alam, selain sebagai pemimpin tertinggi Kasultanan/Kadipaten menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah/Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY”.</p>
23	109/PDD/28/Jan/11	<p>Dalam kondisi ketiadaan format demokrasi seperti ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di arena pertarungan massal antara pendukung kebijakan pemerintah dengan pemilik <i>Kedaulatan Rakyat</i>. Tanda-tanda ke arah itu sebenarnya sudah tampak dengan berbagai bentuk demonstrasi massa menentang kebijakan penguasa di berbagai daerah yang sering bereskses anarkhis. Kalau kekuatan massa tersebar itu terakumulasi secara nasional dalam satu gerakan maka akan terjadi kekacauan di negara tercinta ini.</p>
24	114/SKY/29/Jan/11	<p>Berdasarkan hasil sidang di DPR RI terkait pembahasan RUU DIY, pada hari Rabu 26 Januari 2011 kemarin menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk “menghabisi” keistimewaan Yogyakarta pada sisi politik dan budaya nampak terlihat dengan jelas. Pada sisi politik, apabila kita mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin meredukasi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di Yogyakarta. Sedangkan pada sisi budaya, pemerintah hanya menganggap Yogyakarta sebatas sebagai provinsi yang sama dengan propinsi lain. Keistimewaan Yogyakarta dianggap hanya sekedar warisan sejarah dan budaya pada masa dinasti Sultan Hamengku Buwono IX saja.</p>
25	115/SKY/29/Jan/11	<p>Sisi kebhinekaan Yogyakarta pun terbukti dengan berdirinya berbagai asrama daerah dari Sabang sampai Merauke dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 33 asrama daerah yang dibangun di tanah Yogyakarta. Daerah mana yang ada di Indonesia memiliki asrama daerah yang beragam seperti di Yogyakarta. Sisi lain yang menarik adalah berbagai jenis plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia hanya Yogyakarta yang memiliki keanekaragamannya. Apabila mengamati plat nomor kendaraan kita dapat melihat ada berbagai macam ragamnya seperti BG, G, AB, L, R, B, AG, M, S, dll.</p>
26	117/SKY/29/Jan/11	<p>Dari sisi kebudayaan, Yogyakarta juga telah berkontribusi bagi pelestarian kebudayaan Indonesia dengan diakuinya beberapa warisan kebudayaan Indonesia sebagai <i>the World Intangible cultural heritage</i> oleh UNESCO seperti Keris, Wayang, huruf <i>ha, na, ca, ra, ka, ka</i>, dan Batik.</p>

Lampiran 4. Substitusi dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

No.	Nomor Kartu Data	Data	Penanda Kohesi			
			SN	SF	SK	SD
1	01/65T/04/Jan/11	Tanggal 4 Januari 2011 ini genap 65 tahun berdirinya Republik Jogja. Kebetulan tahun ini akan dibahas Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang kontroversi dan menengangkan lantaran sikap pemerintah yang tercermin dalam RUUK tersebut dinilai kurang memahami peran dan posisi Sultan serta jiwa kemerdekaan masyarakat Yogyakarta.		√		
2	04/65T/04/Jan/11	Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta . Tawaran yang dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946 itu disambut baik oleh pemerintah di Jakarta. Pemindahan ibukota ke Yogyakarta ini berhasil membuat rada pemerintahan yang sebelumnya macet menjadi berjalan kembali. Tawaran Sultan HB IX ini mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Saat itu haya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat pemerintahan RI . Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani seperti itu .			√	√
3	05/65T/04/Jan/11	Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan Kereta Luar Biasa (KLB), karena jadwal perjalanannya dilakukan di luar jadwal yang ada. Setibanya para pemimpin di Yogyakarta, roda pemerintah langsung digulirkan. Hal ini bisa dilakukan karena tata pemerintahan di Yogyakarta saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi.				√
4	06/65T/04/Jan/11	Keraton juga menanggung biaya para pejabat RI selama berada di Yogyakarta . Keuangan RI dalam kondisi sangat buruk. Untuk pembiayaan ini , jumlah yang dikeluarkan oleh Keraton diperkirakan mencapai jutaan gulden. Hal ini juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, makanan dan harta benda.				√
5	08/65T/04/Jan/11	Oleh karena itu Keraton Yogyakarta memberikan berbagai peralatan secara lengkap. Tidak hanya itu. Untuk melanjutkan perjuangan RI mengusir Belanda melalui perlawanan fisik, Keraton yang masih memiliki logistik persenjataan cukup lengkap juga memberikan setidaknya 1.440 pucuk senjata api kepada pasukan RI . Pembagian bantuan diberikan setiap bulan sampai Yogyakarta kembali ke tangan RI. Tindakan tersebut adalah suatu kebijaksanaan seorang negarawan besar. Sri Sultan HB IX menyimpan unga Belanda tidak untuk kepentingan sendiri atau keluarganya tetapi untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan tanah air.				√
6	09/65T/04/Jan/11	Selama periode Republik Jogja , perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga berlangsung dengan gencar dan efektif, baik dalam bentuk gerilya maupun perundingan. Pada periode ini pula Yogyakarta		√		

7	11/65T/04/Jan/11	dengan jiwa kemerdekaannya memegang peran penting dalam mempertahankan kelangsungan RI. Selain itu diakui sendiri oleh Presiden Soekarno (pemerintah pusat) dalam <u>kesannya</u> , <u>keberhasilan Republik Jogja dalam mempertahankan RI tak lepas dari jiwa kemerdekaan rakyat Yogyakarta</u> . <u>Kesan itu</u> ditulis sendiri oleh Presiden Soekarno saat meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta pada tanggal 28 Desember 1949.				√
8	29/SMK/06/Jan/11	Keadaan di Yogya berbeda. HB IX dan PA VIII memberi kesaksian tentang peran rakyat dalam kemerdekaan dan mengakui paham <i>Kedaulatan Rakyat</i> yang dikandung UUD 1945 (Amanat 30/10/1945). Keduanya menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dipegang pemerintah penjajah Belanda (Gubernur dengan kantornya) dan Jepang (Kooti Zimukyoku Tyookan dengan kantornya) 'telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada Kami berdua'.	√			
9	30/SMK/06/Jan/11	PPKI memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia di daerah-daerah (19/8/1945). HB IX dan PA VIII selanjutnya menyatakan, KNID di Yogya telah membentuk Badan pekerja yang dipilih dari para anggotanya (19/10/1945). Lembaga baru ini bertugas sebagai badan legislatif yang turut menentukan haluan pemerintah daerah di masa perang. Kepada 'segenap penduduk dari segala bangsa' di Yogya keduanya menyatakan, menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan di Yogya dengan konstitusi. Negari Ngajogjakarta bermentamorfosis sebagai monarki konstitusional.	√			
10	31/SMK/06/Jan/11	Keduanya mengakui dan menetapkan BP KNID sebagai lembaga perwakilan rakyat yang akan membuat undnag-undang dan menentukan arah penyelenggaraan pemerintah di Yogya sesuai aspirasi rakyat (Amanat 30/10/1945). Setelah Yogya mjadi ibu kota RI masa perang (Januari 1946-Desember 1949), HB IX dan PA VIII melanjutkan 'demokratisasi'. Dengan persetujuan BP KNID keduanya menerbitkan aturan pembentukan DPRD provinsi, kota, kabupaten dan kalurahan di Yogya (Maklumat tanggal 18/05/1946). Pada bulan Juli 1951 rakyat Yogya melaksanakan pemilihan umum anggota DPRD, sebelum pemilu nasional 1955.	√			
11	33/SMK/06/Jan/11	Tak heran bahwa Negari Ngajogjakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa setingkat provinsi (UU Nomor 3/1950); kedudukan kepala daerah melekat pada HB IX dan wakil kepala daerah pada PA VIII. Menurut Pasal 88 ayat (2) UU Nomor 18/1965, kedudukan HB IX dan PA VIII tidak terikat jangka waktu masa jabatannya. Pasal 91b UU Pemda 1974 bahkan menyatakan, keduanya tidak terikat pada syarat dan tata cara pengisian gubernur/wagub yang berlaku di daerah lain.	√			
12	34/SMK/06/Jan/11	Kemudian penjelasan Pasal 122 UU Nomor 22/1999 bergeser. Isi keistimewaan Yogya adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan wagub dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat undang-undang ini. Pergeseran ini diakui oleh Pasal 226 UU Nomor 32/2004 di masa Presiden Megawati, meski MPR tahun 2000 mengharuskan gubernur, bupati atau walikota dipilih secara demokrasi (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945).				√

13	42/KYE/08/Jan/11	Kompetensi Sultan HB IX dan PA VIII juga berlandaskan amanat 30 September 1945 yang menunjukkan tetap menyatakan diri dengan RI, seperti tersebut dalam amanatnya yang artinya, sepakat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, agar jalannya pemerintah daerah Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara RI.	√	
14	45/KYE/08/Jan/11	Kedua, adanya pembatasan masa (waktu) atas kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang terus menerus dilanggengkan ditengarai akan mempunyai dampak pada menumpuhnya visi dan erosinya kepekaan penguasa terhadap persoalan-persoalan yang menyetuh kehidupan masyarakat luas. Kekuasaan seperti itu cenderung mempersonifikasikan kekuasaannya seolah-olah dirinya adalah kehendak dan kemauan masyarakat, atas nama masyarakat, sehingga mudah terjebak pada pola-pola penangan secara pragmatis tanpa dibarengi observasi yang mendalam.	√	
15	56/API10/Jan/11	“Berhubung dengan pemindahan sebagian dari Pemerintahan Agung ke Yogyakarta ini perlu agaknya diterangkan di sini, bahwa hal itu tidak usah menggoncangkan hati kita. Pemindahan ini tidak menjadi sebab untuk merubah pendirian Pemerintah terhadap luar maupun dalam negeri. Pemindahan sementara itu beralasan dalam hal, pertama, keadaan tidak aman yang terdapat di Jakarta. Kedua, untuk menyempurnakan organisasi dalam negeri ...”	√	
16	58/API10/Jan/11	Negara RI yang masih bayi , baru lahir pada 17 Agustus 1945, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus. Sama seperti bayi yang dirawat dalam ruang inkubator , RI waktu itu membutuhkan perlindungan khusus supaya dapat bertumbuh dan melewati masa masa kritisnya. Untuk itu, Yogyakarta yang paling tepat menjadi inkubulator bagi bayi RI.	√	
17	63/DDI/12/Jan/11	Seperti yang dikatakan Ketua PWI DIY, Drs. Sihono HT Msi (KR, 11/12/2010), bahwa untuk membuat rumusan perpaduan antara konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa yang nantinya menjadi buku panduan peliputan wartawan anggota PWI di area Yogya, bukanlah hal mudah adalah benar adanya. Sebagai sebuah konsesus nantinya menjadi panduan kerja-kerja jurnalistik di wilayah Yogyakarta, konsesus ini yang harus berdiri di atas kesepakatan <i>stake holders</i> kewartawanan, ilmuwan komunikasi, praktisi komunikasi, ilmuwan budaya dan aktivis budaya. Dengan beragamanya aktor yang ikut terlibat dalam perumusan konsesus JIY ini, bukan tidak mungkin perdebatan konseptual dan praktikal akan memakan waktu yang tidak pendek, padahal, urgensitas konsesus ini diburu waktu. Memang, problem waktu tidak seharusnya membatasi kualitas dan mutu konsep konsesus JIY ini.	√	
18	77/MKP/20/Jan/11	Dalam 5 tahun terakhir kita digoncang dengan berbagai peristiwa. Kita masih ingat tahun 2006 masyarakat Bantul DIY mengalami peristiwa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan. Peristiwa gempa bumi tersebut juga sebuah momentum untuk memicu perubahan kesadaran dan posisi diri. Dengan kearifan lokalnya masyarakat Bantul bangkit pasca gempa 2006. Namun mereka tidak sekedar bangkit untuk kembali ke titik semula. Tumah-rumah tidak hanya	√	

19	79/MKP/20/Jan/11		<p>diperbaiki seperti sediaan. Program rekonstruksi telah memperbaiki konstruksi bagaimana rumah tahan gempa itu seharusnya dibangun. Sekarang kita dapat melihat realitas hasil. Rumah-rumah penduduk di Bantul menjadi relatif lebih asri dan sehat. Lingkungan dan infrastruktur lebih baik. Semua itu telah melampaui titik kondisi sebelum gempa.</p> <p>Erupsi Merapi mengantar kita menuju kesadaran baru bagaimana memahami bahasa Merapi seraif mungkin, dan Erupsi Monarki mengantar kita sejenak kembali mendalami arti keistimewaan Yogyakarta. Sama dengan 2006 di Bantul peristiwa ini juga sedang dan akan menjadi momentum penguah kesadaran diri. Bagaimana kita dapat menjalani transformasi sehingga mampu melampaui kondisi dan posisi sebelum terjadi peristiwa erupsi. Kedua peristiwa itu sungguh mahal harganya. Rasanya terlalu mahal jika kita hanya ingin sekedar kembali sama ke titik semula. Bukan seperti keledai yang lebai. Kita bisa menjadi transformer-transformer yang mampu melihat visi kedepan untuk lebih mendekatkan pada cita-cita hidup bersama. Kita mempunyai sumber daya batin yang memungkinkan terjadinya lompatan yang melampaui titik semula. Sumber daya batin itu berupa keyakinan (belief) yang kuat. Keyakinan akan adanya kesejahteraan yang lahir dari pemahaman hakikat “Manunggaling Kawula Gusti”, “Memayu Hayuning Bawana” serta “Tahta untuk Rakyat”, berikut aktualisasinya dalam konteks kekinian.</p>				✓	
20	84/MKP/20/Jan/11		<p>Sabda tersebut jelas menginsyiratkan, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada posisi Raja yang mengemban kawula, sehingga segala ambisi yang ada hanyalah semata-mata untuk mensejahterakan rakyat diatas segala konteks kepentingan kelompok.</p>				✓	
21	85/MKP/20/Jan/11		<p>Dalam amanat tersebut 5 September 1945 Sri Sultan HB IX, membahasakan istimewa dalam kerangka NKRI. Amanat tersebut telah menepis stigma mitos monarkis yang serba magis, mitologis yang seolah-olah eksklusif. Keraton dalam realitasnya bisa inklusif lebih adaptif & aspiratif. Oleh karenanya Keraton hadir sebagai simbol, tanda dan sarana pengayom dinamika kehidupan bersama antara Raja dan Kawula, antara kawula dengan kawula serta dinamika internal Keraton dalam keluhuran integritas untuk siap diteladani.</p>				✓	
22	92/PKK/27/Jan/11		<p>Kemampuan menggali kebenaran sejarah secara obyektif dan ilmiah sangat diperlukan, sebab sudah sekian lama sejarah dipelintir untuk kepentingan politik. Antara “<i>history</i>” (sejarah) dan “<i>his story</i>” (cerita orang) sudah sering diputarbalikkan. Mumpung ingatan kolektif tentang sejarah keistimewaan Yogya masih kuat, marilah kita tegakkan kebenaran tersebut.</p>				✓	
23	95/BKK/27/Jan/11		<p>Polemik penetapan versus pemilihan sebagai cara pengisian Gubernur/Wagub DIY ke depan pada dasarnya bukanlah polemik orisinal, melainkan sengaja dipolemikkan. Penetapan itu, yang dianggap anti-demokrasi oleh pihak pembikin polemik lebih mewujudkan politisasi. Kejelasan fakta sejarah bahwa lebih dari 60 tahun hal tersebut bukanlah masalah namun sekarang ini dipermasalahkan</p>				✓	

24	104/BKK/27/Jan/11	<p>meniscayakan adanya “batu dibalik udang”.</p> <p>Yogyakarta adalah benteng terakhir keindonesiaan; demikian semua peserta sampai-sampai peserta Jawa Timur menjamin, jika keistimewaan Yogyakarta mau dikutak-kutik “Blitar sampai Banyuwangi” siap membela. Peserta asal Kalimantan Tengah, Makassar dan Tanah Sunda pun terang benerang mendukung penetapan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam. Namun, sejumlah doktor yang bekerja di Yogyakarta justru berketetapan melakukan transformasi Yogyakarta demi Indonesia dengan cara pengisian Gubernur DIY melalui pilkadal atas nama demokrasi; sambil “membuang ke atas” Sultan dan Sri Paduka sebagai Paradya atau Gubernur Utama. Mereka – boleh jadi – telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas Yogyakarta sesungguhnya lebih melucuti Yogyakarta dari nada keindonesiaannya.</p>	√	
25	109/PDD/28/Jan/11	<p>Bangsa Indonesia pernah mengalami demokrasi liberal yang kemudian direduksi oleh Bung Karno, presiden pertama RI menjadi Demokrasi Terpimpin. Dalam era Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto demokrasi terpimpin di modifikasi menjadi Demokrasi Pancasila yang diintegrasikan dengan ajaran Eka Prasetya Panca Karsa dalam suatu jaban Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dengan berbagai nilai positif dan negatifnya kedua tipologi demokrasi tersebut memiliki tuntunan yang jelas dan terarah. Sementara dalam era Reformasi sekarang ini demokrasinya tidak memiliki format yang terukur. Di satu sisi ada pemanjaan di kalangan rakyat, dan di sisi lain ada kendali kuat dari pusat kekuasaan yang bersembunyi di belakang legalitas konstitusional. Dalam kondisi ketiadaan format demokrasi seperti ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di arena pertarungan massal antara pendukung kebijakan pemerintah dengan pemilik <i>Kedaulatan Rakyat</i>. Tanda-tanda ke arah itu sebenarnya sudah tampak dengan berbagai bentuk demonstrasi massa menentang kebijakan penguasa di berbagai daerah yang sering berekses anarkhis. Kalau kekuatan massa tersebut itu terakumulasi secara nasional dalam satu gerakan maka akan terjadi kekacauan di negara tercinta ini.</p>	√	√
26	115/SKY/29/Jan/11	<p>Sekarang, keistimewaan Yogyakarta tidak pernah dilihat dalam ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Apabila kita cermati bahwa ada sisi lain yang menarik yang dapat menunjukkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang lebih humanis. Hal itu terbukti dari predikat Yogyakarta yang mampu mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan kalangan masyarakat banyak. Sisi kebhinekaan Yogyakarta pun terbukti dengan berdirinya berbagai asrama daerah dari Sabang sampai Merauke dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 33 asrama daerah yang dibangun di tanah Yogyakarta. Daerah mana yang ada di Indonesia memiliki asrama daerah yang beragam seperti di Yogyakarta. Sisi lain yang menarik adalah berbagai jenis plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia hanya Yogyakarta yang memiliki keanekaragamannya. Apabila mengamati plat nomor kendaraan kita dapat melihat ada berbagai macam ragamnya seperti BG, G, AB, L, R, B, AG, M, S, dll. Hal tersebut menunjukkan bahwa</p>		√

27	118/SK Y/29/Jan/11	<p>Yogyakarta adalah kota istimewa, banyak mahasiswa dan pelajar membawa kendaraan dari daerah asal mereka dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta karena kecintaan mereka terhadap kota Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta bukan sekedar suatu fakta sejarah dan cerita masa lalu. Tetapi Keistimewaan Yogyakarta dapat terlihat dari denyut kehidupan masa kini dan yang akan datang. Sesungguhnya Yogyakarta telah menjadi ikon Indonesia mini harusnya mendapatkan penghargaan, perlindungan dan jaminan dari pemerintah tetapi di era pemerintahan SBY malah ingin mencoba untuk mencabut akar historis dari keistimewaan itu sendiri.</p> <p>Beberapa warisan kebudayaan tersebut telah menginspirasi daerah-daerah di Indonesia untuk ikut memperjuangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya diikuti oleh alat musik angklung dari Jawa Barat juga mendapatkan pengakuan oleh UNESCO tahun 2010 sebagai warisan budaya dunia tak benda. Demokrasi dan politik tanpa dilandasi sisi kemanusiaan yang didalamnya mengandung toleransi, kerja sama, kepedulian, dialog dan penghormatan hanya akan menyebabkan disharmonis dan ketegangan.</p>				√	
JUMLAH							
			-	9	1	19	

Lampiran 5. Elipsis dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*

No.	Nomor Kartu Data	Data
1	06/65T/04/Jan/11	Keraton juga menanggung biaya para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Keuangan RI dalam kondisi sangat buruk. Untuk pembiayaan ini, jumlah yang dikeluarkan oleh Keraton diperkirakan mencapai jutaan gulden. Hal <u>ini</u> juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan <u>menyumbangkan</u> tenaga, makanan dan harta benda.
2	23/ AKY/05/Jan/11	Bukan kebutuhan Yoga berstatus daerah istimewa. Pada 19/8/1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan sembilan <u>provinsi</u> , di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jawa tengah tak mencakup Kooti Surakarta maupun Yogyakarta. Kooti dilanjutkan dan berhubungkan langsung dengan Presiden RI. Bung Karno juga berkirim telegram bahwa HB IX dan PA VIII tetap dalam kedudukannya serta bertanggungjawab atas keselamatannya Yoga sebagai bagian RI. Tampaknya ‘Piagam Kedudukan’ ini dihasilkan setelah ‘Presiden Soekarno berbicara di ‘belakang layar’ dengan wakil-wakil Kooti, sesuai saran Otto Iskandar Dinata (Setneg, 1995: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, hlm. 470).
3	36/SMK/06/Jan/11	Pada jalur demokrasi perwakilan, mayoritas fraksi DPRD Provinsi DIY (13/12/2010) dan DPRD Kabupaten Bantul (18/12/2010) resmi bersikap bahwa HB X dan PA IX ditetapkan sebagai gubernur-wagub tanpa pemilihan. Saat konfigurasi serupa terjadi di tiga <u>kabupaten</u> (Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo) dan Kota Yoga maka Partai Demokrat tak dapat mengendalikan koalaborasi ‘parpol koalisi dan oposisi’ di DIY.
4	49/KYE/08/Jan/11	Dengan demikian DIY, pada satu sisi mentaati konsensus nasional dalam bidang hukum dan perundang-undangan, kebijakan luar negeri, dan pendanaan pembangunan. Di sisi lain Yogyakarta mengatur dirinya sendiri, berdasarkan hak atas kedaulatan sebagai bekas kerajaan, oleh karena itu, kepemimpinan dipegang langsung oleh Sultan dan Paku Alam yang sedang jumeneng. Kenyataannya DIY dalam banyak hal malah menjadi barometer tegaknya demokrasi. Perilaku demokratis justru banyak diteladankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX dalam menyelesaikan <u>persoalan</u> sosial, politik, keamanan dan budaya. Dari Yogyakarta, penerapan sistem demokrasi dibangun atas semboyan “Tahta untuk kesejahteraan rakyat”.
5	51/KYE/08/Jan/11	Perubahan besar yang didorong oleh (force of change), yaitu <u>krisis</u> ekonomi, demokratisasi, desentralisasi dan tuntutan akan transparansi dan pertanggungjawaban telah melahirkan UU No 32/2004, No. 33/2004 dan No 25/2004 bertujuan memberikan peran yang lebih besar pada pemerintahan daerah dan masyarakat untuk membangun daerahnya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong reformasi pemerintahan disegala bidang yang berimplikasi terhadap disegala kebutuhan perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang lebih bersifat desentralistik dan partisipatif.
6	63/DDI/12/Jan/11	<u>Seperti</u> yang dikatakan Ketua PWI DIY, Drs. Sihono HT Msi (KR, 11/12/2010), bahwa untuk membuat rumusan perpaduan antara konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa yang nantinya menjadi buku panduan peliputan wartawan anggota PWI di area Yoga, bukanlah hal mudah adalah benar adanya. Sebagai sebuah konsesus nantinya menjadi panduan kerja-kerja jurnalistik di wilayah Yogyakarta, konsesus ini yang harus berdiri di atas kesepakatan <u>stake holders</u> kewartawanan, ilmuwan komunikasi, praktisi komunikasi, ilmuwan budaya dan aktivis budaya. Dengan beragannya aktor yang ikut terlibat dalam perumusan konsesus JIY ini, bukan tidak mungkin perdebatan konseptual dan praktikal akan memakan waktu yang tidak

		pendek, padahal, urgensiitas konsensus ini diburu waktu. Memang, problem waktu tidak seharusnya membatasi kualitas dan mutu konsep konsensus JIY ini.
7	68/DDI/12/Jan/11	Wartawan yang bertugas di <i>Yogya kudu</i> memahami secara mendasar sejarah, potensi wisata, identitas kota, fenomena geologi dan perkembangan budaya. Wartawan sebagai mata keadilan dan kebenaran. Wartawan menulis dengan fakta bukan fiksi. Wartawan mendorong berita yang pro pada penguatan kohesi sosial dan rakyat marjinal. Wartawan mendorong dan mencari berita yang menguatkan peradaban kota. Jika ini dikawinkan dengan konsep nilai-nilai Jawa sebagai batu penjurru yang merepresentasi nilai-nilai <i>universal</i> kemanusiaan, maka jurnalisme model ini layak disebut istimewa.
8	69/DDI/12/Jan/11	Dalam konteks panduan implementatif, ada banyak parameter yang dapat dimasukkan. <i>Pertama</i> , penulisan berita yang mendukung identitas kota lengkap dengan <i>guidance</i> -nya. <i>Kedua</i> , karya jurnalistik harus mendukung kohesi sosial. Publik membaca kritik bukan dari deretan kata dan kalimat yang menyerang, vulgar, kotor dan kasar, tapi pembaca dapat merasakan sebuah kritik dari penyusunan diksi kata yang bertumpu pada kehadiran gagasan yang jernih, orientasi isinya membangun, bukan menghancurkan. Kritik jenis ini merepresentasikan keluhuran budi dan kewaskitaan sebagai manusia, meminjam Indra Tranggono. <i>Ketiga</i> , tulisan informasi geologi sebaiknya memuat hal preventif, <i>emergency</i> dan liputan rehabilitasi yang sigi dengan warna <i>mayayu hayuning bawana</i> .
9	88/PKK/71/Jan/11	Sajian angka-angka statistik dan prosentase-prosentase adalah ciri khas demokrasi prosedural. Karena itu setiap kali diadakan pemilihan umum senantiasa ada prediksi-prediksi dan berbagai analisis perhitungan cepat (<i>quick count</i>). Namun apa yang muncul sebagai data kuantitatif tak selalu sinkron dengan data yang bersifat kualitatif. Praktik demokrasi pasca Reformasi baru mengantarkan kita pada pencapaian kuantitas dan belum kualitas, baru berdemokrasi secara prosedural dan belum secara substansial.
10	98/BKK/27/Jan/11	Dalam praktik serba aksesoris itulah demokrasi sulit menghasilkan sebuah kepemimpinan, melainkan cukuplah sebagai pabrik kekuasaan dan kepejabatan. Demokrasi di negeri kita dalam sejumlah reformasi adalah pabrik pengolah <i>the wrong men in the right place</i> dimana capaian-capaian ditempuh melalui mekanisme anti-demokrasi. Tirani “Duwitologi” dan represi figur tunggal penentu sebuah partai runyam mengendali pendidikan politik untuk mencapai keandalan masyarakat sipil. Partai, dengan begitu juga demokrasi, sebagai sarana dan wahana demokratisasi adalah nonsense. Partai hanyalah dominan menjadi alat memburu nafkah dan memperkaya diri, menubar pesona sekaligus dimana mungkin sebagai katrol neofeodalisme dimana “gembel” merajakan diri sedangkan raja sendiri merakyatkan dirinya.
11	104/BKK/27/Jan/11	Yogyakarta adalah benteng terakhir keindonesiaan; demikian semua peserta sampai peserta Jawa Timur menjamin, jika keistimewaan Yogyakarta mau dikutak-kutik “Blitar sampai Banyuwangi” siap membela. Peserta asal Kalimantan Tengah, Makassar dan Tanah Sunda pun terang benerang mendukung penetapan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam. Namun, sejumlah doktor yang bekerja di Yogyakarta justru berketetapan melakukan transformasi Yogyakarta demi Indonesia dengan cara pengisian Gubernur DIY melalui pilkadal atas nama demokrasi; sambil “membuang ke atas” Sultan dan Sri Paduka sebagai Paradya atau Gubernur Utama. Mereka – boleh jadi – telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas Yogyakarta sesungguhnya lebih melucuti Yogyakarta dari nada keindonesiaannya.

12	113/DPP/28/Jan/11	<p>Kalaulah demokrasi mau diterapkan di DIY, ada benang merah yang bisa diterapkan dengan sistem pemilihan tidak langsung. Berdayakan DPRD sebagai presentasi rakyat untuk menentukan dan mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka terlaksananya desentralisasi formil, materiel dan riil bersama pemerintah DIY. Hal mana sudah disikapi oleh DPRD DIY dalam sidangnya tanggal 13 Desember 2010 bahwa semua fraksi (kecuali FPD) sepakat untuk Gubernur DIY tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tapi dengan penetapan. Manusia merencanakan, Allah juga punya rencana, tapi sebaik-baik rencana adalah rencana Allah SWT.</p> <p>Berdasarkan hasil sidang di DPR RI terkait pembahasan RUU DIY, pada hari Rabu 26 Januari 2011 kemarin menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk “menghabisi” keistimewaan Yogyakarta pada sisi politik dan budaya nampak terlihat dengan jelas. Pada sisi politik, apabila kita mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin meredukasi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di Yogyakarta. Sedangkan pada sisi budaya, pemerintah hanya menganggap Yogyakarta sebatas sebagai provinsi yang sama dengan propinsi lain. Keistimewaan Yogyakarta dianggap hanya sekadar warisan sejarah dan budaya pada masa dinasti Sultan Hamengku Buwono IX saja. Di tengah-tengah euforia demokrasi dan pemilihan langsung, suara rakyat sudah tidak lagi menjadi bagian dari esensi demokrasi. Kepentingan penguasa lebih utama dari pada mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY tampaknya sudah mendekati pemerintahan bertangan besi dan ber-rejim pemilihan. <i>Kedaulatan Rakyat</i> sudah tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan partai, penguasa dan pengusaha. Sistem perwakilan yang telah dianut oleh negeri ini telah gugur dengan sendirinya ketika para wakil rakyat dan lembaga perwakilan rakyat lainnya sudah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lalu apa istimewanya negeri ini?</p> <p>Ambisi pemerintah yang tetap menginginkan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta merupakan proses pemaksaan kepentingan yang bersumber dari perlawanan ideologi yang tidak demokratis di suatu negara demokrasi. Dalam hal ini, pemerintah sudah kalah karena dasar yuridis konstitusional dan historis sangat lemah untuk menunjukkan kepentingannya melakukan demokratisasi dengan cara pemaksaan. Fakta lain yang menunjukkan keistimewaan Yogyakarta adalah pergerakan reformasi pada tahun 1997 juga lahir dari rahim kota Yogyakarta, berbagai elemen masyarakat, organisasi, intelektual muda, dan praktisi merapatkan barisannya untuk menggelorakan gerakan reformasi pada masa itu bertitik toak dari Yogyakarta.</p>
13	114/SKY/29/Jan/11	
14	116/SKY/29/Jan/11	
15	121/SKY/29/Jan/11	<p>Sisi lain keistimewaan Yogyakarta adalah keinginan rakyat untuk tetap bisa menikmati hari esok yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, adanya pendidikan yang murah dan merakyat dan jaminan kesehatan yang lebih baik bukan untuk ikut pemilu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya bisa sehat, cerdas, dan waras.</p>

Lampiran 6. Konjungsi dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*

No.	Nomor Kartu Data	Data	Penanda Kohesi																					
			KSA	KPT	KK	KPK	KKO	KT	KPN	KPI	KH	KU	KPL	KW	KS	KC								
1	01/65T/04/Jan/11	Tanggal 4 Januari 2011 ini genap 65 tahun berdirinya Republik Jogja. Kebetulan tahun ini akan dibahas Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang kontroversi dan menegangkan lantaran sikap pemerintah yang tercermin dalam RUUK tersebut dinilai kurang memahami peran dan posisi Sultan serta jiwa kemerdekaan masyarakat Yogyakarta.															√							
2	02/65T/04/Jan/11	Republik Jogja adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut periode ketika kedudukan ibukota Republik Indonesia berada di Yogyakarta, yaitu antara tanggal 4 Januari 1946 sampai tanggal 27 Desember 1949. Selama tiga tahun Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman menjadi tulang punggung yang menopang jalannya pemerintahan dan kelanjutan perjuangan RI.																√						

3	04/65T/04/Jan/11	<p>Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ibukota RI berpindah ke Yogyakarta. Tawaran yang dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946 itu disambut baik oleh pemerintah di Jakarta. Pemindehan ibukota ke Yogyakarta ini berhasil membuat rada pemerintahan yang sebelumnya macet menjadi berjalan kembali. Tawaran Sultan HB IX ini mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Saat itu haya Sultan HB IX saja yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat pemerintahan RI. Tidak ada pemimpin daerah lain yang berani seperti itu.</p>														
4	05/65T/04/Jan/11	<p>Pemindehan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan Kereta Luar Biasa (KLB), karena jadwal perjalanannya dilakukan di luar jadwal yang ada. Setibanya para pemimpin di Yogyakarta, roda pemerintah langsung digulirkan. Hal ini bisa dilakukan karena tata pemerintahan di Yogyakarta</p>	√													

		<p>lengkap. Tidak hanya itu. Untuk melanjutkan perjuangan RI mengusir Belanda melalui perlawanan fisik, Keraton yang masih memiliki logistik persenjataan cukup lengkap juga memberikan setidaknya 1.440 pucuk senjata api kepada pasukan RI. Pembagian bantuan diberikan setiap bulan sampai Yogyakarta kembali ke tangan RI. Tindakan tersebut adalah suatu kebijaksanaan seorang negarawan besar. Sri Sultan HB IX menyimpan ungu Belnada tidak untuk kepentingan sendiri atau keluarganya tetapi untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan tanah air.</p>								
8	09/65T/04/Jan/11	<p>Selama periode Republik Jogja, perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga berlangsung dengan gencar dan efektif, baik dalam bentuk gerilya maupun perundingan. Pada periode ini pula Yogyakarta dengan jiwa kemerdekaannya memegang peran penting dalam mempertahankan kelangsungan</p>								

9	10/65T/04/Jan/11	RI. Dalam masa itu pula, terjadi beberapa peristiwa penting yang diprakarsai dari tokoh-tokoh di Yogyakarta. Di antaranya, adalah pengakuan defacto Kerajaan Belanda terhadap keberadaan RI dalam Perjanjian Linggarjati, dan pengakuan <i>dejure</i> dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebelumnya, dunia internasional dikejutkan dengan Serangan Umum Satu Maret di Yogyakarta.												√					
10	12/65T/04/Jan/11	Kini, setelah 65 tahun berdirinya Republik Jogja, heroime, patriotisme, dan jiwa kemerdekaan rakyat Yogyakarta seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno sendiri mulai diragukan. RUUK yang disusun pemerintah pusat dan telah diserahkan kepada DPR tidak selaras dengan kenyataan sejarah, bahkan terkesan merendahkan peran dan posisi Sultan serta jiwa dan semangat nasionalisme rakyat Yogyakarta. Sikap pemerintah pusat yang bertentangan dngan peran dan jasa Sultan dan rakyat												√					

16	18/AKY/05/Jan/11	<p>terbunuh. Semarang, Surabaya juga dikuasai tentara Sekutu.</p> <p>Selain berintegrasi dengan Indonesia, HB IX dan PA VIII juga menyiapkan kerajaannya jadi 'suaka' para pemimpin Indonesia. HB IX menyambut kedatangan Soekarno-Hatta di Stasiun Tugu. Sejarahwan menyebut tak kurang 5 juta Gulden HB IX membiayai pemerintahan RI 1946-1950, misalnya untuk kantor presiden (Gedung Agung) di tanah milik HB IX, logistik gerilyawan, maupun biaya hidup para pemimpin Indonesia.</p>	√																	
17	19/AKY/05/Jan/11	<p>Meski Yogya berhasil dikuasai tentara Belanda (agresi 19/12/1948) dan Soekarno-Hatta akhirnya ditawan dan diasingkan, tetapi mandat Pemerintah Darurat RI dipegang Sjafoedin Prawira negara di Bukit Tinggi (Sumbar), sedangkan diplomasi politik dan taktik perang gerilya (1948-1949) dari Yogya membuahkan hasil. Atas nama RI, HB IX menerima pengakuan Belanda atas</p>	√																	

18	20/ AKY/05/Jan/11	kedaulatan Indonesia (27/12/1949). Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku <u>dan</u> Yogyakarta dijadikan ibu kota Negara Bagian RI dengan Acting Presiden Assaat (Desember 1949 Agustus 1950). Soekarno-Hatta-Wapres RIS.							√								
19	21/ AKY/05/Jan/11	RIS berumur pendek. Memanfaatkan Pasal 186 Konstitusi RIS <u>maka</u> Negara Sumatera Timur, Negara Bagian RI <u>dan</u> Negara Indonesia Timur menyepakati negara kesatuan <u>dan</u> membentuk panitia perancang konstitusi. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (RI-Yogya) menyetujui rancangan konstitusi (128/1950), disusul Senat <u>dan</u> DPR RIS menerbitkan UU Nomor 7/1950 untuk melaksanakan UUD Sementara sejak 17/8/1950.	√														
20	22/ AKY/05/Jan/11	Negari Ngayogyakarta adalah suatu pemerintah tahan daerah swapraja, yang diatur Zelfbestuurregelen 1933 pada masa Hindia Belanda <u>dan</u> ditetapkan sebagai Kooti oleh penguasa militer Jepang. HB IX memiliki persoalan							√								

21	23/ AKY/05/Jan/11	<p>sendiri, misalnya harus menandatangani Perjanjian 1940 dengan Belanda yang membuatnya hampir tentara oleh penguasa militer Jepang.</p> <p>Bukan kebetulan Yogya berstatus daerah istimewa. Pada 19/8/1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan sembilan provinsi, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah <u>dan</u> Jawa Barat, Jawa Tengah tak mencakup Kooti Surakarta maupun Yogyakarta. Kooti dilanjutkan <u>dan</u> berhubungan langsung dengan Presiden RI. Bung Karno <u>juga</u> berkirim telegram bahwa HB IX <u>dan</u> PA VIII tetap dalam kedudukannya <u>serta</u> bertanggungjawab atas keselamatannya Yogya sebagai bagian RI. Tampaknya 'Piagam Kedudukan' ini dihasilkan <u>setelah</u> 'Presiden Soekarno berbicara di 'belakang layar' dengan wakil-wakil Kooti, sesuai saran Otto Iskandar Dinata (Setneg, 1995: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, hlm. 470).</p>																		
----	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	24/ AKY/05/Jan/11	<p>Sebelumnya (15/7/1945), status kerajaan dibahas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dapat dimengerti. Wakil-wakil Yogyakarta dan Surakarta menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Anggota BPUPKI Soepomo menguraikan konsep negara kesatuan yaitu tanpa 'negara bawahan' (onderstaat), hanya ada daerah-daerah pemerintahan dan bukan staat.</p>	√	√	√	√					
23	25/ AKY/05/Jan/11	<p>Bentuk pemerintahan di daerah akan diatur undang-undang dengan mengakui kerajaan Sultanaat atau Kooti di Jawa dan luar Jawa, maupun daerah kecil bersusunan asli seperti desa, marga, nagari, huta/kuria atau gampong (Setneg, 1995:271-272). Moh Yamin juga mengusulkan pembentukan kementerian urusan Kooti dan Bung Hatta menyatakan kebutuhan UU tentang Kooti. Tetapi PPKI (19/8/1945) menolak usul wakil Yogya Poeroebojo agar 'Kooti disahkan 100% zelfstanding (berdiri sendiri) karena bentuk negara</p>	√	√	√	√					

		<p>pekerja yang dipilih dari para anggotanya (19/10/1945). Lembaga baru ini bertugas sebagai badan legislatif yang turut menentukan haluan pemerintah daerah di masa perang. Kepada 'segenap penduduk dari segala bangsa' di Yogyakarta keduanya menyatakan, menyelaraskan penyelenggaraan pemerintah di Yogyakarta dengan konstitusi. Negara Ngajogyakarta bermentamorfosis sebagai monarki konstitusional.</p>									
29	31/SMK/06/Jan/11	<p>Keduanya mengakui <u>dan</u> menetapkan BP KNID sebagai lembaga perwakilan rakyat yang akan membuat undang-undang <u>dan</u> arah menentukan penyelenggaraan pemerintah di Yogyakarta sesuai aspirasi rakyat (Amanat 30/10/1945). <u>Setelah</u> Yogyakarta menjadi ibu kota RI masa perang (Januari 1946-Desember 1949), HB IX <u>dan</u> PA VIII melanjutkan 'demokratisasi'. Dengan persetujuan BP KNID keduanya menerbitkan aturan pembentukan DPRD provinsi, kota, kabupaten <u>dan</u> kalurahan di Yogyakarta</p>		√							

32	34/SMK/06/Jan/11	<p>HB IX <u>dan</u> wakil kepala daerah pada PA VIII. Menurut Pasal 88 ayat (2) UU Nomor 18/1965, kedudukan HB IX <u>dan</u> PA VIII tidak terikat jangka waktu masa jabatannya. Pasal 91b UU Pemda 1974 bahkan menyatakan, keduanya tidak terikat pada syarat <u>dan</u> tata cara pengisian gubernur/wagub yang berlaku di daerah lain.</p>													
		<p>Kemudian penjelasan Pasal 122 UU Nomor 22/1999 bergeser. Isi keistimewaan Yogy adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan wagub dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat undang-undang ini. Pergeseran ini diakui oleh Pasal 226 UU Nomor 32/2004 di masa Presiden Megawati, meski MPR tahun 2000 mengharuskan gubernur, bupati atau walikota dipilih secara demokrasi (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945).</p>													

33	35/SMK/06/Jan/11	<p>Sekarang HB X dan PA IX dihadapkan kepada pilihan dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta, yaitu untuk ikut proses pemilihan eksekutif atau ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Utama sebagai simbol keistimewaan. Tawaran pemerintah ini konon didukung 70 persen responden hasil survei. Namun survei Kompas menunjukkan, bahwa 55-70 persen warga Yogyakarta menyetujui penetapan HB X dan PA IX sebagai gubernur-wagub DIY.</p>	✓								✓	✓								
34	36/SMK/06/Jan/11	<p>Pada jalur demokrasi perwakilan, mayoritas fraksi DPRD Provinsi DIY (13/12/2010) dan DPRD Kabupaten Bantul (18/12/2010) resmi bersikap bahwa HB X dan PA IX ditetapkan sebagai gubernur-wagub tanpa pemilihan. Saat konfigurasi serupa terjadi di tiga kabupaten (Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo) dan Kota Yogyakarta maka Partai Demokrat tak dapat mengendalikan kalaborasi ‘parpol koalisi dan oposisi’ di DIY.</p>	✓								✓									

35	37/SMK/06/Jan/11	<p>Transformasi Yogya selama 65 tahun mungkin sudah melahirkan 30-an persen warga Yogya yang tak menghendaki gubernur-wagub dijabat keturunan HB IX <u>dan</u> PA VIII. Kemungkinan lain, sejak masa tumpah-ruah dalam Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara pada bulan Mei 1998, sudah 70-an persen warga Yogya menghendaki HB X <u>dan</u> PA IX ditetapkan sebagai gubernur-wagub.</p>															√									
36	38/SMK/06/Jan/11	<p>HB IX <u>dan</u> PA VIII telah menggulirkan transformasi bagi kerajaannya <u>dan</u> bersama masyarakat Yogya mengaruhi gelombang besar keindonesiaan. <u>Namun</u> tinta sejarah belum kering untuk menuturkan masa depan Yogya dalam konstitusionalisme Indonesia.</p>																√								
37	39/KYE/08/Jan/11	<p>Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat <u>dan</u> Kadipaten Pakualaman, baik secara de jure maupun de facto telah memiliki pemerintahan yang teratur dengan pembagian wilayah yang bersifat administratif sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan</p>																√								

		<p>Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 5 September mengeluarkan maklumat bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam yang berbentuk kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.</p>	✓				
38	40/KYE/08/Jan/11	<p>Mencermati dasar hukum keistimewaan Yogyakarta, sudah jelas yakni ada pada kepala daerah (gubernur) dari keturunan Sultan, dan wkaail kepala daerah (wagub) dari keturunan Puro Pakualaman. Jika ada pemahaman bahwa kepala daerah dan wakilnya bisa dari orang umum, maka keistimewaan Yogy akan hilang, karena provinsi DIY tidak ada bedanya dengan provinsi yang lain.</p>	✓				
39	41/KYE/08/Jan/11	<p>Mari kita cermati kembali pengakuan negara terhadap keistimewaan Yogyakarta yang terkandung di dalam</p>	✓				

40	42/KYE/08/Jan/11	<p>piagam Kedudukan yang diberikan negara kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka paku Alam VIII, pada tanggal 19 Agustus 1945 isi Piagam kedudukan Keistimewaan Yogyakarta itu, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno menetapkan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta. Bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Jadi ketentuan ini sudah jelas, sehingga jangan diinterpretasikan lagi yang justru membuat bingung masyarakat.</p>						√	√						
		<p>Kompetensi Sultan HB IX dan PA VIII juga berlandaskan amanat 30 September 1945 yang menunjukkan tetap menyatakan diri dengan RI, seperti tersebut dalam</p>													

41		43/KYE/08/Jan/11	amanatnya yang intinya, sepatok dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, <u>agar</u> jalannya pemerintah daerah Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara RI.																				
			Sekarang mari kita cermati bersama era demokrasi yang kini sedang marak, menurut demokrasi liberal pada dasarnya eksistensi kekuasaan adalah sebagai hasil dari sebuah konsensus bersama. Sehingga ditunjukkan sekelompok orang untuk mengatur jalannya tertib dan damaiannya perikehidupan dalam masyarakat. Sekelompok orang ini mestinya sadar betul <u>bahwa mereka</u> adalah penerima mandat orang banyak, untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, demi kemajuan bersama. Bukan kemajuan sekelompok-kelompok yang berkuasa semata.																				
42		44/KYE/08/Jan/11	Demokrasi liberal mempunyai indikator yang																				

43	45/KYE/08/Jan/11	<p>tegas mengenai peralihan kekuasaan. Yakni, pertama, adanya rotasi kekuasaan. Kekuasaan tidak dimaknai sebagai suatu sistem yang permanen dan terus menerus melekat pada seseorang (pemimpin), tetapi dimaknai sebagai proses rekrutmen yang sehat, jujur, dan bersih. Dalam rekrutmen peralihan kekuasaan itu, setiap individu mempunyai hak untuk mengambil alih mandat kekuasaan secara elegan.</p>													
		<p>Kedua, adanya pembatasan masa (waktu) atas kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang terus menerus dilanggengkan ditengarai akan mempunyai dampak pada menumpulnya visi dan erosinya kepekaan penguasa terhadap persoalan-persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat luas. Kekuasaan seperti itu cenderung mempersonifikasikan kekuasaannya seolah-olah dirinya adalah kehendak dan kemauan masyarakat, atas nama masyarakat, sehingga mudah terjebak pada pola-pola penanganan secara</p>													

44	46/KYE/08/Jan/11	<p>pragmatis tanpa dibarengi observasi yang mendalam.</p> <p>Ketiga, adanya aksesibilitas publik terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, publik juga diharapkan mempunyai akses yang sama dengan pihak-pihak lain untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan konsensus yang telah disepakati bersama. Di sinilah kekuasaan dimaknai sebagai dari, oleh dan untuk rakyat. Sebab setiap individu yang menamakan dirinya elemen rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang wajar.</p> <p>Mari kita telaah secara jernih, sejak bergabung menyatukan diri dengan NKRI kepemimpinan di wilayah DIY langsung dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah dan Sri Paku Alam VII sebagai Wakil Kepala Daerah sampai akhir hayatnya. Selanjutnya pada pemilihan kepala daerah berikutnya yang menghasilkan Sri Sultan</p>																	√	
45	48/KYE/08/Jan/11																			√

	<p>Hamengku Buwono X sebagai kepala daerah dan Sri Paku Alam IX sebagai wakil sudah menggunakan UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 122 UU 22 Tahun 1999 menyebutkan, pengakuan keistimewaan DIY, didasarkan pada asal usul dan perannya sejarah perjuangan bangsa. Keistimewaannya adalah pengangkatan kepala daerah (gubernur) dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan dan wagub dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat dengan UU ini. Tatib Pilkada DIY pada waktu itu Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5, bakal calon adalah seorang atau lebih, dengan mempertimbangkan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono IX dan keturunan Paku Alam VIII yang dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan syarat menunjukkan kekancingan atau bukti.</p>

		<p>sebagai representatif pusat kekuatan masyarakat, kekuatan moral dan kultur dari kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian tiada batas dari masyarakat Yogyakarta hendaknya mampu dipahami oleh pemerintah pusat. Dengan demikian Yogyakarta sebagai daerah istimewa tetap harus dipertahankan, dan Undang-Undang Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya segera disahkan, dan Gubernur dan wakil Gubernur ditetapkan tidak perlu melalui pemilihan.</p>	√					√						
50	53/APII0/Jan/11	<p>Alasan pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke yogya sejak 4 Januari 1946 bukan hanya karena kondisi Jakarta sudah tidak aman. Memang benar bahwa kondisi di Jakarta darurat karena pasukan marinir Belanda sudah mendarat di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945 dan segera melancarkan aksi-aksinya untuk kembali merebut Indonesia. Tetapi, ada alasan lain, yang lebih</p>	√											

51	55/API10/Jan/11	<p>mendasar, yaitu untuk mendapatkan suasana kondusif bagi pembangunan pemerintah RI yang masih baru itu.</p> <p>“Sebelum kami menyiarkan beberapa pengumuman resmi, maka lebih dahulu kami menyampaikan salam nasional kita, Merdeka! Saudara-saudara, pertama kami atas nama Pemerintah mengumumkan dengan resmi bahwa mulai pagi ini tanggal 4 Februari 1946 sebagian dari Pemerintah Agung buat sementara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dari sebab itu mulai hari ini Presiden kita Bung Karno dan Wakil Presiden Bung Hatta buat sementara waktu berkedudukan di kota Mataram”</p>	√																	
52	56/API10/Jan/11	<p>“Berhubung dengan pemindahan sebagian dari Pemerintahan Agung ke Yogyakarta ini perlu agaknya diterangkan di sini, bahwa hal itu tidak usah menggoncangkan hati kita. Pemindahan ini tidak menjadi sebab untuk merubah pendirian Pemerintah terhadap luar maupun dalam</p>	√																	

53	57/APII0/Jan/11	<p>negeri. Pemindahan sementara itu beralasan dalam hal, pertama, keadaan tidak aman yang terdapat di Jakarta. Kedua, untuk menyempurnakan organisasi dalam negeri”</p> <p>“Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua, tadi untuk memindahkan buat sementara kedudukan Pemerintah Agung. Alasan itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan dari renovasi rakyat Indonesia pada masa ini. Sebab Pemerintahan Agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah Kota Mataram akan dapat melangsungkan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan di daerah-daerah. Bahwa penyempurnaan organisasi-organisasi itu sennatiasa di lakukan, terbuktiilah dari perubahan-perubahan dalam susunan Pemerintah Agung yang kami umumkan tadi</p> <p>Dengan demikian maka</p>	√	√			√						√
----	-----------------	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---

54	58/API10/Jan/11	koordinasi yang tersusun, yang menjadi syarat mutlak untuk berputarya roda pemerintahan dengan licin, akan lekas tercapai.” Negara RI yang masih bayi, baru lahir pada 17 Agustus 1945, membutuhkan perlindungan <u>dan</u> perawatan khusus. Sama seperti bayi yang dirawat dalam ruang inkubator, RI waktu itu membutuhkan perlindungan khusus <u>supaya</u> dapat bertumbuh <u>dan</u> melewati masa masa kritisnya. Untuk itu, Yogyakarta yang paling tepat menjadi inkubulator bagi bayi RI.						✓																
55	59/API10/Jan/11	Mengapa ? Karena Yogya merupakan sebuah negara monarki (Nagari Ngayogyakarta Hasiningrat) yang kokoh yang sudah eksis jauh sebelum negara RI lahir. Para penjajah – Belanda, Jepang – mengakui eksistensinya sehingga senantiasia harus membuat kontrak politik dengan Kasultanan Meskipun menyatakan berintegrasi dengan RI tidak lagi menjadi sebuah negara sendiri,						✓																

		<p>Kasultanan Yogyakarta memiliki kapasitas untuk melindungi Yogyakarta secara politis dan ekonomi – bahkan menggaji para pejabat dan pegawai RI.</p>													
56	60/API10/Jan/11	<p>Sistem pemerintahan asli dan kepemimpinan Sultan dan Paku Alam di Yogyakarta – sebagai sebuah nagari yang eksis selama ratusan tahun – memberi motivasi bagi para pemimpin RI untuk membangun organisasi barunya yang bernama republik itu. Itulah sebabnya Mr Ali Sastroamidjojo mengatakan bahwa dengan menjadikan Kota Mataram sebagai ibukota maka RI akan dapat melangsungkan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahannya.</p>	√				√			√					
57	61/API10/Jan/11	<p>Hal itu menunjukkan bagaimana kontribusi Yogyakarta dalam mengasuh, merawat, melindungi, dan membersarkan negara RI. Tanpa peran Yogyakarta seperti itu maka negara RI belum tentu masih ada dan berkembang seperti sekarang ini!!</p>	√				√								
58	62/DDI/12/Jan/11	<p>IDE PWI Yogyakarta untuk membuat macam kosensus</p>	√					√							

59	63/DDI/12/Jan/11	<p>jurnalisme bernuansa keistimewaan yang bertumpu pada akar budaya Jawa, menarik diperbincangkan. Jurnalisme Istimewa Yogyakarta (JIY) lahir dari pergumulan adanya peliputan media yang tak elok, bahkan cenderung tak berbudaya, kala erupsi Merapi terjadi. Padahal, masyarakat Yogyamat identik dengan lakon hidup yang bersandar pada falsafah hidup Jawa yang sarat nuansa spiritual, simbol, dan mutiara-mutiara kabijakan. Logika dan filsafat media yang belakangan ini makin buas, liar, materialistik, tak lagi seiring sejalan dengan dasar-dasar filsafat Jawa maupun etika jurnalisme. Mungkinkah konsensus JIY mengawinkan konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa? Bagaimana membentuk basis konsep dan panduan implementatifnya?</p>						
				√		√		

60		<p>menjadi buku panduan peliputan wartawan anggota PWI di area Yogyakarta, bukanlah hal mudah adalah benar adanya. Sebagai sebuah konsesus nantinya menjadi panduan kerja-kerja jurnalistik di wilayah Yogyakarta, konsesus ini yang harus berdiri di atas kesepakatan <i>stake holders</i> kewartawanan, ilmuwan komunikasi, praktisi komunikasi, ilmuwan budaya dan aktivis budaya. Dengan beragamanya_aktor yang ikut terlibat dalam perumusan konsesus JIY ini, bukan tidak mungkin perdebatan konseptual dan praktikal akan memakan waktu yang tidak pendek, padahal, urgensitas konsesus ini diburu waktu. Memang, problem waktu tidak seharusnya membatasi kualitas dan mutu konsep konsesus JIY ini.</p>	√	√			√					
	64/DDI/12/Jan/11	<p>Namun, berangkat dari realitas dan kompleksitas itu, kita perlu mencari strategi penyusunan konsep yang lengkap, cepat dan akurat, tanpa meninggalkan kualitas. Karena pokok tujuan dari</p>	√	√								

61		<p>konsep JIY ini akan dibukukan, maka persoalan format dan isi buku amat krusial diapungkan. Menurut saya, buku panduan ini sebisa mungkin simpel dalam format, kuat dalam isi konsep dan liat dalam praktikal. Ketiga elemen ini dapat dibuat <i>outline</i> buku seperti :</p> <p>1. Latar belakang: <i>hatrick</i> bencana; 2. Basis konsep: perkawinan jurnalisme dan budaya Jawa; 3. Panduan implementasi: setting, kualitas narasumber, pola penulisan dan lain-lain.</p>												
	65/DDI/12/Jan/11	<p>Seperti kejadian tiga bencana alam, bencana jurnalisme dan bencana politik di Yogya pada periode pra erupsi dan pasca erupsi Merapi yang terlihat akhir-akhir ini, menjadi latar belakang yang cukup sah untuk mengurai fakta yang sejatinya merupakan identitas dalam penulisan karya jurnalistik. Opini, dugaan, isu dan tuduhan, bukanlah aras jurnalistik. Jurnalistik identik dengan fakta dan data. Contoh peliputan yang tidak bernapaskan etika jurnalistik</p>	√											

65		<p>keadilan dan kebenaran. Wartawan menulis dengan fakta bukan fiksi. Wartawan mendorong berita yang pro pada penguatan kohesi sosial dan rakyat marjinal. Wartawan mendorong dan mencari berita yang menguatkan peradaban kota. Jika ini dikawinkan dengan konsep nilai-nilai Jawa sebagai batu penjurur yang merepresentasi nilai-nilai <i>universal</i> kemanusiaan, maka jurnalisme model ini layak disebut istimewa.</p>							√					
	69/DDI/12/Jan/11	<p>Dalam konteks panduan implementatif, ada banyak parameter yang dapat dimasukkan. <i>Pertama</i>, penulisan berita yang mendukung identitas kota lengkap dengan <i>guidance</i>-nya. <i>Kedua</i>, karya jurnalistik harus mendukung kohesi sosial. Publik membaca kritik bukan dari deretan kata dan kalimat yang menyerang, vulgar, kotor dan kasar, tapi pembaca dapat merasakan sebuah kritik dari penyusunan diksi kata yang bertumpu pada kehadiran gagasan yang jernih, orientasi isinya</p>												

66		<p>membangun, bukan menghancurkan. Kritik jenis ini merepresentasikan keluhuran budi <u>dan</u> kewaskitaan sebagai manusia, meminjam Indra Tranggono. <i>Ketiga</i>, tulisan informasi geologi sebaiknya memuat hal preventif, <i>emergency dan</i> liputan rehabilitasi yang sigi dengan warna <i>mayu hayuning bawana</i>.</p>							
	70/RDP/19/Jan/11	<p>Pro kontra wacana pemilihan <u>dan</u> penetapan gubernur <u>dan</u> wakil gubernur DIY terkait draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang dikemukakan pemerintah tampaknya belum akan berakhir. Sejauh ini pemerintah kelihatan begitu percaya diri bahwa draf RUUK yang diajukan akan mendapat pengesahan DPR. Keyakinan itu setidaknya didasarkan pada dua hal, pertama, pemerintah berpendapat <u>bahwa</u> gerakan massa yang termanifestasi dalam aksi mendukung penetapan hanyalah sebagian saja dari sikap keseluruhan masyarakat Yogyakarta. Kedua, <u>setelah</u> mengalami</p>							

67	71/RDP/19/Jan/11	<p>penundaan beberapa kali, akhirnya pemerintah mengajukan draf RUUK DIY ke DPR (16/12). Pengajuan dilakukan <u>setelah</u> sebelumnya pemerintah melakukan harmonisasi dengan partai-partai mitra koalisi yang sebelumnya memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah terkait dengan draf RUUK DIY.</p> <p>Kalau terjadi persamaan persepsi <u>dan</u> kesepakatan politik antara pemerintah <u>dan</u> fraksi-fraksi yang tergabung dalam mitra koalisi, <u>maka</u> dapat dipastikan draf RUUK DIY yang diajukan pemerintah akan berjalan mulus, <u>dan</u> tarik ulur kepentingan antara pemerintah dengan keraton <u>dan</u> masyarakat Yogyakarta dalam proses politik di DPR akan berakhir anti klimaks. <u>Namun</u> apapun hasil yang dicapai dalam proses politik di DPR, tetap akan meninggalkan luka sebagai hasil dari sebuah zero sum game politik. Pemerintah akan kehilangan muka apabila kalah dalam proses</p>	√	√	√	√					
----	------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

68	72/RDP/19/Jan/11	<p>ini, sebaliknya keraton dan masyarakat Yogyakarta akan luka berkepanjangan apabila fraksi-fraksi DPR berbalik arah dan mendukung draf pemerintah. Sebagai sebuah permainan, politik memang sukar ditebak, semuanya bisa berubah. Yang semula mendukung, bisa saja berbalik menentang. Sebaliknya yang semula menentang, bisa saja berbalik mendukung. Namun keistimewaan Yogyakarta senyatanya bukanlah semata soal politik. Di dalamnya terkandung masalah moral, harga diri dan identitas kultural.</p>						√			√					
		<p>Kalau banyak tokoh mengatakan pemerintah tidak tahu sejarah, hal ini dapat dimaknai bahwa pemerintah tidak menghargai dan tidak tahu membalas pada pengorbanan yang telah diberikan Raja Yogyakarta. Ini menyangkut masalah moral ketika itikad baik dan pengorbanan untuk mengintegrasikan diri dengan NKRI kemudian diabaikan. Bahkan sepeggal sisa</p>						√								

71	75/RDP/19/Jan/11	<p>bawalaksana. Dalam konsep ini, seorang raja adalah juga seorang pandhita yang ucapan dan perilakunya sangat terjaga. Rakyat sudah tentu tidak akan menerima bentuk perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat rajanya, dan tentu akan melakukan “perlawatan” untuk menjaga martabat dan harga diri rajanya.</p>													
		<p>Kesetiaan masyarakat Yogya pada Sultan dan Paku Alam bukan semata pada kedudukannya sebagai raja di Kesultanan dan Paku Alaman. Lebih dari itu, Sultan dan Paku Alam adalah simbol dan identitas kultural masyarakat Yogyakarta yang melekat pada pribadi Sultan dan Paku Alam sebagai raja sekaligus sebagai “Senopati Ing Ngalogo” dalam mengatur pemerintahan. Hal ini sudah tertanam lama dalam benak masyarakat Yogya sebagai suatu keistimewaan yang membedakan Yogyakarta dengan daerah lainnya di Indonesia. Oleh karenanya</p>	√												

		<p>memicu gerakan baru. Setiap momentum memberi kita kesempatan memperbaiki kesadaran dan posisi diri, bahkan memungkinkan melampaui posisi dan kondisi sebelumnya.</p>												
73	77/MKP/20/Jan/11	<p>Dalam 5 tahun terakhir kita digoncang dengan berbagai peristiwa. Kita masih ingat tahun 2006 masyarakat Bantul DIY mengalami peristiwa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan. Peristiwa gempa bumi tersebut juga sebuah momentum untuk memicu perubahan kesadaran dan posisi diri. Dengan kearifan lokalnya masyarakat Bantul bangkit pasca gempa 2006. Namun mereka tidak sekedar bangkit untuk kembali ke titik semula. Tumah-rumah tidak hanya diperbaiki seperti sediakala. Program rekonstruksi telah memperbaiki konstruksi bagaimana rumah tahan gempa itu seharusnya dibangun. Sekarang kita dapat melihat realitas hasil. Rumah-rumah penduduk di Bantul</p>	√					√						

76	80/MKP/20/Jan/11	<p>kondisi dan posisi sebelum terjadi peristiwa erupsi. Kedua peristiwa itu sungguh mahal harganya. Rasanya terlalu mahal jika kita hanya ingin sekedar kembali sama ke titik semula. Bukan seperti keledai yang lebai. Kita bisa menjadi transformer-transformer yang mampu melihat visi kedepan untuk lebih mendekatkan pada cita-cita hidup bersama. Kita mempunyai sumber daya batin yang memungkinkan terjadinya lompatan yang melampaui titik semula. Sumber daya batin itu berupa keyakinan (belief) yang kuat. Keyakinan akan adanya kesejahteraan yang lahir dari pemahaman hakikat “Manunggaling Kawula Gusti”, “Memayu Hayuning Bawana” serta “Tahta untuk Rakyat”, berikut aktualisasinya dalam konteks kekinian.</p>	√							√					
		<p>Apa yang sebenarnya istimewa tentang Yogyakarta. Bagaimana jiwa keistimewaan itu dihayati dalam konteks hidup berbangsa saat ini. Menjadi</p>	√							√					

77	81/MKP/20/Jan/11	<p>kawula Yogyakarta adalah kebanggaan sekaligus amanah untuk menjaga semangat kebhinekaan dalam NKRI. Yogyakarta menjadi istimewa karena berposisi dalam jajaran NKRI. Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono IX, tidak menempatkan kata istimewa sebagai tujuan pada dirinya sendiri (baca ; Yogyakarta). Khas dari yang disebut istimewa ada ketika ia berada dalam taburan kebhinekaan Indonesia. Hal itu dapat kita baca dalam “Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan” tanggal 5 September 1945 sbb :</p> <p>Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan : Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifar kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia Dst. (Soedarisman, 1984; Purwadi, 2010).</p>	√	√															
----	------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

82	86/MKP/20/Jan/11	<p>realitasnya bisa inklusif lebih adaptif & aspiratif. Oleh karenanya Keraton hadir sebagai simbol, tanda <u>dan</u> sarana pengayom dinamika kehidupan bersama antara Raja <u>dan</u> Kawula, antara kawula dengan kawula <u>serta</u> dinamika internal Keraton dalam keluhuran integritas untuk siap diteladani.</p> <p>Tahta untuk rakyat adalah komitmen Raja yang bertekad meneladankan cara hidup bersama berdasar atas nilai-nilai adhi luhung, yang bersumber dari prinsip-prinsip keutamaan hidup dijamin kerajaan yang berintegrasi menuju puncak kepenuhannya dalam Pancasila. Jadi keistimewaan adalah wujud tekad bersama antara Kerajaan Ngayogyakarta dan Negara Republik Indonesia untuk membangun kehidupan berbangsa, melalui <u>dan</u> pengakuan atas penghormatan kedudukannya masing-masing. Maka segenap kawula Jogja dapat berseru, “aku kawula Ngayogyakarta</p>	√																
----	------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

83	87/PKK/27/Jan/11	<p>yang berbangsa Indonesia”.</p> <p>Hasil penelitian laboratorium politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seperti dipajang di beberapa sudut kota, melaporkan data sebagai berikut. Sebanyak 96,6 persen penduduk DIY mendukung keistimewaan. Sebanyak 97,5 persen penduduk lulusan Perguruan Tinggi (PT) mendukung keistimewaan. Sebanyak 93,2 persen penduduk DIY mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertaha sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY secara otomatis. Penduduk lulusan PT yang mendukung penetapan itu sebesar 94 persen. Adapun wilayah yang paling loyal terhadap keistimewaan adalah Kabupaten Gunung Kidul (96 persen) dan diikuti Kabupaten Bantul (89 persen).</p>	√	√											
84	88/PKK/71/Jan/11	<p>Sajian angka-angka statistik dan prosentase-prosentase adalah ciri khas demokrasi prosedural. Karena itu setiap kali diadakan pemilihan umum senantiasa ada</p>	√	√											

85		<p>prediksi-prediksi dan berbagai analisis perhitungan cepat (<i>quick count</i>). Namun apa yang muncul sebagai data kuantitatif tak selalu sinkron dengan data yang bersifat kualitatif. Praktik demokrasi pasca Reformasi baru mengantarkan kita pada pencapaian kuantitas dan belum kualitas, baru berdemokrasi secara prosedural dan belum secara substansial.</p>		✓											
	89/PKK/27/Jan/11	<p>Hasil riset laboratorium politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentu membuat segenap wong Yogya berbesar hati. Data itu pun pasti sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat. Namun, sejauh mana penduduk Yogya yang pro keistimewaan dan pro penetapan memberi dukungan dengan pemahaman dan penghayatan yang mendalam? Dalam sebuah wawancara di televisi, peneliti dan pengamat politik dari CSIS J Kristiadi pernah menyindir kalau wong Yogya itu terkadang “<i>nggih nggih</i>”</p>		✓											

86	90/PPK/27/Jan/11	<p><i>ora kepanjang</i>” (tidak jelas antara ya <u>dan</u> tidak, antara setuju <u>dan</u> tidak setuju).</p> <p>Jika tanpa pemahaman mendalam, tanpa visi <u>dan</u> filosofi, masyarakat mudah goyah. <u>Karena</u> itu, iming-iming <i>money politic</i> yang <u>begitu</u> menggiurkan, misalnya, acap kali bisa menggoyang dan mengubah komitmen. Oleh <u>sebab</u> itu, yang sekarang mendesak diperlukan adalah peningkatan pemahaman <u>dan</u> penghayatan tentang keistimewaan Yogyakarta melalui pendidikan sejarah <u>dan</u> pendidikan politik secara intensif.</p>	√																
87	91/PPK/27/Jan/11	<p>Persoalan keistimewaan Yogyakarta adalah persoalan sejarah. Pendidikan sejarah di sekolah jangan <u>hanya</u> melalui pembelajaran peristiwa demi peristiwa dalam kerangka kronologis. Sejak awal, pelajar perlu diperkenalkan dengan metode-metode penelitian sejarah ilmiah sehingga mereka bisa menggali sendiri kebenaran sejarah <u>dan</u> tidak sekedar didikte oleh guru.</p>	√																

88	92/PKK/27/Jan/11	<p>Kemampuan mengali kebenaran sejarah secara obyektif dan ilmiah sangat diperlukan, sebab sudah sekian lama sejarah dipelintir untuk kepentingan politik. Antara "<i>his story</i>" (sejarah) dan "<i>his story</i>" (cerita orang) sudah sering diputarbalikkan. Mumpung ingatan kolektif tentang sejarah keistimewaan Yogyakarta masih kuat, marilah kita tegakkan kebenaran tersebut.</p>	√												
89	93/PKK/27/Jan/11	<p>Persoalan keistimewaan Yogyakarta adalah persoalan politik. Dinamika atau lebih tepatnya karut marut pembahasan RUUK Yogya selama bertahun-tahun ini di satu sisi memberikan pembelajaran politik tersendiri. Masyarakat menjadi tahu bagaimana tarik ulur kepentingan politik itu. Karena itu masyarakat justru perlu dibimbing untuk bisa melakukan proses belajar politik secara intensif.</p>	√						√						
90	94/PKK/27/Jan/11	<p>Jika dikembangkan pemahaman sejarah dan politik yang kuat maka semangat pro keistimewaan</p>	√						√						√

		<p>tidak menjadi semangat yang emosional yang hanya bermodalan tekad "<i>pokoke</i>". Di sisi lain, komitmen masyarakat terhadap keistimewaan itu juga tidak sekedar keputusan "<i>nggih nggih ora kepanggih</i>" seperti dituduhkan oleh J Kristiadi. Dengan demikian sikap pro keistimewaan yang berkembang tidak sekedar sloganistik, euforia, dan simbolis. Pro keistimewaan juga bukan sekedar aksi kuantitatif segenap masyarakat, namun sebuah komitmen bersama yang berkualitas mendalam!.</p>	√											
91	95/BKK/27/Jan/11	<p>Polemik penetapan versus pemilihan sebagai cara pengisian Gubernur/Wagub DIY ke depan pada dasarnya bukanlah polemik orisinal, melainkan sengaja dipolemikkan. Penetapan itu, yang dianggap anti-demokrasi oleh pihak pembikin polemik lebih mewujudkan politisasi. Kejelasan fakta sejarah bahwa lebih dari 60 tahun hal tersebut bukanlah masalah namun sekarang ini dipermasalahkan</p>	√											

94	98/BKK/27/Jan/11	<p>bahkan tiranis partai dan politik transaksional alias barter politik dan sangat mungkin sekaligus eksperimental dari sebuah politik manipulasi. Bukankah heboh manipulasi DPT pemilu 2008/2009 seperti ini dimulai dari pilkada Jawa Timur oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar?.</p>					√							
		<p>Dalam praktik serba aksesoris itulah demokrasi sulit menghasilkan seubah kepemimpinan, melainkan cukuplah sebagai pabrik kekuasaan dan kepejabatannya. Demokrasi di negeri kita dalam sejumlah reformasi adalah pabrik pengolah <i>the wrong men in the right place</i> dimana capaian-capaian kekuasaan ditempuh melalui mekanisme anti-demokrasi. Tirani “Duitologi” dan represi figur tunggal penentu sebuah partai runyam mengendali pendidikan politik untuk mencapai keandalan masyarakat sipil. Partai, dengan begitu juga demokrasi, sebagai sarana dan wahana demokratisasi</p>	√											

95	99/BKK/27/Jan/11	adalah nonsense. Partai hanyalah dominan menjadi alat memburu nafkah dan memperkaya diri, menebar pesona sekaligus dimana mungkin sebagai kontrol neofeodalisme “gembel” merajakan diri sedangkan raja sendiri merakyatkan dirinya.	√																		
		Keberantakan substansial demokrasi di negeri kita pun dengan sepuh kebanggaan disahkan dengan materi kemajuan dengan betapapun kedaluwarsa dan bahkan palsu materai itu. Kedaluwarsa, sebab demokrasi selaku isu modernitas dengan ilmu sebagai penyangganya sudah lama bergerak menuruni lereng krisisnya. Dan sekaligus palsu, sebab demokrasi tanpa pengelolaan nilai-nilai dasarnya semisal transparansi, rasionalitas, jalan damai, kedewasaan warga negara dan hukum yang adil, bukanlah sejatinya demokrasi.																			
96	100/BKK/27/Jan/11	Demokrasi hanyalah alat pembayar yang terlalu mahal dan sangat riskan untuk cuma																			

99	103/BKK/27/Jan/11	<p>mengindonesiakan Indonesia. Gerakan rakyat yang tidak berpendidikan tinggi itu secara kategoris menolak sosialisasi ilmiah sejumlah pakar yang ingin menggeneralisasi paham demokrasi asing untuk Yogyakarta; bahkan Indonesia.</p>						√							
100	104/BKK/27/Jan/11	<p>Dalam workshop RUUK DIY 19 Januari lalu di Jakarta yang difasilitasi oleh Aliansi Bhinneka Tunggal Ika dan Jaringan Indonesia (JIRA) yang dihadiri secara nasional dengan lima profesor dan seorang mantan diplomat senior, diakui bahwa masalah Yogyakarta yang hendak ditorpedo keistimewaannya – melalui RUUK versi pemerintah – secara hakiki merupakan manifestasi dari usaha mentorpedo Indonesia. Yogyakarta adalah benteng terakhir keindonesiaan; demikian semua peserta sampai-sampai peserta Jawa Timur menjamin, iika keistimewaan Yogyakarta mau dikutak-kutik “Blitar sampai Banyuwangi” siap</p>		√				√	√		√			√	

101		<p>membela. Peserta asal Kalimantan Tengah, Makassar dan Tanah Sunda pun terang benerang mendukung penetapan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam. Namun, sejumlah doktor yang bekerja di Yogyakarta justru berketetapan melakukan transformasi Yogyakarta demi Indonesia dengan cara pengisian Gubernur DIY melalui pilkadal atas nama demokrasi, sambil “membuang ke atas” Sultan dan Sri Paduka sebagai Paradya atau Gubernur Utama. Mereka – boleh jadi – telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas Yogyakarta sesungguhnya lebih melucuti Yogyakarta dari nada keindonesiaannya.</p>	
	105/BKK/27/Jan/11	<p>Penulis, boleh kiranya berpegang pada integritas intelektual Pak Daed Joesoef, yang lama tinggal di Yogyakarta dimana beliau menulis bahwa mengajari rakyat Yogyakarta tentang</p>	

105		<p>Namun di benua Eropa ada klaim bahwa pertama kali demokrasi lahir adalah di Athena pada tahun 508 SM. Kemudian di abad ke – 18 J Rousseau memperkenalkan teori dalam bukunya berjudul “<i>Le Contrat Social</i>” (1762), mengajarkan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, dan semua peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat.</p>						√						
	109/PDD/28/Jan/11	<p>Bangsa Indonesia pernah mengalami demokrasi liberal yang kemudian direduksi oleh Bung Karno, presiden pertama RI menjadi Demokrasi Terpimpin. Dalam era Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto demokrasi terpimpin di modifikasi menjadi Demokrasi Pancasila yang diintegrasikan dengan ajaran Eka Prasetya Panca Karsa dalam suatu jабaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dengan berbagai nilai positif dan negatifnya kedua tipologi demokrasi tersebut memiliki tuntunan yang jelas dan terarah. Sementara dalam era Reformasi sekarang ini demokrasinya tidak memiliki</p>						√						

106	110/PDD/28/Jan/11	<p>format yang terukur. Di satu sisi ada pemanjaan di kalangan rakyat, <u>dan di sisi lain</u> ada kendali kuat dari pusat kekuasaan yang bersembunyi di belakang legalitas konstitusional. Dalam kondisi ketiadaan format demokrasi seperti ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di arena pertarungan massal antara pendukung kebijakan pemerintah dengan pemilik <i>Kedaulatan Rakyat</i>. Tanda-tanda ke arah itu sebenarnya sudah tampak dengan berbagai bentuk demonstrasi massa menentang kebijakan penguasa di berbagai daerah yang sering berkeses anarkhis. Kalau kekuatan massa tersebar itu terakumulasi secara nasional dalam satu gerakan maka akan terjadi kekacauan di negara tercinta ini.</p>							√					
		<p>Terlepas dari putaran sejarah yang sudah gambang status kekratonan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat) seharusnya pemerintah tidak “ngotot” untuk memaksakan kepentingannya. Kawula Yogyakarta sudah cukup</p>		√										

108	112/DPP/28/Jan/11	<p>pemilihan umum berlaku ketentuan penggabungan sisa-sisa suara parpol yang sudah memiliki jatah kursi untuk diberikan kepada parpol lain yang belum memperoleh kursi. Kemudian dalam Pilkada atau Pilkadaes, para calo politik/demokrasi melakukan lobi ke masyarakat, dalam rangka operasi menjalankan <i>money politics</i>.</p> <p>Generalisasi penerapan asas demokrasi dalam perspektif otonomi daerah merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah DIY. Eksistensi kraton yang didramatisir sebagai identitas/symbol demokrasi monarkhi akhir-akhir ini menjadi polemik terhadap demokrasi nasional. Sementara demokrasi itu sendiri secara isoteris hanya dipahami oleh para elitis, sementara rakyat sendiri yang nota bene selalu dipakai stempel orasi politik, justru tidak banyak tahu tentang demokrasi. Bisa-bisa rakyat Yogyakarta berkesimpulan bahwa demokrasi adalah Pemiluakada dan sebaliknya</p>	√																
-----	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Pemilukada adalah demokrasi. Prevarikasi politik terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta jangan menjadikan ketidakpastian status “istimewa” menjadi “peristiwa” hukum yang mencederai rakyat DIY. Mempertajamkan “demokrasi dan monarkhi yang sudah mapan” di DIY merupakan pemborosan energi politik nasional yang seharusnya fokus kepada upaya mengentaskan kemiskinan rakyat, termasuk kemiskinan akhlak dan moral agama para penyelenggara negara yang doyan KKN.</p>							
109	113/DPP/28/Jan/11	<p>Kalaulah demokrasi mau diterapkan di DIY, ada benang merah yang bisa diterapkan dengan sistem pemilihan tidak langsung. Berdayakan DPRD sebagai presentasi rakyat untuk menentukan dan mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka terlaksananya desentralisasi formil, materiel dan riil bersama pemerintah DIY. Hal mana sudah disikapi oleh DPRD DIY dalam sidangnya tanggal 13</p>	√						

110	114/SKY/29/Jan/11	<p>Desember 2010 bahwa semua fraksi (kecuali FPD) sepakat untuk Gubernur DIY tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tapi dengan penetapan. Manusia merencanakan, Allah juga punya rencana, tapi sebaik-baik rencana adalah rencana Allah SWT.</p> <p>Berdasarkan hasil sidang di DPR RI terkait pembahasan RUU DIY, pada hari Rabu 26 Januari 2011 kemarin menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk “menghabisi” keistimewaan Yogyakarta pada sisi politik dan budaya nampak terlihat dengan jelas. Pada sisi politik, apabila kita mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin meredukasi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di Yogyakarta. Sedangkan pada sisi budaya, pemerintah hanya mengangap Yogyakarta sebatas sebagai provinsi yang sama dengan provinsi lain. Keistimewaan Yogyakarta dianggap hanya sekadar</p>	√									

	<p>Apabila kita cermati bahwa ada sisi lain yang menarik yang dapat menunjukkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang lebih humanis. Hal itu terbukti dari predikat Yogyakarta yang mampu mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan kalangan masyarakat banyak. Sisi kebhinekaan Yogyakarta pun terbukti dengan berdirinya berbagai asrama daerah dari Sabang sampai Merauke dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 33 asrama daerah yang dibangun di tanah Yogyakarta. Daerah mana yang ada di Indonesia memiliki asrama daerah yang beragam seperti di Yogyakarta. Sisi lain yang menarik adalah berbagai jenis plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia hanya Yogyakarta yang memiliki keanekaragamannya. Apabila mengamati plat nomor kendaraan kita dapat melihat ada berbagai macam ragamnya seperti BG, G, AB, L, R, B, AG, M, S, dll. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah kota</p>

		<p>istimewa, banyak mahasiswa dan pelajar membawa kendaraan dari daerah asal mereka dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta karena kecintaan mereka terhadap kota Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta bukan sekedar suatu fakta sejarah dan cerita masa lalu. Tetapi Keistimewaan Yogyakarta dapat terlihat dari denyut kehidupan masa kini dan yang akan datang. Sesungguhnya Yogyakarta telah menjadi ikon Indonesia mini harusnya mendapatkan penghargaan, perlindungan dan jaminan dari pemerintah tetapi di era pemerintahan SBY malah ingin mencoba untuk mencabut akar historis dari keistimewaan itu sendiri.</p>							
112	116/SK Y/29/Jan/11	<p>Ambisi pemerintah yang tetap menginginkan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta merupakan proses pemaksaan kepentingan yang bersumber dari perlawanan ideologi yang tidak demokratis di suatu negara demokrasi. Dalam hal ini, pemerintah</p>	√						

115	119/SK Y/29/Jan/11	<p>memperjuangkan <u>dan</u> melestarikan kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya diikuti oleh alat musik angklung dari Jawa Barat juga mendapatkan pengakuan oleh UNESCO tahun 2010 sebagai warisan budaya dunia tak benda. Demokrasi <u>dan</u> politik tanpa dilandasi sisi kemanusiaan yang didalamnya mengandung toleransi, kerja sama, kepedulian, dialog dan penghormatan <u>hanya</u> akan menyebabkan disharmonis <u>dan</u> ketegangan.</p>	√					√						√	
		<p>Harmoni bangsa <u>dan</u> integrasi nasional akan terganggu <u>apabila</u> kepentingan politik dari golongan tertentu merusak tatanan masyarakat yang sudah damai, tenang, <u>dan</u> nyaman. Kebutuhan masyarakat <u>dan</u> rakyat tidak <u>hanya</u> untuk sekadar ikut pemilihan <u>tetapi</u> kebutuhan dasar mereka adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan <u>dan</u> pekerjaan yang layak, bagaimana mendapatkan akses pendidikan yang mamadai</p>	√												

Lampiran 7. Sinonimi dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*

No.	Nomor Kartu Data	Data	Penanda Kohesi				
			SMM	SKK	SKF	SFF	SKLKL
1	05/65T/04/Jan/11	Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan Kereta Luar Biasa (KLB), karena jadwal perjalanannya dilakukan di luar jadwal yang ada. Setibanya para pemimpin di Yogyakarta, roda pemerintah langsung digulirkan. Hal ini bisa dilakukan karena tata pemerintahan di Yogyakarta saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi .			√		
2	09/65T/04/Jan/11	Selama periode Republik Jogja, perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga berlangsung dengan gencar dan efektif , baik dalam bentuk gerilya maupun perundingan. Pada periode ini pula Yogyakarta dengan jiwa kemerdekaannya memegang peran penting dalam mempertahankan kelangsungan RI.		√			
3	19/AKY/05/Jan/11	Meski Yogya berhasil dikuasai tentara Belanda (agresi 19/12/1948) dan Soekarno-Hatta akhirnya ditawan dan diasingkan , tetapi mandat Pemerintah Darurat RI dipegang Sjafoedin Prawira negara di Bukit Tinggi (Sumbar), sedangkan diplomasi politik dan taktik perang gerilya (1948-1949) dari Yogya membuahkan hasil. Atas nama RI, HB IX menerima pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia (27/12/1949).		√			
4	44/KYE/08/Jan/11	Demokrasi liberal mempunyai indikator yang tegas mengenai peralihan kekuasaan. Yakni, pertama, adanya rotasi kekuasaan. Kekuasaan tidak dimaknai sebagai suatu sistem yang permanen dan terus menerus melekat pada seseorang (pemimpin), tetapi dimaknai sebagai proses rekrutmen yang sehat, jujur, dan bersih . Dalam rekrutmen peralihan kekuasaan itu, setiap individu mempunyai hak untuk mengambil alih mandat kekuasaan secara elegan.		√			
5	57/API10/Jan/11	“Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua, tadi untuk memindahkan buat sementara kedudukan Pemerintah Agung. Alasan itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan dari renovasi rakyat Indonesia pada masa ini. Sebab Pemerintahan Agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah Kota Mataram akan dapat melangsungkan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan di daerah-daerah. Bahwa penyempurnaan organisasi-organisasi itu senantiasanya dilakukan, terbukti dari		√			

6	58/API10/Jan/11	perubahan-perubahan dalam susunan Pemerintah Agung yang kami umumkan tadi Dengan demikian maka koordinasi yang tersusun, yang menjadi syarat mutlak untuk berputarnya roda pemerintahan dengan licin, akan lekas tercapai.” Negara RI yang masih bayi, baru lahir pada 17 Agustus 1945, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus. Sama seperti bayi yang dirawat dalam ruang inkubator, RI waktu itu membutuhkan perlindungan khusus supaya dapat bertumbuh dan melewati masa masa kritisnya. Untuk itu, Yogyakarta yang paling tepat menjadi inkubulator bagi bayi RI.	√						
7	61/API10/Jan/11	Hal itu menunjukkan bagaimana kontribusi Yoga dalam mengasuh, merawat, melindungi, dan membesarkan negara RI. Tanpa peran Yoga seperti itu maka negara RI belum tentu masih ada dan berkembang seperti sekarang ini!!!	√						
8	62/DDI/12/Jan/11	IDE PWI Yogyakarta untuk membuat macam kosensus jurnalisme bernuansa keistimewaan yang bertumpu pada akar budaya Jawa, menarik dipertimbangkan. Jurnalisme Istimewa Yogyakarta (JIY) lahir dari pergumulan adanya peliputan media yang tak elok, bahkan cenderung tak berbudaya, kala erupsi Merapi terjadi. Padahal, masyarakat Yoga amat identik dengan lakon hidup yang bersandar pada falsafah hidup Jawa yang sarat nuansa spiritual, simbol, dan mutiara-mutiara kebijakan. Logika dan filsafat media yang belakangan ini makin buas, liar , materialistik, tak lagi seiring sejalan dengan dasar-dasar filsafat Jawa maupun etika jurnalisme. Mungkinkah konsensus JIY mengawinkan konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa? Bagaimana membentuk basis konsep dan panduan implementatifnya?	√						
9	67/DDI/12/Jan/11	Perkawinan antara ilmu jurnalisme dan aneka konsep Jawa adalah pokok utama dalam uraian isi buku panduan JIY ini. Pada titik ini, kita perlu mencari dan menemukan nilai-nilai budaya Jawa yang seirama dan senapas dengan konsep jurnalisme yang bertumpu pada fakta, kebenaran dan pro pada yang lain, kata Ashadi Siregar, bukan pada gosip dan ngrasani . Jurnalisme akhir-akhir ini sudah mengarah pada <i>ngrasani</i> , jauh dari <i>memayu hayuning bawana, ayem-tentrem</i> , dan patahnya <i>rukun agawe santosa</i> (Suwardi Endraswara, 2010), juga tanpa verifikasi, tanpa kebenaran, jauh dari komprehensif dan proporsional (Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2003).	√						
10	74/RDP/19/Jan/11	Tindakan pemerintah dengan menurunkan derajat Sultan dan Paku Alam untuk berkompetisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sangat mengusik harga diri, tidak saja Sultan dan Paku Alam, tetapi masyarakat Yogya pada	√				√		

		<p>umumnya. Raja yang dijunjung tinggi harus ikut dalam perebutan jabatan yang tentu saja sulit diterima dalam logika masyarakat Jawa. Dalam konsep tradisional Jawa, kekuasaan adalah wahyu yang menjadi amanat dari pribadi tinggi yang mendapatkannya. Kalau seorang raja harus ikut berkompetisi memperebutkan jabatan atau kekuasaan, tentu akan menghilangkan makna kesakralan dari kekuasaan itu sendiri. Raja akhirnya sama dengan pribadi lain yang mungkin terjebak dalam permainan politik yang dapat menurunkan wibawanya dan menjatuhkan derajatnya sebagai seorang raja. Seorang raja harus menjaga ucapan, sikap dan tata lakunya yang mencerminkan pribadi tinggi sebagai khalifatullah sayidina panatagama. Dalam istilah Jawa dikenal ungkapan sabda pandhita ratu, tan keno wola-wali, lan berbudhi bawalaksana. Dalam konsep ini, seorang raja adalah juga seorang pandhita yang ucapan dan perilakunya sangat terjaga. Rakyat sudah tentu tidak akan menerima bentuk perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat rajanya, dan tentu akan melakukan “perlawanan” untuk menjaga martabat dan harga diri rajanya.</p>				
11	77/MKP/20/Jan/11	<p>Dalam 5 tahun terakhir kita digoncang dengan berbagai peristiwa. Kita masih ingat tahun 2006 masyarakat Bantul DIY mengalami peristiwa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan. Peristiwa gempa bumi tersebut juga sebuah momentum untuk memicu perubahan kesadaran dan posisi diri. Dengan kearifan lokalnya masyarakat Bantul bangkit pasca gempa 2006. Namun mereka tidak sekedar bangkit untuk kembali ke titik semula. Tumah- rumah tidak hanya diperbaiki seperti sediakala. Program rekonstruksi telah memperbaiki konstruksi bagaimana rumah tahan gempa itu seharusnya dibangun. Sekarang kita dapat melihat realitas hasil. Rumah-rumah penduduk di Bantul menjadi relatif lebih asri dan sehat. Lingkungan dan infrastruktur lebih baik. Semua itu telah melampaui titik kondisi sebelum gempa.</p>	√			
12	79/MKP/20/Jan/11	<p>Erupsi Merapi mengantar kita menuju kesadaran baru bagaimana memahami bahasa Merapi seraif mungkin, dan Erupsi Monarki mengantar kita sejenis kembali mendalami arti keistimewaan Yogyakarta. Sama dengan 2006 di Bantul peristiwa ini juga sedang dan akan menjadi momentum penguah kesadaran diri. Bagaimana kita dapat menjalani transformasi sehingga mampu melampaui kondisi dan posisi sebelum terjadi peristiwa erupsi. Kedua peristiwa itu sungguh mahal harganya. Rasanya terlalu mahal jika kita hanya ingin sekedar kembali sama ke titik semula. Bukan seperti keledai yang lebai.</p>	√			

13	85/MKP/20/Jan/11	<p>Kita bisa menjadi transformer-transformer yang mampu melihat visi kedepan untuk lebih mendekatkan pada cita-cita hidup bersama. Kita mempunyai sumber daya batin yang memungkinkannya terjadinya lompatan yang melampaui titik semula. Sumber daya batin itu berupa keyakinan (belief) yang kuat. Keyakinan akan adanya kesejahteraan yang lahir dari pemahaman hakikat “Manunggaling Kawula Gusti”, “Memayu Hayuning Bawana” serta “Tahta untuk Rakyat”, berikut aktualisasinya dalam konteks kekinian.</p> <p>Dalam amanat 5 September 1945 Sri Sultan HB IX, membahasakan istimewa dalam kerangka NKRI. Amanat tersebut telah menepis stigma mitos monarkis yang serba magis, mitologis yang seolah-olah eksklusif. Keraton dalam realitasnya bisa inklusif lebih adaptif & aspiratif. Oleh karenanya Keraton hadir sebagai simbol, tanda dan sarana pengayom dinamika kehidupan bersama antara Raja dan Kawula, antara kawula dengan kawula serta dinamika internal Keraton dalam keluhuran integritas untuk siap diteladani.</p>	√						
14	89/PKK/27/Jan/11	<p>Hasil riset laboratorium politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentu membuat segenap wong Yogya berbesar hati. Data itu pun pasti sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat. Namun, sejauh mana penduduk Yogya yang pro keistimewaan dan pro penetapan memberi dukungan dengan pemahaman dan penghayatan yang mendalam? Dalam sebuah wawancara di televisi, peneliti dan pengamat politik dari CSIS J Kristiadi pernah menyindir kalau wong Yogya itu terkadang “<i>nggih nggih ora kepanggih</i>” (tidak jelas antara ya dan tidak, antara setuju dan tidak setuju).</p>	√						
15	90/PKK/27/Jan/11	<p>Jika tanpa pemahaman mendalam, tanpa visi dan filosofi, masyarakat mudah goyah. Karena itu, iming-iming <i>money politic</i> yang begitu menggiurkan, misalnya, acapkali bisa menggoyang dan mengubah komitmen. Oleh sebab itu, yang sekarang mendesak diperlukan adalah peningkatan pemahaman dan penghayatan tentang keistimewaan Yogyakarta melalui pendidikan sejarah dan pendidikan politik secara intensif.</p>	√						
16	96/BKK/27/Jan/11	<p>Gubernur, bupati, walikota, ketua RT atau presiden sekalipun belum otomatis pemimpin jika mereka hanya mengandalkan sandaran kepejabatatan melalui mayoritas hasil suatu coblosan. Kuantifikasi hasil dengan cara coblos atau contreng, atau yang tempo dulu dengan cara memasukkan “biting” kedalam bumbung, dalam bahasa modernnya disebut dengan pemilu atau Pemilukada. Kemenangan ditentukan oleh cacah gundul, gundul sesiapapun, dengan</p>	√						

17	109/PDD/28/Jan/11	<p>rumusan yang sangat simplistik, separuh lebih satu – demikian dalil demokrasi barat liberal yang diterima meluas selama ratusan tahun.</p> <p>Bangsa Indonesia pernah mengalami demokrasi liberal yang kemudian direduksi oleh Bung Karno, presiden pertama RI menjadi Demokrasi Terpimpin. Dalam era Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto demokrasi terpimpin di modifikasi menjadi Demokrasi Pancasila yang diintegrasikan dengan ajaran Eka Prasetya Panca Karsa dalam suatu jbaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dengan berbagai nilai positif dan negatifya kedua tipologi demokrasi tersebut memiliki tuntunan yang jelas dan terarah. Sementara dalam era Reformasi sekarang ini demokrasinya tidak memiliki format yang terukur. Di satu sisi ada pemanjaan di kalangan rakyat, dan di sisi lain ada kendali kuat dari pusat kekuasaan yang bersembunyi di belakang legalitas konstitusional. Dalam kondisi ketiadaan format demokrasi seperti ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di arena pertarungan massal antara pendukung kebijakan pemerintah dengan pemilik <i>Kedaulatan Rakyat</i>. Tanda-tanda ke arah itu sebenarnya sudah tampak dengan berbagai bentuk demonstrasi massa menentang kebijakan penguasa di berbagai daerah yang sering berekses anarkhis. Kalau kekuatan massa tersebar itu terakumulasi secara nasional dalam satu gerakan maka akan terjadi kekacauan di negara tercinta ini.</p>	√			
18	112/DPP/28/Jan/11	<p>Generalisasi penerapan asas demokrasi dalam perspektif otonomi daerah merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah DIY. Eksistensi kraton yang didramatisir sebagai identitas/symbol demokrasi monarkhi akhir-akhir ini menjadi polemik terhadap demokrasi nasional. Sementara demokrasi itu sendiri secara isoteris hanya dipahami oleh para elitis, sementara rakyat sendiri yang nota bene selalu dipakai stempel orasi politik, justru tidak banyak tahu tentang demokrasi. Bisa-bisa rakyat Yogyakarta berkesimpulan bahwa demokrasi adalah Pemelukada dan sebaliknya Pemelukada adalah demokrasi. Prevarikasi politik terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta jangan menjadikan ketidakpastian status “istimewa” menjadi “peristiwa” hukum yang mencederai rakyat DIY. Mempertujungkan “demokrasi dan monarkhi yang sudah mapan” di DIY merupakan pemborosan energi politik nasional yang seharusnya fokus kepada upaya mengentaskan kemiskinan rakyat, termasuk kemiskinan akhlak dan moral agama para penyelenggara negara yang doyan KKN.</p>	√			

19	113/DPPP/28/Jan/11	<p>Kalaulah demokrasi mau diterapkan di DIY, ada benang merah yang bisa diterapkan dengan sistem pemilihan tidak langsung. Berdayakan DPRD sebagai presentasi rakyat untuk menentukan dan mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka terlaksananya desentralisasi formil, materiel dan riil bersama pemerintah DIY. Hal mana sudah disikapi oleh DPRD DIY dalam sidangnya tanggal 13 Desember 2010 bahwa semua fraksi (kecuali FPD) sepakat untuk Gubernur DIY tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tapi dengan penetapan. Manusia merencanakan, Allah juga punya rencana, tapi sebaik-baik rencana adalah rencana Allah SWT.</p>	√							
20	114/SKY/29/Jan/11	<p>Berdasarkan hasil sidang di DPR RI terkait pembahasan RUU DIY, pada hari Rabu 26 Januari 2011 kemarin menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk “menghabisi” keistimewaan Yogyakarta pada sisi politik dan budaya nampak terlihat dengan jelas. Pada sisi politik, apabila kita mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin meredukasi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di Yogyakarta. Sedangkan pada sisi budaya, pemerintah hanya menganggap Yogyakarta sebatas sebagai provinsi yang sama dengan propinsi lain. Keistimewaan Yogyakarta diabaikan hanya sekedar warisan sejarah dan budaya pada masa dinasti Sultan Hamengku Buwono IX saja. Di tengah-tengah euforia demokrasi dan pemilihan langsung, suara rakyat sudah tidak lagi menjadi bagian dari esensi demokrasi. Kepentingan penguasa lebih utama dari pada mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY tampaknya sudah mendekati pemerintahan bertangan besi dan ber-rejim pemilihan. <i>Kedaulatan Rakyat</i> sudah tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan partai, penguasa dan pengusaha. Sistem perwakilan yang telah dianut oleh negeri ini telah gugur dengan sendirinya ketika para wakil rakyat dan lembaga perwakilan rakyat lainnya sudah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lalu apa istimewanya negeri ini? Oleh karena itu, Yogyakarta sebagai daerah istimewa adalah jaminan akan peradaban manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan merakyat dan demokrasi tidak akan berarti apabila tidak ada kedamaian, kenyamanan, dan keharmonisan. Istimewanya negeri ini ketika masih ada daerah yang istimewa yang tetap menjadi benteng peradaban dan kebudayaan Indonesia.</p>	√							
21	122/SKY/29/Jan/11		√							
JUMLAH						-	20	2	-	-

Lampiran 8. Antonimi dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*

No.	Nomor Kartu Data	Data	Penanda Kohesi					
			OK	OM	OG	OR	OH	OI
1	12/65T/04/Jan/11	Kini, setelah 65 tahun berdirinya Republik Jogja, heroime, patriotisme, dan jiwa kemerdekaan rakyat Yogyakarta seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno sendiri mulai diragukan. RUUK yang disusun pemerintah pusat dan telah diserahkan kepada DPR tidak selaras dengan kenyataan sejarah, bahkan terkesan merendahkan peran dan posisi Sultan serta jiwa dan semangat nasionalisme rakyat Yogyakarta. Sikap pemerintah pusat yang bertentangan dengan peran dan jasa Sultan dan rakyat Yogyakarta ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Oleh karena itu tidak mengherankan jika rakyat Yogyakarta semakin memperkuat ikatan emosional secara sosial kultural dengan Keraton dan menggelak jiwa kemerdekaannya.						√
2	25/AKY/05/Jan/11	Bentuk pemerintahan di daerah akan diatur undang-undang dengan mengakui kerajaan Sultanaat atau Kooti di Jawa dan luar Jawa , maupun daerah kecil bersusunan asli seperti desa, marga, nagari, huta/kuria atau gampong (Setneg, 1995:271-272). Moh Yamin juga mengusulkan pembentukan kementerian urusan Kooti dan Bung Hatta menyatakan kebutuhan UU tentang Kooti. Tetapi PPKI (19/8/1945) menolak usul wakil Yogya Poeroejojo agar ‘Kooti disahkan 100% zelfstanding (berdiri sendiri) karena bentuk negara kesatuan		√				

3	39/KYE/08/Jan/11	<p>disepakati pada Pasal 1 UUD 1945 (Setneg, 1995:468).</p> <p>Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, baik secara de jure maupun de facto telah memiliki pemerintahan yang teratur dengan pembagian wilayah yang bersifat administratif sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 5 September mengeluarkan maklumat bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang berbentuk kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.</p>	√				
4	41/KYE/08/Jan/11	<p>Mari kita cermati kembali pengakuan negara terhadap keistimewaan Yogyakarta yang terkandung di dalam piagam Kedudukan yang diberikan negara kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka paku Alam VIII, pada tanggal 19 Agustus 1945 isi Piagam kedudukan Keistimewaan Yogyakarta itu, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno menetapkan Inkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah Inkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta. Bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Jadi ketentuan ini sudah jelas, sehingga jangan diinterpretasikan lagi yang justru membuat bingung masyarakat.</p>	√				

5	46/KYE/08/Jan/11	<p>Ketiga, adanya aksesibilitas publik terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, publik juga diharapkan mempunyai akses yang sama dengan pihak-pihak lain untuk merebutkan kekuasaan sesuai dengan konsensus yang telah disepakati bersama. Di sinilah kekuasaan dimaknai sebagai dari, oleh dan untuk rakyat. Sebab setiap individu yang menamakan dirinya elemen rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang wajar.</p>				√		
6	69/DDI/12/Jan/11	<p>Dalam konteks panduan implementatif, ada banyak parameter yang dapat dimasukkan. <i>Pertama</i>, penulisan berita yang mendukung identitas kota lengkap dengan <i>guidance</i>-nya. <i>Kedua</i>, karya jurnalistik harus mendukung kohesi sosial. Publik membaca kritik bukan dari deretan kata dan kalimat yang menyerang, vulgar, kotor dan kasar, tapi pembaca dapat merasakan sebuah kritik dari penyusunan diksi kata yang bertumpu pada kehadiran gagasan yang jernih, orientasi isinya membangun, bukan menghancurkan. Kritik jenis ini merepresentasikan keluhuran budi dan kewaskitaan sebagai manusia, meminjam Indra Tranggono. <i>Ketiga</i>, tulisan informasi geologi sebaiknya memuat hal preventif, <i>emergency</i> dan liputan rehabilitasi yang sigi dengan warna <i>memayu hayuning bawana</i>.</p>				√		
7	70/RDP/19/Jan/11	<p>Pro kontra wacana pemilihan dan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY terkait draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang dikemukakan pemerintah tampaknya belum akan berakhir. Sejahter ini pemerintah kelihatan begitu percaya diri bahwa draf RUUK yang diajukan akan mendapat pengesahan DPR.</p>				√		

8	71/RDP/19/Jan/11	<p>Keyakinan itu setidaknya didasarkan pada dua hal, pertama, pemerintah berpendapat bahwa gerakan massa yang termanifestasi dalam aksi mendukung penetapan hanyalah sebagian saja dari sikap keseluruhan masyarakat Yogyakarta. Kedua, setelah mengalami penundaan beberapa kali, akhirnya pemerintah mengajukan draf RUUK DIY ke DPR (16/12). Pengajuan dilakukan setelah sebelumnya pemerintah melakukan harmonisasi dengan partai-partai mitra koalisi yang sebelumnya memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah terkait dengan draf RUUK DIY.</p>	√					
		<p>Kalau terjadi persamaan persepsi dan kesepakatan politik antara pemerintah dan fraksi-fraksi yang tergabung dalam mitra koalisi, maka dapat dipastikan draf RUUK DIY yang diajukan pemerintah akan berjalan mulus, dan <u>tarik ulur</u> kepentingan antara pemerintah dengan keraton dan masyarakat Yogya dalam proses politik di DPR akan berakhir anti klimaks. Namun apapun hasil yang dicapai dalam proses politik di DPR, tetap akan meninggalkan luka sebagai hasil dari sebuah zero sum game politik. Pemerintah akan kehilangan muka apabila kalah dalam proses ini, sebaliknya keraton dan masyarakat Yogya akan luka berkepanjangan apabila fraksi-fraksi DPR berbalik arah dan mendukung draf pemerintah. Sebagai sebuah permainan, politik memang sukar ditebak, semuanya bisa berubah. Yang semula <u>mendukung</u>, bisa saja berbalik <u>menentang</u>. Sebaliknya yang semula menentang, bisa saja berbalik mendukung. Namun keistimewaan Yogyakarta senyatanya bukanlah semata soal politik. Di dalamnya terkandung masalah moral, harga diri dan identitas</p>	√			√		

9	82/MKP/20/Jan/11	<p>kultural.</p> <p>Di samping aspek historis, sisi lain istimewaanya terletak pada Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang Raja sebagai pengembalian amanah “Manunggaling Kawula Gusti”. Sebagai pengembalian amanah, maka sabda Raja berdaya mengatasi proses politik pada saat sarat dengan tarik ulur kepentingan. Dengan kata lain titah Raja bukan representatif dari suatu pandangan partai politik tertentu.</p>	√					
10	85/MKP/20/Jan/11	<p>Dalam amanat 5 September 1945 Sri Sultan HB IX, membahasakan istimewa dalam kerangka NKRI. Amanat tersebut telah menepis stigma mitos monarkis yang serba magis, mitologis yang seolah-olah eksklusif. Keraton dalam realitasnya bisa inklusif lebih adaptif & aspiratif. Oleh karenanya Keraton hadir sebagai simbol, tanda dan sarana pengayom dinamika kehidupan bersama antara Raja dan Kawula, antara kawula dengan kawula serta dinamika internal Keraton dalam keluhuran integritas untuk siap diteladani.</p>	√					
11	89/PKK/27/Jan/11	<p>Hasil riset laboratorium politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentu membuat segenap wong Yogya berbesar hati. Data itu pun pasti sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat. Namun, sejauh mana penduduk Yogya yang pro keistimewaan dan pro penetapan memberi dukungan dengan pemahaman dan penghayatan yang mendalam? Dalam sebuah wawancara di televisi, peneliti dan pengamat politik dari CSIS J Kristiadi pernah menyindir kalau wong Yogya itu terkadang “<i>nggih ora kepanggih</i>” (tidak jelas antara ya dan tidak, antara setuju dan tidak setuju).</p>	√					

12	93/PKK/27/Jan/11	<p>Persoalan keistimewaan Yogya adalah persoalan politik. Dinamika atau lebih tepatnya karut marut pembahasan RUUK Yogya selama bertahun-tahun ini di satu sisi memberikan pembelajaran politik tersendiri. Masyarakat menjadi tahu bagaimana farik ulur kepentingan politik itu. Karena itu masyarakat justru perlu dibimbing untuk bisa melakukan proses belajar politik secara intensif.</p>	√					
13	109/PDD/28/Jan/11	<p>Bangsa Indonesia pernah mengalami demokrasi liberal yang kemudian direduksi oleh Bung Karno, presiden pertama RI menjadi Demokrasi Terpimpin. Dalam era Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto demokrasi terpimpin di modifikasi menjadi Demokrasi Pancasila yang diintegrasikan dengan ajaran Eka Prasetya Panca Karsa dalam suatu jabatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dengan berbagai nilai positif dan negatifnya kedua tipologi demokrasi tersebut memiliki tuntunan yang jelas dan terarah. Sementara dalam era Reformasi sekarang ini demokrasinya tidak memiliki format yang terukur. Di satu sisi ada pemanjaan di kalangan rakyat, dan di sisi lain ada kendali kuat dari pusat kekuasaan yang bersembunyi di belakang legalitas konstitusional. Dalam kondisi ketiadaan format demokrasi seperti ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di arena pertarungan massal antara pendukung kebijakan pemerintah dengan pemilik <i>Kedaulatan Rakyat</i>. Tanda-tanda ke arah itu sebenarnya sudah tampak dengan berbagai bentuk demonstrasi massa menentang kebijakan penguasa di berbagai daerah yang sering berkeses anarkhis. Kalau kekuatan massa tersebar itu terakumulasi secara nasional</p>	√					

14	115/SKY/29/Jan/11	<p>dalam satu gerakan maka akan terjadi kekacauan di negara tercinta ini.</p> <p>Sekarang, keistimewaan Yogyakarta tidak pernah dilihat dalam ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Apabila kita cermati bahwa ada sisi lain yang menarik yang dapat menunjukkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang lebih humanis. Hal itu terbukti dari predikat Yogyakarta yang mampu mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan kalangan masyarakat banyak. Sisi kebhinekaan Yogyakarta pun terbukti dengan berdirinya berbagai asrama daerah dari Sabang sampai Merauke dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 33 asrama daerah yang dibangun di tanah Yogyakarta. Daerah mana yang ada di Indonesia memiliki asrama daerah yang beragam seperti di Yogyakarta. Sisi lain yang menarik adalah berbagai jenis plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia hanya Yogyakarta yang memiliki keanekaragamannya. Apabila mengamati plat nomor kendaraan kita dapat melihat ada berbagai macam ragamnya seperti BG, G, AB, L, R, B, AG, M, S, dll. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah kota istimewa, banyak mahasiswa dan pelajar membawa kendaraan dari daerah asal mereka dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta karena kecintaan mereka terhadap kota Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta bukan sekedar suatu fakta sejarah dan cerita masa lalu. Tetapi Keistimewaan Yogyakarta dapat terlihat dari denyut kehidupan masa kini dan yang akan datang. Sesungguhnya Yogyakarta telah menjadi ikon Indonesia ini harusnya mendapatkan penghargaan, perlindungan dan jaminan dari</p>		√				
----	-------------------	---	--	---	--	--	--	--

	pemerintah tetapi di era pemerintahan SBY malah ingin mencoba untuk mencabut akar historis dari keistimewaan itu sendiri.							
	JUMLAH	9	2	-	3	-	-	-

Lampiran 9. Hiponimi dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

No.	Nomor Kartu Data	Data
1	06/65T/04/Jan/11	Keraton juga menanggung biaya para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Keuangan RI dalam kondisi sangat buruk. Untuk pembiayaan ini, jumlah yang dikeluarkan oleh Keraton diperkirakan mencapai jutaan gulden. Hal ini juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, makanan dan harta benda .
2	23/ AKY/05/Jan/11	Bukan kebetulan Yogya berstatus daerah istimewa. Pada 19/8/1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan sembilan provinsi , di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jawa tengah tak mencakup Kooti Surakarta maupun Yogyakarta. Kooti dilanjutkan dan berhubungan langsung dengan Presiden RI. Bung Karno juga berkirim telgram bahwa HB IX dan PA VIII tetap dalam kedudukannya serta bertanggungjawab atas keselamatannya Yogya sebagai bagian RI. Tampaknya ‘Pigiam Kedudukan’ ini dihasilkan setelah ‘Presiden Soekarno berbicara di ‘belakang layar’ dengan wakil-wakil Kooti, sesuai saran Otto Iskandar Dinata (Setneg, 1995: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, hlm. 470).
3	27/SMK/05/Jan/11	Keadaan sosial-politik di Yogyakarta dan surakarta berubah cepat pada awal kemerdekaan Indonesia. Antara Oktober 1945 hingga Juni 1945 di Surakarta bergulir gerakan anti-swapraja untuk menghapus keistimewaan/kerajaan. Sejumlah petinggi kerajaan seperti Papatih Dalem (‘perdana menteri’) diculik dan dibunuh. Pusat pemerintahan (Kepelatihan) juga dibakar, diikuti pencopotan para bupati yang umumnya kerabat kerajaan.
4	36/SMK/06/Jan/11	Pada jalur demokrasi perwakilan, mayoritas fraksi DPRD Provinsi DIY (13/12/2010) dan DPRD Kabupaten Bantul (18/12/2010) resmi bersikap bahwa HB X dan PA IX ditetapkan sebagai gubernur-wagub tanpa pemilihan. Saat konfigurasi serupa terjadi di tiga kabupaten (Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo) dan Kota Yogya maka Partai Demokrat tak dapat mengendalikan kalaborasi ‘parpol koalisi dan oposisi’ di DIY.
5	49/KYE/08/Jan/11	Dengan demikian DIY, pada satu sisi mentaati konsensus nasional dalam bidang hukum dan perundang-undangan, kebijakan luar negeri, dan pendanaan pembangunan. Di sisi lain Yogyakarta mengatur dirinya sendiri, berdasarkan hak atas kedaulatan sebagai bekas kerajaan, oleh karena itu, kepemimpinan deipegang langsung oleh Sultan dan Paku Alam yang sedang jumeneng. Kenyataannya DIY dalam banyak hal malah menjadi barometer tegaknya demokrasi. Perilaku demokratis justru banyak diteladankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX dalam menyelesaikan persoalan sosial, politik, keamanan dan budaya . Dari Yogyakartaalah, penerapan sistem demokrasi dibangun atas semboyan “Tahta untuk kesejahteraan rakyat”.
6	51/KYE/08/Jan/11	Perubahan besar yang didorong oleh (force of change), yaitu krisis ekonomi, demokratisasi, desentralisasi dan tuntutan

		akan transparansi dan pertanggungjawaban telah melahirkan UU No 32/2004, No. 33/2004 dan No 25/2004 bertujuan memberikan peran yang lebih besar pada pemerintahan daerah dan masyarakat untuk membangun daerahnya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong reformasi pemerintahan disegala bidang yang berimplikasi terhadap disegala kebutuhan perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang lebih bersifat desentralistik dan partisipatif.
7	63/DDI/12/Jan/11	Seperti yang dikatakan Ketua PWI DIY, Drs. Sihono HT Msi (KR, 11/12/2010), bahwa untuk membuat rumusan perpaduan antara konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa yang nantinya menjadi buku panduan peliputan wartawan anggota PWI di area Yogya, bukanlah hal mudah adalah benar adanya. Sebagai sebuah konsesus nantinya menjadi panduan kerja-kerja jurnalistik di wilayah Yogyakarta, konsesus ini yang harus berdiri di atas kesepakatan <i>stake holders</i> kewartawanan, ilmuwan komunikasi, praktisi komunikasi, ilmuwan budaya dan aktivis budaya . Dengan beragamnya aktor yang ikut terlibat dalam perumusan konsesus JIY ini, bukan tidak mungkin perdebatan konseptual dan praktikal akan memakan waktu yang tidak pendek, padahal, urgensitas konsesus ini diburu waktu. Memang, problem waktu tidak seharusnya membatasi kualitas dan mutu konsep konsesus JIY ini.
8	113/DPPP/28/Jan/11	Kalaupun demokrasi mau diterapkan di DIY, ada benang merah yang bisa diterapkan dengan sistem pemilihan tidak langsung. Berdayakan DPRD sebagai presentasi rakyat untuk menentukan dan mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka terlaksananya desentralisasi formil, materiel dan riil bersama pemerintah DIY. Hal mana sudah disikapi oleh DPRD DIY dalam sidangnya tanggal 13 Desember 2010 bahwa semua fraksi (kecuali FPD) sepakat untuk Gubernur DIY tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tapi dengan penetapan. Manusia merencanakan, Allah juga punya rencana, tapi sebaik-baik rencana adalah rencana Allah SWT.

Lampiran 10. Repetisi dalam Wacana Politik Pada Rubrik Opini Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat”

No.	Nomor Kartu Data	Data	Penanda Kohesi									
			REPZ	RT	RA	REPS	RS	RM	REPN	RAD		
1	24/ AKY/05/Jan/11	Sebelumnya (15/7/1945), status kerajaan dibahas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dapat dimengerti. Wakil-wakil Yogyakarta dan Surakarta menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Anggota BPUPKI Soepomo menguraikan konsep negara kesatuan yaitu tanpa ‘negara bawahan’ (onderstaat), hanya ada daerah-daerah pemerintahan dan bukan staat.	√									
2	45/KYE/08/Jan/11	Kedua, adanya pembatasan masa (waktu) atas kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang terus menerus dianggengkan ditengarai akan mempunyai dampak pada menumpunya visi dan erosinya kepekaan penguasa terhadap persoalan-persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat luas. Kekuasaan seperti itu cenderung mempersonifikasikan kekuasaannya seolah-olah dirinya adalah kehendak dan kemauan masyarakat, atas nama masyarakat, sehingga mudah terjebak pada pola-pola penanganan secara pragmatis tanpa dibarengi observasi yang mendalam.	√									
3	46/KYE/08/Jan/11	Ketiga, adanya aksesibilitas publik terhadap kekuasaan . Dengan kata lain, publik juga diharapkan mempunyai akses yang sama dengan pihak-pihak lain untuk mempergunakan kekuasaan sesuai dengan konsensus yang telah disepakati bersama. Di sinilah kekuasaan dimaknai sebagai dari, oleh dan untuk rakyat. Sebab setiap individu yang menamakan dirinya elemen rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang wajar.	√									
4	47/KYE/08/Jan/11	Lantas bagaimana dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sejarah seperti saya sampaikan di depan tulisan ini? Di antara dasarnya keinginan untuk			√							

8	65/DDI/12/Jan/11	<p>konsensus JIY ini.</p> <p>Seperti kejadian tiga bencana alam, bencana jurnalisme dan bencana politik di Yogya pada periode pra erupsi dan pasca erupsi Merapi yang terlihat akhir-akhir ini, menjadi latar belakang yang cukup sah untuk mengurai fakta yang sejatinya merupakan identitas dalam penulisan karya jurnalistik. Opini, dugaan, isu dan tuduhan, bukanlah aras jurnalistik. Jurnalistik identik dengan fakta dan data. Contoh peliputan yang tidak bernapaskan etika jurnalistik sesungguhnya tak pantas disebut karya jurnalistik.</p>	√							
9	67/DDI/12/Jan/11	<p>Perkawinan antara ilmu jurnalisme dan aneka konsep Jawa adalah pokok utama dalam uraian isi buku panduan JIY ini. Pada titik ini, kita perlu mencari dan menemukan nilai-nilai budaya Jawa yang seirama dan senapas dengan konsep jurnalisme yang bertumpu pada fakta, kebenaran dan pro pada yang lain, kata Ashadi Siregar, bukan pada gosip dan <i>ngrasani</i>. Jurnalisme akhir-akhir ini sudah mengarah pada <i>ngrasani</i>, jauh dari <i>memayu hayuning bawana, ayem-tentrem</i>, dan patahnya <i>rukun agawe santosa</i> (Suwardi Endraswara, 2010), juga tanpa verifikasi, tanpa kebenaran, jauh dari komprehensif dan proporsional (Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2003).</p> <p>Wartawan yang bertugas di Yogya <i>kudu</i> memahami secara mendasar sejarah, potensi wisata, identitas kota, fenomena geologi dan perkembangan budaya. Wartawan sebagai mata keadilan dan kebenaran. Wartawan menulis dengan fakta bukan fiksi. Wartawan mendorong berita yang pro pada penguatan kohesi sosial dan rakyat marjinal. Wartawan mendorong dan mencari berita yang menguatkan peradaban kota. Jika ini dikawinkan dengan konsep nilai-nilai Jawa sebagai batu penjur yang merepresentasi nilai-nilai <i>universal</i> kemanusiaan, maka jurnalisme model ini layak disebut istimewa.</p>	√							
10	68/DDI/12/Jan/11	<p>Wartawan yang bertugas di Yogya <i>kudu</i> memahami secara mendasar sejarah, potensi wisata, identitas kota, fenomena geologi dan perkembangan budaya. Wartawan sebagai mata keadilan dan kebenaran. Wartawan menulis dengan fakta bukan fiksi. Wartawan mendorong berita yang pro pada penguatan kohesi sosial dan rakyat marjinal. Wartawan mendorong dan mencari berita yang menguatkan peradaban kota. Jika ini dikawinkan dengan konsep nilai-nilai Jawa sebagai batu penjur yang merepresentasi nilai-nilai <i>universal</i> kemanusiaan, maka jurnalisme model ini layak disebut istimewa.</p>	√							

11	71/RDP/19/Jan/11	<p>Kalau terjadi persamaan persepsi dan kesepakatan politik antara pemerintah dan fraksi-fraksi yang tergabung dalam mitra koalisi, maka dapat dipastikan draf RUUK DIY yang diajukan pemerintah akan berjalan mulus, dan tarik ulur kepentingan antara pemerintah dengan keraton dan masyarakat Yogyakarta dalam proses politik di DPR akan berakhir anti klimaks. Namun apapun hasil yang dicapai dalam proses politik di DPR, tetap akan meninggalkan luka sebagai hasil dari sebuah zero sum game politik. Pemerintah akan kehilangan muka apabila kalah dalam proses ini, sebaliknya keraton dan masyarakat Yogyakarta akan luka berkepanjangan apabila fraksi-fraksi DPR berbalik arah dan mendukung draf pemerintah. Sebagai sebuah permainan, politik memang sukar ditebak, semuanya bisa berubah. Yang semula mendukung, bisa saja berbalik menentang. Sebaliknya yang semula menentang, bisa saja berbalik mendukung. Namun keistimewaan Yogyakarta senyatanya bukanlah semata soal politik. Di dalamnya terkandung masalah moral, harga diri dan identitas kultural.</p>	√						
12	77/MKP/20/Jan/11	<p>Dalam 5 tahun terakhir kita digoncang dengan berbagai peristiwa. Kita masih ingat tahun 2006 masyarakat Bantul DIY mengalami peristiwa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan. Peristiwa gempa bumi tersebut juga sebuah momentum untuk memicu perubahan kesadaran dan posisi diri. Dengan kearifan lokalnya masyarakat Bantul bangkit pasca gempa 2006. Namun mereka tidak sekedar bangkit untuk kembali ke titik semula. Tumah-rumah tidak hanya diperbaiki seperti sediakala. Program rekonstruksi telah memperbaiki konstruksi bagaimana rumah tahan gempa itu seharusnya dibangun. Sekarang kita dapat melihat realitas hasil. Rumah-rumah penduduk di Bantul menjadi relatif lebih asri dan sehat. Lingkungan dan infrastruktur</p>	√						

13	79/MKP/20/Jan/11	<p>lebih baik. Semua itu telah melampaui titik kondisi sebelum gempa.</p> <p>Erupsi Merapi mengantar kita menuju kesadaran baru bagaimana memahami bahasa Merapi seraf mungkin, dan Erupsi Monarki mengantar kita sejenis kembali mendalami arti keistimewaan Yogyakarta. Sama dengan 2006 di Bantul peristiwa ini juga sedang dan akan menjadi momentum penguah kesadaran diri. Bagaimana kita dapat menjalani transformasi sehingga mampu melampaui kondisi dan posisi sebelum terjadi peristiwa erupsi. Kedua peristiwa itu sungguh mahal harganya. Rasanya terlalu mahal jika kita hanya ingin sekedar kembali sama ke titik semula. Bukan seperti keledai yang lebai. Kita bisa menjadi transformer-transformer yang mampu melihat visi kedepan untuk lebih mendekatkan pada cita-cita hidup bersama. Kita mempunyai sumber daya batin yang memungkinkan terjadinya lompatan yang melampaui titik semula. Sumber daya batin itu berupa keyakinan (belief) yang kuat. Keyakinan akan adanya kesejahteraan yang lahir dari pemahaman hakikat “Manunggaling Kawula Gusti”, “Memayu Hayuning Bawana” serta “Tahta untuk Rakyat”, berikut aktualisasinya dalam konteks kekinian.</p>	√						
14	85/MKP/20/Jan/11	<p>Dalam amanat 5 September 1945 Sri Sultan HB IX, membahasakan istimewa dalam kerangka NKRI. Amanat tersebut telah menepis stigma mitos monarkis yang serba magis, mitologis yang seolah-olah eksklusif. Keraton dalam realitasnya bisa inklusif lebih adaptif & aspiratif. Oleh karenanya Keraton hadir sebagai simbol, tanda dan sarana pengayom dinamika kehidupan bersama antara Raja dan Kawula, antara kawula dengan kawula serta dinamika internal Keraton dalam keluhuran integritas untuk siap diteladani.</p>	√						
15	86/MKP/20/Jan/11	<p>Tahta untuk rakyat adalah komitmen Raja yang bertekad</p>	√						

16	88/PKK/71/Jan/11	<p>meneladkan cara hidup besama berdasar atas nilai-nilai adhi luhung, yang bersumber dari prinsip-prinsip keutamaan hidup dijamin kerajaannya dalam Pancasila. Jadi menuju puncak kepenuhannya dalam Pancasila. Jadi keistimewaan adalah wujud tekad bersama antara Kerajaan Ngayogyakarta dan Negara Republik Indonesia untuk membangun kehidupan berbangsa, melalui pengakuan dan penghormatan atas kedudukannya masing-masing. Maka segenap kawula Jogja dapat berseru, “aku kawula Ngayogyakarta yang berbangsa Indonesia”.</p>	√						
17	98/BKK/27/Jan/11	<p>Sajian angka-angka statistik dan prosentase-prosentase adalah ciri khas demokrasi prosedural. Karena itu setiap kali diadakan pemilihan umum senantiasa ada prediksi-prediksi dan berbagai analisis perhitungan cepat (<i>quick count</i>). Namun apa yang muncul sebagai data kuantitatif tak selalu sinkron dengan data yang bersifat kualitatif. Praktik demokrasi pasca Reformasi baru mengantarkan kita pada pencapaian kuantitas dan belum kualitas, baru berdemokrasi secara prosedural dan belum secara substansial.</p> <p>Dalam praktik serba aksesoris itulah demokrasi sulit menghasilkan sebuah kepemimpinan, melainkan cukuplah sebagai pabrik kekuasaan dan kepejabatatan. Demokrasi di negeri kita dalam sejumlah reformasi adalah pabrik pengolah <i>the wrong men in the right place</i> dimana capaian-capaian kekuasaan ditempuh melalui mekanisme anti-demokrasi. Tirani “Duwitologi” dan represi figur tunggal penentu sebuah partai runyam menduduki pendidikan politik untuk mencapai keandalan masyarakat sipil. Partai, dengan begitu juga demokrasi, sebagai sarana dan wahana demokratisasi adalah nonsense. Partai hanyalah dominan menjadi alat memburu nafkah dan memperkaya diri, menebar pesona</p>	√						

18	99/BKK/27/Jan/11	<p>sekaligus dimana mungkin sebagai katrol neofeodalisme dimana “gembel” merajakan diri sedangkan raja sendiri merakyatkan dirinya.</p> <p>Keberantakan substansial <u>demokrasi</u> di negeri kita pun dengan sepenuh kebanggaan disahkan dengan materi kemajuan betapapun kedaluwarsa dan bahkan palsunya materi itu. Kedaluwarsa, sebab <u>demokrasi</u> selaku isu modernitas dengan ilmu sebagai penyangganya sudah lama bergerak menuruni lereng krisisnyanya. Dan sekaligus palsu, sebab <u>demokrasi</u> tanpa pengelolaan nilai-nilai dasarnya semisal transparansi, rasionalitas, jalan damai, kedewasaan warga negara dan hukum yang adil, bukanlah sejatinya <u>demokrasi</u>.</p>	✓																		
19	104/BKK/27/Jan/11	<p><u>Yogyakarta</u> adalah benteng terakhir keindonesiaan; demikian semua peserta sampai-sampai peserta Jawa Timur menjamin, jika keistimewaan <u>Yogyakarta</u> mau dikutak-kutik “Blitar sampai Banyuwangi” siap membela. Peserta asal Kalimantan Tengah, Makassar dan Tanah Sunda pun terang benerang mendukung penetapan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam. Namun, sejumlah doktor yang bekerja di <u>Yogyakarta</u> justru berketetapan melakukan transformasi <u>Yogyakarta</u> demi Indonesia dengan cara pengisian Gubernur DIY melalui pilkadal atas nama demokrasi; sambil “membuang ke atas” Sultan dan Sri Paduka sebagai Paradya atau Gubernur Utama. Mereka – boleh jadi – telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas <u>Yogyakarta</u> sesungguhnya lebih melucuti <u>Yogyakarta</u> dari nada keindonesiaannya.</p>	✓																		
20	109/PDD/28/Jan/11	<p>Bangsa Indonesia pernah mengalami <u>demokrasi</u> liberal yang kemudian direduksi oleh Bung Karno, presiden</p>	✓																		

21	110/PDD/28/Jan/11)	<p>pertama RI menjadi Demokrasi Terpimpin. Dalam era Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto demokrasi terpimpin di modifikasi menjadi Demokrasi Pancasila yang diintegrasikan dengan ajaran Eka Prasetya Panca Karsa dalam suatu jабaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dengan berbagai nilai positif dan negatifnya kedua tipologi demokrasi tersebut memiliki tuntunan yang jelas dan terarah. Sementara dalam era Reformasi sekarang ini demokrasinya tidak memiliki format yang terukur. Di satu sisi ada pemanjaan di kalangan rakyat, dan di sisi lain ada kendali kuat dari pusat kekuasaan yang bersembunyi di belakang legalitas konstitusional. Dalam kondisi ketiadaan format demokrasi seperti ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di arena pertarungan massal antara pendukung kebijakan pemerintah dengan pemilik <i>Kedaulatan Rakyat</i>. Tanda-tanda ke arah itu sebenarnya sudah tampak dengan berbagai bentuk demonstrasi massa menentang kebijakan penguasa di berbagai daerah yang sering berekses anarkhis. Kalau kekuatan massa tersebar itu terakumulasi secara nasional dalam satu gerakan maka akan terjadi kekacauan di negara tercinta ini.</p>	√						
		<p>Terlepas dari putaran sejarah yang sudah gamblang status kekratonan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat) seharusnya pemerintah tidak “ngotot” untuk memaksakan kepentingannya. Kawula Yogyakarta sudah cukup demokratis ikut menyaksikan SBY menjadi Presiden. Kalau kemudian kedudukan tertinggi NKRI ini akan dipakai menggebu demokrasi rakyat Yogyakarta, tentu tindakan ini justru tidak demokratis. Kembali kepada teori J Rousseau di atas, sesuai juga dengan kepatutan bahwa UU harus memperhatikan aspek sosiologis, sebaiknya identitas demokrasi jangan dipatenkan dengan UU Pemilukada dalam memilih Gubernur DIY.</p>							

22	112/DPP/28/Jan/11	<p>Kebenaran historis itulah yang harus ditetapkan, bukan menetapkan pembenaran yuridis yang penuh intrik-intrik politisasi kekratonan.</p> <p>Generalisasi penerapan asas demokrasi dalam perspektif otonomi daerah merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah DIY. Eksistensi kraton yang didramatisir sebagai identitas/symbol demokrasi monarkhi akhir-akhir ini menjadi polemik terhadap demokrasi nasional. Sementara demokrasi itu sendiri secara isoteris hanya dipahami oleh para elitis, sementara rakyat sendiri yang nota bene selalu dipakai stempel orasi politik, justru tidak banyak tahu tentang demokrasi. Bisa-bisa rakyat Yogyakarta berkesimpulan bahwa demokrasi adalah Pemilu pada dan sebaliknya Pemilu pada adalah demokrasi. Prevarikasi politik terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta jangan menjadikan ketidakpastian status “istimewa” menjadi “peristiwa” hukum yang mencederai rakyat DIY. Mempertunjukkan “demokrasi dan monarkhi yang sudah mapan” di DIY merupakan pemborosan energi politik nasional yang seharusnya fokus kepada upaya mengentaskan kemiskinan rakyat, termasuk kemiskinan akhlak dan moral_agama para penyelenggara negara yang doyan KKN.</p>	√						
JUMLAH		20	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 11. Kolokasi dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*

No.	Nomor Kartu Data	Data
1	06/65T/04/Jan/11	Keraton juga menanggung biaya para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Keuangan RI dalam kondisi sangat buruk. Untuk pembiayaan ini, jumlah yang dikeluarkan oleh Keraton diperkirakan mencapai jutaan gulden. Hal ini juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, makanan dan harta benda .
2	12/65T/04/Jan/11	Kini, setelah 65 tahun berdirinya Republik Jogja, heroisme, patriotisme, dan jiwa kemerdekaan rakyat Yogyakarta seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno sendiri mulai diragukan. RUUUK yang disusun pemerintah pusat dan telah diserahkan kepada DPR tidak selaras dengan kenyataan sejarah, bahkan terkesan merendahkan peran dan posisi Sultan serta jiwa dan semangat nasionalisme rakyat Yogyakarta. Sikap pemerintah pusat yang bertentangan dengan peran dan jasa Sultan dan rakyat Yogyakarta ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Oleh karena itu tidak mengherankan jika rakyat Yogyakarta semakin memperkuat ikatan emosional secara sosial kultural dengan Keraton dan menggelak jiwa kemerdekaannya.
3	25/AKY/05/Jan/11	Bentuk pemerintahan di daerah akan diatur undang-undang dengan mengakui kerajaan Sultanaat atau Kooti di Jawa dan luar Jawa, maupun daerah kecil bersusunan asli seperti desa, marga, nagari, huta/kuria atau gampong (Setneg, 1995:271-272). Moh Yamin juga mengusulkan pembentukan kementerian urusan Kooti dan Bung Hatta menyatakan kebutuhan UU tentang Kooti. Tetapi PPKI (19/8/1945) menolak usul wakil Yogya Poeroebojo agar ‘Kooti disahkan 100% zelfstanding (berdiri sendiri) karena bentuk negara kesatuan disepakati pada Pasal 1 UUD 1945 (Setneg, 1995:468).
4	34/SMK/06/Jan/11	Kemudian penjelasan Pasal 122 UU Nomor 22/1999 bergeser. Isi keistimewaan Yogya adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan wagub dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat undang-undang ini. Pergeseran ini diakui oleh Pasal 226 UU Nomor 32/2004 di masa Presiden Megawati, meski MPR tahun 2000 mengharuskan gubernur, bupati atau walikota dipilih secara demokrasi (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945).
5	41/KYE/08/Jan/11	Mari kita cermati kembali pengakuan negara terhadap keistimewaan Yogyakarta yang terkandung di dalam piagam Kedudukan yang diberikan negara kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka paku Alam VIII, pada tanggal 19 Agustus 1945 isi Piagam kedudukan Keistimewaan Yogyakarta itu, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno menetapkan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta. Bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia. Jadi ketentuan ini sudah jelas, sehingga jangan diinterpretasikan lagi yang justru membuat bingung masyarakat .
6	44/KYE/08/Jan/11	Demokrasi liberal mempunyai indikator yang tegas mengenai peralihan kekuasaan. Yakni, pertama, adanya rotasi kekuasaan. Kekuasaan tidak dimaknai sebagai suatu sistem yang permanen dan terus menerus melekat pada seseorang (pemimpin), tetapi dimaknai sebagai proses rekrutmen yang sehat, jujur, dan bersih . Dalam rekrutmen peralihan kekuasaan itu, setiap individu mempunyai hak untuk mengambil alih mandat kekuasaan secara elegan.

7	49/KYE/08/Jan/11	<p>Dengan demikian DIY, pada satu sisi mentaati konsensus nasional dalam bidang hukum dan perundang-undangan, kebijakan luar negeri, dan pendanaan pembangunan. Di sisi lain Yogyakarta mengatur dirinya sendiri, berdasarkan hak atas kedauatan sebagai bekas kerajaan, oleh karena itu, kepemimpinan deipegang langsung oleh Sultan dan Paku Alam yang sedang jumeneng. Kenyataannya DIY dalam banyak hal malah menjadi barometer tegaknya demokrasi. Perilaku demokratis justru banyak diteladankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX dalam menyelesaikan persoalan sosial, politik, keamanan dan budaya. Dari Yogyakarta telah, penerapan sistem demokrasi dibangun atas semboyan “Tahta untuk kesejahteraan rakyat”.</p>
8	51/KYE/08/Jan/11	<p>Perubahan besar yang didorong oleh (force of change), yaitu krisis ekonomi, demokratisasi, desentralisasi dan tuntutan akan transparansi dan pertanggungjawaban telah melahirkan UU No 32/2004, No. 33/2004 dan No 25/2004 bertujuan memberikan peran yang lebih besar pada pemerintahan daerah dan masyarakat untuk membangun daerahnya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong reformasi pemerintahan disegala bidang yang berimplikasi terhadap disegala kebutuhan perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang lebih bersifat desentralistik dan partisipatif.</p>
9	61/API10/Jan/11	<p>Hal itu menunjukkan bagaimana kontribusi Yogya dalam mengasuh, merawat, melindungi, dan membesarkan negara RI. Tanpa peran Yogya seperti itu maka negara RI belum tentu masih ada dan berkembang seperti sekarang ini!!!</p>
10	62/DDI/12/Jan/11	<p>IDE PWI Yogyakarta untuk membuat macam kosensus jurnalisme benuasa keistimewaan yang bertumpu pada akar budaya Jawa, menarik diperbincangkan. Jurnalisme Istimewa Yogyakarta (JIY) lahir dari pergumulan adanya peliputan media yang tak elok, bahkan cenderung tak berbudaya, kata erupsi Merapi terjadi. Padahal, masyarakat Yogya amat identik dengan lakon hidup yang bersandar pada falsafah hidup Jawa yang sarat nuansa spiritual, simbol, dan mutiara-mutiara kebijakan. Logika dan filsafat media yang belakangan ini makin buas, liar, materialistik, tak lagi seiring sejalan dengan dasar-dasar filsafat Jawa maupun etika jurnalisme. Mungkinkah konsensus JIY mengawinkan konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa? Bagaimana membentuk basis konsep dan panduan implementatifnya?</p>
11	63/DDI/12/Jan/11	<p>Seperti yang dikatakan Ketua PWI DIY, Drs. Sihono HT Msi (<i>KR</i>, 11/12/2010), bahwa untuk membuat rumusan perpaduan antara konsep jurnalistik dan konsep budaya Jawa yang nantinya menjadi buku panduan peliputan wartawan anggota PWI di area Yogya, bukanlah hal mudah adalah benar adanya. Sebagai sebuah konsesus nantinya menjadi panduan kerja-kerja jurnalistik di wilayah Yogyakarta, konsesus ini yang harus berdiri di atas kesepakatan <i>stake holders</i> kewartawanan, ilmuwan komunikasi, praktisi komunikasi, ilmuwan budaya dan aktivis budaya. Dengan beragamanya aktor yang ikut terlibat dalam perumusan konsesus JIY ini, bukan tidak mungkin perdebatan konseptual dan praktikal akan memakan waktu yang tidak pendek, padahal, urgensitas konsesus ini diburu waktu. Memang, problem waktu tidak seharusnya membatasi kualitas dan mutu konsep konsesus JIY ini.</p>
12	64/DDI/12/Jan/11	<p>Namun, berangkat dari realitas dan kompleksitas itu, kita perlu mencari strategi penyusunan konsep yang lengkap, cepat dan akurat, tanpa meninggalkan kualitas. Karena pokok tujuan dari konsep JIY ini akan dibukukan, maka persoalan format dan isi buku amat krusial diapungkan. Menurut saya, buku panduan ini sebisa mungkin simpel dalam format, kuat dalam isi konsep dan liat dalam praktikal. Ketiga elemen ini dapat dibuat <i>outline</i> buku seperti : 1. Latar belakang: <i>hatrick</i></p>

		bencana; 2. Basis konsep: perkawinan jurnalisme dan budaya Jawa; 3. Panduan implementasi: setting, kualitas narasumber, pola penulisan dan lain-lain.
13	65/DDI/12/Jan/11	Seperti kejadian tiga bencana alam, bencana jurnalisme dan bencana politik di Yogyakarta pada periode pra erupsi dan pasca erupsi Merapi yang terlihat akhir-akhir ini, menjadi latar belakang yang cukup sah untuk mengurai fakta yang sejatinya merupakan identitas dalam penulisan karya jurnalistik. Opini, dugaan, isu dan tuduhan , bukanlah aras jurnalistik. Jurnalistik identik dengan fakta dan data. Contoh peliputan yang tidak berpapasan etika jurnalistik sesungguhnya tak pantas disebut karya jurnalistik.
14	66/DDI/12/Jan/11	Manakala erupsi Merapi menimpa warga Yogyakarta, ia menyisahkan kisah duka, nestapa dan kengerian. Pengalaman traumatik ini, amat elok, etis dan cerdas , jika karya peliputan jurnalistik, memuat panduan preventif bencana, ulasan harapan di tengah bencana, semangat dan asa memulihkan kehidupan, sembari menyajikan tulisan inspiratif-solutif pasca bencana ihwal rekonstruksi kawasan, pemulihan ekonomi warga dan penataan infrastruktur <i>pro life</i> . Anehnya, tidak demikian! Hanya segelintir media yang menyuarakan ini. Yang lainnya, mabuk dengan histeria ala budaya pop yang tentunya jauh dari laku falsafah hidup Jawa. Belum kering air mata <i>wong</i> Yogyakarta, bencana politik menyergap. Politik <i>ngono yo ngono ning aja ngono</i> , tak berlaku dalam diskursus status keistimewaan Yogyakarta. Amnesia sejarah amat lekat dengan bencana politik ini.
15	68/DDI/12/Jan/11	Wartawan yang bertugas di Yogyakarta secara mendasar sejarah, potensi wisata, identitas kota, fenomena geologi dan perkembangan budaya . Wartawan sebagai mata keadilan dan kebenaran. Wartawan menulis dengan fakta bukan fiksi. Wartawan mendorong berita yang pro pada penguatan kohesi sosial dan rakyat marjinal. Wartawan mendorong dan mencari berita yang menguatkan peradaban kota. Jika ini dikawinkan dengan konsep nilai-nilai Jawa sebagai batu penjurru yang merepresentasi nilai-nilai <i>universal</i> kemanusiaan, maka jurnalisme model ini layak disebut istimewa.
16	69/DDI/12/Jan/11	Dalam konteks panduan implementatif, ada banyak parameter yang dapat dimasukkan. <i>Pertama</i> , penulisan berita yang mendukung identitas kota lengkap dengan <i>guidance</i> -nya. <i>Kedua</i> , karya jurnalistik harus mendukung kohesi sosial. Publik membaca kritik bukan dari deretan kata dan kalimat yang menyerang, vulgar, kotor dan kasar, tapi pembaca dapat merasakan sebuah kritik dari penyusunan diksi kata yang bertumpu pada kehadiran gagasan yang jernih, orientasi isinya membangun, bukan menghancurkan . Kritik jenis ini merepresentasikan keluhuran budi dan kewaskitaan sebagai manusia, meminjam Indra Tranggono. <i>Ketiga</i> , tulisan informasi geologi sebaiknya memuat hal preventif, <i>emergency</i> dan liputan rehabilitasi yang sigi dengan warna <i>mayu hayuning bawana</i> .
17	74/RDP/19/Jan/11	Tindakan pemerintah dengan menurunkan derajat Sultan dan Paku Alam untuk berkompetisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sangat mengusik harga diri, tidak saja Sultan dan Paku Alam, tetapi masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Raja yang dijunjung tinggi harus ikut dalam perebutan jabatan yang tentu saja sulit diterima dalam logika masyarakat Jawa. Dalam konsep tradisional Jawa, kekuasaan adalah wahyu yang menjadi amanat dari pribadi tinggi yang mendapatkannya. Kalau seorang raja harus ikut berkompetisi memperebutkan jabatan atau kekuasaan , tentu akan menghilangkan makna kesakralan dari kekuasaan itu sendiri. Raja akhirnya sama dengan pribadi lain yang mungkin

		<p>terjebak dalam permainan politik yang dapat menurunkan wibawanya dan menjatuhkan derajatnya sebagai seorang raja. Seorang raja harus menjaga <u>ucapan, sikap dan tata lakunya</u> yang mencerminkan pribadi tinggi sebagai khalifatullah sayidina panatagama. Dalam istilah Jawa dikenal ungkapan sabda pandhita ratu, tan keno wola-wali, lan berbudi bawalaksana. Dalam konsep ini, seorang raja adalah juga seorang pandhita yang ucapan dan perilakunya sangat terjaga. Rakyat sudah tentu tidak akan menerima bentuk perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat rajanya, dan tentu akan melakukan “perlawanan” untuk menjaga <u>martabat dan harga diri</u> rajanya.</p>
18	85/MKP/20/Jan/11	<p>Dalam amanat 5 September 1945 Sri Sultan HB IX, membahasakan istimewa dalam kerangka NKRI. Amanat tersebut telah menepis stigma mitos monarkis yang serba magis, mitologis yang seolah-olah eksklusif. Keraton dalam realitasnya bisa inklusif lebih adaptif & aspiratif. Oleh karenanya Keraton hadir sebagai <u>simbol, tanda dan sarana</u> pengayom dinamika kehidupan bersama antara Raja dan Kawula, antara kawula dengan kawula serta dinamika internal Keraton dalam keluhuran integritas untuk siap diteladani.</p>
19	88/PKK/71/Jan/11	<p>Sajian angka-angka statistik dan prosentase-prosentase adalah ciri khas demokrasi prosedural. Karena itu setiap kali diadakan pemilihan umum senantiasa ada prediksi-prediksi dan berbagai analisis perhitungan cepat (<i>quick count</i>). Namun apa yang muncul sebagai data kuantitatif tak selalu sinkron dengan data yang bersifat kualitatif. Praktik demokrasi pasca Reformasi baru mengantarkan kita pada pencapaian <u>kuantitas dan belum kualitas</u>, baru berdemokrasi secara prosedural dan belum secara substansial.</p>
20	94/PKK/27/Jan/11	<p>Jika dikembangkan pemahaman sejarah dan politik yang kuat maka semangat pro keistimewaan tidak menjadi semangat yang emosional yang hanya bermodalkan tekad “<i>pokoke</i>”. Di sisi lain, komitmen masyarakat terhadap keistimewaan itu juga tidak sekedar keputusan “<i>nggih nggih ora kepenggih</i>” seperti dituduhkan oleh J Kristiadi. Dengan demikian sikap pro keistimewaan yang berkembang tidak sekedar <u>sloganistik, euforia, dan simbolis</u>. Pro keistimewaan juga bukan sekedar aksi kuantitatif segenap masyarakat, namun sebuah komitmen bersama yang berkualitas mendalam!</p>
21	96/BKK/27/Jan/11	<p><u>Gubernur, bupati, walikota, ketua RT atau presiden</u> sekalipun belum otomatis pemimpin jika mereka hanya mengandalkan sandaran kepejabatannya melalui mayoritas hasil suatu coblosan. Kuantifikasi hasil dengan cara coblos atau <i>contreng</i>, atau yang tempo dulu dengan cara memasukkan “biting” kedalam bumbung, dalam bahasa modernnya disebut dengan pemilu atau Pemilukada. Kemenangan ditentukan oleh cacah gundul, gundul sesiapapun, dengan rumusan yang sangat simplistik, separuh lebih satu – demikian dalil demokrasi barat liberal yang diterima meluas selama ratusan tahun.</p>
22	98/BKK/27/Jan/11	<p>Dalam praktik serba aksesoris itulah demokrasi sulit menghasilkan sebuah kepemimpinan, melainkan cukuplah sebagai pabrik kekuasaan dan kepejabatannya. Demokrasi di negeri kita dalam sejumlah reformasi adalah pabrik pengolah <i>the wrong men in the right place</i> dimana capaian-capaian kekuasaan ditempuh melalui mekanisme anti-demokrasi. Tirani “Duwitologi” dan represi figur tunggal penentu sebuah partai runyam mengendali pendidikan politik untuk mencapai keandalan masyarakat sipil. Partai, dengan begitu juga demokrasi, sebagai sarana dan wahana demokratisasi adalah nonsense. Partai hanyalah dominan menjadi alat memburu <u>nafkah dan memperkaya diri, menebar pesona</u> sekaligus dimana mungkin sebagai katrok neofeodalisme dimana “gembel” merajakan diri sedangkan raja sendiri merakyatkan dirinya.</p>

23	102/BKK/27/Jan/11	Diantar oleh kanal-kalan sejarah, budaya, filosofi dan kanal kejuangan , Yogyakarta bergerak menunjukkan epistemologi demokrasi di Indonesia sebagai memang “Demokrasi Indonesia”, yang hanya secara demikialah bangsa ini sanggup mengindonesiakan Indonesia. Gerakan rakyat yang mayoritas tidak berpendidikan tinggi itu secara kategoris menolak sosialisasi ilmiah sejumlah pakar yang ingin menggeneralisasi paham demokrasi asing untuk Yogyakarta; bahkan Indonesia.
24	104/BKK/27/Jan/11	Yogyakarta adalah benteng terakhir keindonesiaan; demikian semua peserta sampai-sampai peserta Jawa Timur menjamin, jika keistimewaan Yogyakarta mau dikutak-kutik “Blitar sampai Banyuwangi” siap membela. Peserta asal Kalimantan Tengah, Makassar dan Tanah Sunda pun terang benerang mendukung penetapan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam. Namun, sejumlah doktor yang bekerja di Yogyakarta justru berketetapan melakukan transformasi Yogyakarta demi Indonesia dengan cara pengisian Gubernur DIY melalui pilkadal atas nama demokrasi; sambil “membuang ke atas” Sultan dan Sri Paduka sebagai Paradya atau Gubernur Utama. Mereka – boleh jadi – telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas Yogyakarta sesungguhnya lebih melucuti Yogyakarta dari nada keindonesiaannya.
25	113/DPPP/28/Jan/11	Kalaupun demokrasi mau diterapkan di DIY, ada benang merah yang bisa diterapkan dengan sistem pemilihan tidak langsung. Berdayakan DPRD sebagai presentasi rakyat untuk menentukan dan mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka terlaksananya desentralisasi formil, materiel dan riel bersama pemerintah DIY. Hal mana sudah disikapi oleh DPRD DIY dalam sidangnya tanggal 13 Desember 2010 bahwa semua fraksi (kecuali FPD) sepakat untuk Gubernur DIY tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tapi dengan penetapan. Manusia merencanakan, Allah juga punya rencana, tapi sebaik-baik rencana adalah rencana Allah SWT.
26	114/SKY/29/Jan/11	Berdasarkan hasil sidang di DPR RI terkait pembahasan RUU DIY, pada hari Rabu 26 Januari 2011 kemarin menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk “menghabisi” keistimewaan Yogyakarta pada sisi politik dan budaya nampak terlihat dengan jelas. Pada sisi politik, apabila kita mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin meredukasi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di Yogyakarta. Sedangkan pada sisi budaya, pemerintah hanya menganggap Yogyakarta sebatas sebagai provinsi yang sama dengan provinsi lain. Keistimewaan Yogyakarta dianggap hanya sekadar warisan sejarah dan budaya pada masa dinasti Sultan Hamengku Buwono IX saja. Di tengah-tengah euforia demokrasi dan pemilihan langsung, suara rakyat sudah tidak lagi menjadi bagian dari esensi demokrasi. Kepentingan penguasa lebih utama dari pada mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY tampaknya sudah mendekati pemerintahan bertangan besi dan ber-rejim pemilihan <i>Kedaulatan Rakyat</i> sudah tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan partai, penguasa dan pengusaha. Sistem perwakilan yang telah dianut oleh negeri ini telah gugur dengan sendirinya ketika para wakil rakyat dan lembaga perwakilan rakyat lainnya sudah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lalu apa istimewa negeri ini? Ambisi pemerintah yang tetap menginginkan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta merupakan proses pemaksaan kepentingan yang bersumber dari perlawanan ideologi yang tidak demokratis di suatu negara demokrasi. Dalam hal ini, pemerintah sudah kalah karena dasar yuridis konstitusional dan historis sangat lemah untuk menunjukkan
27	116/SKY/29/Jan/11	

		kepentingannya melakukan demokratisasi dengan cara pemaksaan. Fakta lain yang menunjukkan keistimewaan Yogyakarta adalah pergerakan reformasi pada tahun 1997 juga lahir dari rahim kota Yogyakarta, <u>berbagai elemen masyarakat, organisasi, intelektual muda, dan praktisi</u> merapatkan barisannya untuk menggelorakan gerakan reformasi pada masa itu bertitik toak dari Yogyakarta.
28	118/SKY/29/Jan/11	Beberapa warisan kebudayaan tersebut telah menginspirasi daerah-daerah di Indonesia untuk ikut memperjuangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya diikuti oleh alat musik angklung dari Jawa Barat juga mendapatkan pengakuan oleh UNESCO tahun 2010 sebagai warisan budaya dunia tak benda. Demokrasi dan politik tanpa dilandasi sisi kemanusiaan yang didalamnya mengandung <u>toleransi, kerja sama, kepedulian, dialog dan penghormatan</u> hanya akan menyebabkan disharmonis dan ketegangan.
29	119/SKY/29/Jan/11	Harmoni bangsa dan integrasi nasional akan terganggu apabila kepentingan politik dari golongan tertentu merusak tatanan masyarakat yang sudah <u>damai, tenang, dan nyaman</u> . Kebutuhan masyarakat dan rakyat tidak hanya untuk sekadar ikut pemilihan tetapi kebutuhan dasar mereka adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, bagaimana mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan jaminan kesehatan yang cukup.
30	121/SKY/29/Jan/11	Sisi lain keistimewaan Yogyakarta adalah keinginan rakyat untuk tetap bisa menikmati hari esok yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, adanya pendidikan yang murah dan merakyat dan jaminan kesehatan yang lebih baik bukan untuk ikut pemilu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya bisa <u>sehat, cerdas, dan waras</u> .
31	122/SKY/29/Jan/11	Oleh karena itu, Yogyakarta sebagai daerah istimewa adalah jaminan akan peradaban manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan merakyat dan demokrasi tidak akan berarti apabila tidak ada <u>kedamaian, kenyamanan, dan keharmonisan</u> . Istimewanya negeri ini ketika masih ada daerah yang istimewa yang tetap menjadi benteng peradaban dan kebudayaan Indonesia.

Lampiran 12. Ekuivalensi dalam Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

No.	Nomor Kartu Data	Data
1	41/KYE/08/Jan/11	<p>Mari kita cermati kembali pengakuan negara terhadap keistimewaan Yogyakarta yang terkandung di dalam piagam Kedudukan yang diberikan negara kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka paku Alam VIII, pada tanggal 19 Agustus 1945 isi Piagam kedudukan Keistimewaan Yogyakarta itu, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno menetapkan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta. Bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Jadi ketentuan ini sudah jelas, sehingga jangan diinterpretasikan lagi yang justru membuat bingung masyarakat.</p> <p>Sistem pemerintahan asli dan kepemimpinan Sultan dan Paku Alam di Yogya – sebagai sebuah nagari yang eksis selama ratusan tahun – memberi motivasi bagi para pemimpinan RI untuk membangun organisasi barunya yang bernama republik itu. Itulah sebabnya Mr Ali Sastoamidjojo mengatakan bahwa dengan menjadikan Kota Mataram sebagai ibukota maka RI akan dapat melangsungkan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahannya.</p>
2	60/API10/Jan/11	<p>Manakala erupsi Merapi menerpa warga Yogya, ia menysaikan kisah duka, nestapa dan kengerian. Pengalaman traumatik ini, amat elok, etis dan cerdas, jika karya peliputan jurnalistik, memuat panduan preventif bencana, ulasan harapan di tengah bencana, semangat dan asa memulihkan kehidupan, sembari menyajikan tulisan inspiratif-solutif pasca bencana ihwal rekonstruksi kawasan, pemulihan ekonomi warga dan penataan infrastruktur <i>pro life</i>. Anehnya, tidak demikian! Hanya segelintir media yang menyuarakan ini. Yang lainnya, mabuk dengan histeria ala budaya pop yang tentunya jauh dari laku falsafah hidup Jawa. Belum kering air mata <i>wong</i> Yogya, bencana politik menyergap. Politik <i>ngono yo ngono ning aja ngono</i>, tak berlaku dalam diskursus status keistimewaan Yogya. Amnesia sejarah amat lekat dengan bencana politik ini.</p>
3	66/DDI/12/Jan/11	<p>Pro kontra wacana pemilihan dan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY terkait draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang dikemukakan pemerintah tampaknya belum akan berakhir. Sejauh ini pemerintah kelihatan begitu percaya diri bahwa draf RUUK yang diajukan akan mendapat pengesahan DPR. Keyakinan itu setidaknya didasarkan pada dua hal, pertama, pemerintah berpendapat bahwa gerakan massa yang termanifestasi dalam aksi mendukung penetapan hanyalah sebagian saja dari sikap keseluruhan masyarakat Yogyakarta. Kedua, setelah mengalami penundaan beberapa kali, akhirnya pemerintah menyajikan draf RUUK DIY ke DPR (16/12). Pengajuan dilakukan setelah sebelumnya pemerintah melakukan harmonisasi dengan partai-partai mitra koalisi yang sebelumnya memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah terkait dengan draf RUUK DIY.</p>
4	70/RDP/19/Jan/11	<p>Dalam 5 tahun terakhir kita digoncang dengan berbagai peristiwa. Kita masih ingat tahun 2006 masyarakat Bantul DIY mengalami peristiwa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan. Peristiwa gempa bumi tersebut juga sebuah momentum untuk memicu perubahan kesadaran dan posisi diri. Dengan kearifan lokalnya masyarakat Bantul</p>

		<p>bangkit pasca gempa 2006. Namun mereka tidak sekedar bangkit untuk kembali ke titik semula. Rumah-rumah tidak hanya diperbaiki seperti sedia kala. Program rekonstruksi telah memperbaiki konstruksi bagaimana rumah tahan gempa itu seharusnya dibangun. Sekarang kita dapat melihat realitas hasil. Rumah-rumah penduduk di Bantul menjadi relatif lebih asri dan sehat. Lingkungan dan infrastruktur lebih baik. Semua itu telah melampaui titik kondisi sebelum gempa.</p> <p>Apa yang sebenarnya istimewa tentang Yogyakarta. Bagaimana jiwa keistimewaan itu dihayati dalam konteks hidup berbangsa saat ini. Menjadi kawula Yogyakarta adalah kebanggaan sekaligus amanah untuk menjaga semangat kebhinekaan dalam NKRI. Yogyakarta menjadi istimewa karena berposisi dalam jajaran NKRI. Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono IX, tidak menempatkan kata istimewa sebagai tujuan pada dirinya sendiri (baca ; Yogyakarta). Khas dari yang disebut istimewa ada ketika ia berada dalam taburan kebhinekaan Indonesia. Hal itu dapat kita baca dalam “Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan” tanggal 5 September 1945 sbb :</p> <p>Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan : Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifar kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia Dst. (Soedarisman, 1984; Purwadi, 2010).</p>
6	80/MKP/20/Jan/11	<p>Yogyakarta adalah benteng terakhir keindonesiaan; demikian semua peserta sampai-sampai peserta Jawa Timur menjamin, jika keistimewaan Yogyakarta mau dikutak-kutik “Blitar sampai Banyuwangi” siap membela. Peserta asal Kalimantan Tengah, Makassar dan Tanah Sunda pun terang benerang mendukung penetapan Ngarso Dalem dan Sri Paduka Paku Alam. Namun, sejumlah doktor yang bekerja di Yogyakarta justru berketetapan melakukan transformasi Yogyakarta demi Indonesia dengan cara pengisian Gubernur DIY melalui pilkadal atas nama demokrasi; sambil “membuang ke atas” Sultan dan Sri Paduka sebagai Pararadya atau Gubernur Utama. Mereka – boleh jadi – telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas Yogyakarta sesungguhnya lebih melucuti Yogyakarta dari nada keindonesiaannya.</p>
7	104/BKK/27/Jan/11	
8	114/SKY/29/Jan/11	<p>Berdasarkan hasil sidang di DPR RI terkait pembahasan RUU DIY, pada hari Rabu 26 Januari 2011 kemarin menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk “menghabisi” keistimewaan Yogyakarta pada sisi politik dan budaya nampak terlihat dengan jelas. Pada sisi politik, apabila kita mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin meredukasi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di Yogyakarta. Sedangkan pada sisi budaya, pemerintah hanya menganggap Yogyakarta sebatas sebagai provinsi yang sama dengan provinsi lain. Keistimewaan Yogyakarta dianggap hanya sekedar warisan sejarah dan budaya pada masa dinasti Sultan Hamengku Buwono IX saja. Di tengah-tengah euforia demokrasi dan pemilihan langsung, suara rakyat sudah tidak lagi menjadi bagian dari esensi demokrasi. Kepentingan penguasa lebih utama dari pada mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY tampaknya sudah mendekati pemerintahan bertangan besi dan ber-rejim pemilihan. <i>Kedaulatan Rakyat</i> sudah tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan partai, penguasa dan pengusaha. Sistem perwakilan yang telah dianut oleh negeri ini telah gugur dengan sendirinya ketika para wakil rakyat dan lembaga perwakilan rakyat lainnya sudah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. <u>Lalu apa istimewanya negeri ini?</u></p>
9	115/SKY/29/Jan/11	<p>Sekarang, keistimewaan Yogyakarta tidak pernah dilihat dalam ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Apabila kita cermati</p>

bahwa ada sisi lain yang menarik yang dapat menunjukkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang lebih humanis. Hal itu terbukti dari predikat Yogyakarta yang mampu mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan kalangan masyarakat banyak. Sisi kebhinekaan Yogyakarta pun terbukti dengan berdirinya berbagai asrama daerah dari Sabang sampai Merauke dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 33 asrama daerah yang dibangun di tanah Yogyakarta. Daerah mana yang ada di Indonesia memiliki asrama daerah yang **beragam** seperti di Yogyakarta. Sisi lain yang menarik adalah berbagai jenis plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia hanya Yogyakarta yang memiliki **keanekaragamannya**. Apabila mengamati plat nomor kendaraan kita dapat melihat ada berbagai macam **ragamnya** seperti BG, G, AB, L, R, B, AG, M, S, dll. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah kota istimewa, banyak mahasiswa dan pelajar membawa kendaraan dari daerah asal mereka dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta karena kecintaan mereka terhadap kota Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta bukan sekedar suatu fakta sejarah dan cerita masa lalu. Tetapi Keistimewaan Yogyakarta dapat terlihat dari denyut kehidupan masa kini dan yang akan datang. Sesungguhnya Yogyakarta telah menjadi ikon Indonesia mini harusnya mendapatkan penghargaan, perlindungan dan jaminan dari pemerintah tetapi di era pemerintahan SBY malah ingin mencoba untuk mencabut akar historis dari keistimewaan itu sendiri.